

Editor : Oki Anggara, M.Si.



FUTURE SCIENCE

MENYUARAKAN PERUBAHAN

MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK
DI ERA DIGITAL

Penulis :

Putri Handayani Lubis | Susi | Loso Judijanto
Hendy Achmad Reynaldi | Darto Wahidin
Amri Wahid Hidayat | Muhammad Ishak Syahadat
Sapta M.T. Purba | Emillia | Muhammad Rachimoellah



**MENYUARAKAN PERUBAHAN: Media,
Pemuda, dan Pendidikan Politik di Era
Digital**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENYUARAKAN PERUBAHAN: Media, Pemuda, dan Pendidikan Politik di Era Digital

Penulis:

Putri Handayani Lubis, M.Si.
Susi, S.Pd., M.Pd.
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Hendy Achmad Reynaldi, S.I.P.
Darto Wahidin, S.Pd., M.Sc.
Amri Wahid Hidayat, S.I.P., M.I.Pol
Muhammad Ishak Syahadat, ST., M.I.P
Dr. Sapta M.T. Purba, S.Sos, M.Pd.
Emillia, S.H., M.Kn.
Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.

Editor:

Oki Anggara, M.Si.



MENYUARAKAN PERUBAHAN: Media, Pemuda, dan Pendidikan Politik di Era Digital

Penulis:

Putri Handayani Lubis, M.Si.
Susi, S.Pd., M.Pd.
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
Hendy Achmad Reynaldi, S.I.P.
Darto Wahidin, S.Pd., M.Sc.
Amri Wahid Hidayat, S.IP., M.I.Pol
Muhammad Ishak Syahadat, ST., M.I.P
Dr. Sapta M.T. Purba, S.Sos, M.Pd.
Emillia, S.H., M.Kn.
Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.

Editor: Oki Anggara, M.Si.

Desain Cover: Nada Kurnia, S.I.Kom.

Tata Letak: Samuel, S.Kom.

Ukuran: A5 Unesco (15,5 x 23 cm)

Halaman: xii, 208

e-ISBN: 978-634-7430-03-8

Terbit Pada: Oktober 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)**

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumber Sari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku bunga rampai berjudul **Menyuarakan Perubahan: Media, Pemuda, dan Pendidikan Politik di Era Digital** dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan akan pentingnya memahami peran media dan pemuda dalam dinamika politik kontemporer, khususnya di era digital yang serba cepat dan penuh tantangan. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang relevan bagi dunia akademik sekaligus praktik pendidikan politik di masyarakat.

Bunga rampai ini berisi kumpulan tulisan dari para akademisi, peneliti, dan praktisi yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu media, kepemudaan, serta pendidikan politik. Setiap bab dalam buku ini menyoroti aspek berbeda namun saling melengkapi: dari evolusi media sebagai sarana pendidikan politik, tantangan bias dan disinformasi, peran pemuda sebagai agen perubahan, hingga pendidikan politik melalui jalur informal seperti seni dan budaya. Dengan keragaman perspektif ini, buku ini tidak hanya menawarkan analisis konseptual, tetapi juga menyajikan praktik-praktik inspiratif yang bisa menjadi rujukan bagi generasi muda maupun para pendidik.

Sebagai editor, saya merasakan betul bahwa proses penyusunan buku ini bukanlah pekerjaan mudah. Kolaborasi dengan para penulis dari latar belakang yang beragam memperkaya sudut pandang, sekaligus menguji kesabaran dan

konsistensi dalam menjaga kualitas naskah. Namun, justru di situlah letak nilai pentingnya, bahwa gagasan-gagasan besar tentang demokrasi, media, dan pemuda harus lahir melalui dialog, perbedaan pandangan, dan kerja bersama. Semangat kolektif inilah yang menjadi jiwa dari bunga rampai ini.

Saya percaya, buku ini akan bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi aktivis, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang tertarik dengan isu demokrasi dan pendidikan politik. Di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi politik, literasi media dan kesadaran kritis menjadi bekal yang mutlak bagi pemuda. Melalui tulisan-tulisan di dalamnya, pembaca diajak untuk melihat media tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena perjuangan ide, ruang belajar, sekaligus medan pembentukan kesadaran politik.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini, juga kepada pihak penerbit yang telah memfasilitasi proses penerbitan. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu ikhtiar kecil dalam memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya nantikan demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Malang, September 2025

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK: SEBUAH PENGANTAR	1
Putri Handayani Lubis, M.Si.	1
PENDAHULUAN	1
PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT	3
KEBUTUHAN AKAN PENDIDIKAN POLITIK DI ERA INFORMASI YANG SERBA CEPAT	5
HUBUNGAN SIMBIOSIS ANTARA MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK.....	7
PERKEMBANGAN MEDIA DI ERA DIGITAL	9
PERAN MEDIA DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN AGENDA SETTING	11
PEMUDA SEBAGAI AKTOR PERUBAHAN	14
PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI FONDASI KESADARAN KRITIS	16
SINERGI MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK.....	19
KESIMPULAN.....	23
BAB 2 EVOLUSI MEDIA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK	27
Susi, S.Pd., M.Pd.	27
PENDAHULUAN	27
SEJARAH MEDIA DALAM PENDIDIKAN POLITIK ...	31

	PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK	38
	TRANSFORMASI MEDIA DAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA	43
	KESIMPULAN	46
BAB 3	MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG BARU PENDIDIKAN POLITIK	53
	Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.	53
	PENDAHULUAN	53
	MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT MOBILISASI DAN POLITISASI PUBLIK	61
	MASA DEPAN MEDIA SOSIAL DALAM PENDIDIKAN POLITIK	67
	KESIMPULAN	73
BAB 4	BIAS DAN DISINFORMASI: ANCAMAN MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK	77
	Hendy Achmad Reynaldi, S.I.P.	77
	PENDAHULUAN	77
	DINAMIKA FENOMENA POST-TRUTH DALAM MEDIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK	80
	KESIMPULAN	86
BAB 5	PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN POLITIK....	91
	Darto Wahidin, S.Pd., M.Sc.	91
	PENDAHULUAN	91
	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLIBATAN PEMUDA DALAM POLITIK	96

	DAMPAK PARTISIPASI PEMUDA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK	100
	KESIMPULAN.....	106
BAB 6	TANTANGAN APATISME POLITIK DI KALANGAN PEMUDA.....	113
	Amri Wahid Hidayat, S.IP., M.I.Pol.....	113
	PENDAHULUAN	113
	GOLPUT SEBAGAI SIKAP APATISME POLITIK	115
	IMPLIKASI APATISME POLITIK PEMUDA TERHADAP DEMOKRASI	119
	MEMINIMALISASI APATISME PEMUDA DENGAN PENDIDIKAN POLITIK DI MEDIA SOSIAL	121
	KESIMPULAN.....	127
BAB 7	PERAN ORGANISASI PEMUDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK.....	131
	Muhammad Ishak Syahadat, ST., M.I.P	131
	PENDAHULUAN	131
	PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR.....	133
	FUNGSI DAN TUJUAN ORGANISASI PEMUDA DALAM SISTEM POLITIK	135
	STRATEGI ORGANISASI PEMUDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK.....	138
	KESIMPULAN.....	144
BAB 8	PENDIDIKAN POLITIK INFORMAL MELALUI SENI DAN BUDAYA.....	147
	Dr. Sapta M.T. Purba, S.Sos, M.Pd.	147
	PENDAHULUAN	147

	PENDIDIKAN POLITIK INFORMAL MELALUI SENI DAN BUDAYA SERTA TANTANGANNYA DALAM MEINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK	149
	KESIMPULAN.....	161
BAB 9	STUDI KASUS PENDIDIKAN POLITIK MELALUI MEDIA DI NEGARA LAIN	163
	Emillia, S.H., M.Kn.	163
	PENDAHULUAN	163
	MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK	165
	KECERDASAN TIRUAN PERSPEKTIF STRATEGI POLITIK MODERN.....	167
	DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN KECERDASAN TIRUAN DALAM INTERAKSI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK	168
	PENERAPAN ETIKA INTERAKSI POLITIK PERSPEKTIF PENGGUNAAN Kecerdasan TIRUAN.....	170
	STUDI KASUS PERSUASI BERESIKO TINGGI DI AFRIKA.....	172
	STUDI KASUS DAMPAK MEDIA SOSIAL PADA PEMILU AMERIKA SERIKAT 2024	173
	STUDI KASUS MANIPULASI Kecerdasan TIRUAN PADA PEMILU INDIA 2024.....	175
	STUDI KASUS PENGGUNAAN Kecerdasan TIRUAN PADA KAMPANYE DI INDONESIA	176
	KESIMPULAN	178
BAB 10	PERAN MEDIA DALAM PEMILU DAN KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA	183
	Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.....	183

PENDAHULUAN	183
EVOLUSI MEDIA DALAM POLITIK INDONESIA	185
TIPOLOGI MEDIA DALAM KAMPANYE POLITIK ..	188
REGULASI MEDIA DALAM PEMILU	190
FUNGSI INFORMASI DAN EDUKASI POLITIK	192
DINAMIKA MEDIA DALAM PEMILU INDONESIA KONTEMPORER	195
TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA.....	198
KESIMPULAN.....	200

BAB 1

MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK: SEBUAH PENGANTAR

Putri Handayani Lubis, M.Si.
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
E-mail: putrihandayani.lubis@iainptk.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, media telah menjadi salah satu pilar utama yang membentuk cara manusia berinteraksi, berpikir, dan bertindak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian berita, tetapi juga telah menjelma menjadi ruang publik yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari budaya, ekonomi, hingga politik (Castells, 2013). Media, dalam berbagai bentuknya—cetak, elektronik, maupun digital—telah mengubah cara manusia mengakses informasi, membentuk opini, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, media tidak hanya menjadi cermin realitas sosial, tetapi juga aktor aktif yang membentuk realitas tersebut (McQuail, 2020).

Peran media semakin krusial di era digital, di mana informasi dapat disebarluaskan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. *Platform* media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook telah menciptakan ruang baru bagi diskusi publik, memungkinkan individu untuk terlibat dalam percakapan global tanpa batas geografis (Van Dijck, 2004). Namun, di balik kemudahan akses informasi ini, muncul tantangan baru seperti penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat,

tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen manipulasi dan kontrol sosial (Tandoc Jr. et al., 2018 dan Lim, 2017).

Bagi pemuda, media memiliki peran ganda: sebagai sumber pengetahuan dan sebagai arena untuk mengekspresikan identitas serta aspirasi politik. Pemuda, yang sering disebut sebagai "*digital natives*," tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi oleh teknologi digital. Mereka tidak hanya mengonsumsi media, tetapi juga memproduksi dan menyebarkan konten, sehingga menjadi aktor penting dalam dinamika sosial-politik (Bennett & Segerberg, 2012). Namun, tanpa pemahaman yang kritis terhadap informasi yang mereka terima, pemuda rentan terpapar oleh pengaruh negatif media, seperti propaganda dan narasi yang memecah belah.

Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi elemen krusial dalam membekali pemuda dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menanggapi informasi secara kritis. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi kompleksitas informasi di era digital (Westheimer, J., & Kahne, 2004). Dalam konteks ini, media dan pendidikan politik harus berjalan beriringan, menciptakan sinergi yang memungkinkan pemuda menjadi agen perubahan yang informan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, memahami interaksi antara media, pemuda, dan pendidikan politik menjadi langkah awal yang penting dalam menghadapi tantangan demokrasi di abad ke-21. Bab ini akan menguraikan bagaimana ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk landasan bagi partisipasi politik yang lebih inklusif dan berdaya.

PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT

Pemuda seringkali disebut sebagai "agen perubahan" (*agent of change*) dalam masyarakat, sebuah istilah yang menggambarkan peran sentral mereka dalam mendorong transformasi sosial, politik, dan budaya. Sejarah mencatat bahwa pemuda selalu berada di garda depan dalam berbagai gerakan perubahan, mulai dari revolusi kemerdekaan, gerakan hak asasi manusia, hingga aksi-aksi lingkungan kontemporer (Checkoway, 2011). Dinamisme, energi, dan idealisme yang dimiliki oleh pemuda membuat mereka menjadi kekuatan yang tidak hanya mampu merespons tantangan zaman, tetapi juga menciptakan visi baru untuk masa depan.

Salah satu alasan mengapa pemuda memiliki peran penting dalam perubahan sosial adalah karakteristik mereka yang cenderung kritis, kreatif, dan berani mengambil risiko. Pemuda berada pada fase kehidupan di mana mereka sedang mencari identitas dan makna, sehingga mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan tidak mudah terikat pada status quo (Arnett, 2000). Hal ini membuat mereka menjadi kelompok yang paling responsif terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sosial, serta paling bersemangat dalam memperjuangkan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan.

Di era digital, peran pemuda sebagai agen perubahan semakin diperkuat oleh akses mereka terhadap teknologi informasi dan media sosial. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi alat yang ampuh bagi pemuda untuk mengorganisir gerakan, menyebarkan pesan, dan memobilisasi massa (Bennett & Segerberg, 2013). Contohnya, gerakan Fridays for Future yang dipelopori oleh Greta Thunberg, seorang aktivis muda asal Swedia, menunjukkan bagaimana pemuda dapat menggunakan media sosial untuk mengangkat isu

global seperti perubahan iklim dan memengaruhi kebijakan di tingkat internasional.

Namun, peran pemuda sebagai agen perubahan tidak hanya terbatas pada gerakan-gerakan besar yang berskala global. Di tingkat lokal, pemuda juga berperan penting dalam memajukan komunitas mereka melalui berbagai inisiatif, seperti program pendidikan, kampanye kesehatan, atau aksi lingkungan. Misalnya, di Indonesia, gerakan pemuda seperti Indonesia Mengajar dan Garda Pangan menunjukkan bagaimana pemuda dapat berkontribusi secara nyata dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nilan & Wibawanto, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemuda juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan. Salah satunya adalah minimnya ruang partisipasi yang inklusif dan representative (Puspitasari, 2021). Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemuda seringkali dianggap sebagai "masa depan" tetapi tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di masa kini (Rachimoellah et al., 2024). Selain itu, pemuda juga rentan terhadap pengaruh negatif seperti polarisasi politik, disinformasi, dan apatisme, yang dapat mengurangi efektivitas mereka dalam mendorong perubahan.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemuda untuk mengembangkan potensi mereka sebagai agen perubahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang memberdayakan, kebijakan yang inklusif, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, pemuda tidak hanya akan menjadi penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan dunia.

KEBUTUHAN AKAN PENDIDIKAN POLITIK DI ERA INFORMASI YANG SERBA CEPAT

Di era informasi yang serba cepat, di mana arus data dan berita mengalir tanpa henti melalui berbagai platform digital, kebutuhan akan pendidikan politik menjadi semakin mendesak. Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak paradoks: di satu sisi, ia memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan partisipasi politik; di sisi lain, ia juga menciptakan tantangan baru seperti disinformasi, hoaks, dan polarisasi yang dapat menggerogoti fondasi demokrasi (McGrew et al., 2017). Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak lagi sekadar menjadi alat untuk memahami sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap manipulasi informasi dan erosi nilai-nilai demokratis.

Salah satu alasan utama mengapa pendidikan politik sangat dibutuhkan di era ini adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau sengaja dipalsukan. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang untuk diskusi dan pertukaran ide, seringkali justru menjadi sarana penyebaran hoaks dan propaganda (Tandoc Jr. et al., 2018). Tanpa pemahaman yang kritis terhadap informasi yang diterima, masyarakat—khususnya pemuda—rentan terjerumus ke dalam keputusan politik yang tidak rasional atau bahkan merugikan kepentingan publik. Pendidikan politik dapat berperan sebagai "vaksin" terhadap disinformasi dengan membekali individu dengan kemampuan literasi media dan berpikir kritis (Kahne & Bowyer, 2017).

Selain itu, pendidikan politik juga penting untuk memastikan partisipasi politik yang bermakna dan inklusif. Di era digital, partisipasi politik tidak lagi terbatas pada pemungutan suara atau keanggotaan partai politik, tetapi juga mencakup aktivitas seperti kampanye online, petisi digital, dan gerakan sosial berbasis media sosial (Bennett & Segerberg, 2012). Namun, partisipasi yang efektif memerlukan pemahaman

yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk menganalisis kebijakan publik dan keputusan politik. Tanpa pendidikan politik yang memadai, partisipasi tersebut berisiko menjadi sekadar aktivitas simbolis yang tidak membawa perubahan nyata.

Pendidikan politik juga berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis terhadap isu-isu global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan hak asasi manusia. Pemuda, sebagai generasi yang akan mewarisi tantangan ini, perlu dibekali dengan pemahaman yang holistik tentang bagaimana kebijakan politik di tingkat lokal, nasional, dan global saling terkait (Westheimer, J., & Kahne, 2004). Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga aktor yang mampu merespons tantangan tersebut dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Namun, tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan politik di era informasi yang serba cepat tidak boleh diabaikan. Salah satunya adalah bagaimana membuat pendidikan politik relevan dan menarik bagi generasi muda yang hidup di dunia digital. Pendekatan konvensional, seperti ceramah satu arah atau pembelajaran berbasis teks, mungkin tidak lagi efektif. Sebaliknya, metode yang interaktif, partisipatif, dan memanfaatkan teknologi—seperti simulasi politik, diskusi online, atau penggunaan media sosial sebagai alat pembelajaran—perlu dikembangkan (Kahne et al., 2016)

Pendidikan politik di era informasi yang serba cepat bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kewajiban moral untuk memastikan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang di tengah gempuran informasi yang tak terbendung. Melalui pendidikan politik yang berkualitas, individu—khususnya pemuda—akan menjadi warga negara yang informan, kritis, dan bertanggung jawab, siap menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana.

HUBUNGAN SIMBIOSIS ANTARA MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK

Hubungan antara media, pemuda, dan pendidikan politik dapat digambarkan sebagai hubungan simbiosis—saling menguntungkan dan saling memperkuat. Ketiga elemen ini tidak hanya saling terkait, tetapi juga saling memengaruhi dalam membentuk kesadaran, perilaku, dan partisipasi politik generasi muda. Media berperan sebagai saluran informasi dan ruang diskusi, pemuda sebagai aktor perubahan yang dinamis, dan pendidikan politik sebagai fondasi untuk membangun pemahaman kritis serta keterampilan partisipasi. Bersama-sama, mereka menciptakan ekosistem yang memungkinkan demokrasi berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Media, sebagai salah satu pilar utama dalam hubungan ini, berfungsi sebagai jembatan antara pemuda dan dunia politik. Di era digital, media tidak hanya menyediakan akses terhadap informasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, terlibat dalam diskusi publik, dan mengorganisir gerakan sosial (Bennett & Segerberg, 2012). Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi alat yang ampuh bagi pemuda untuk menyuarakan aspirasi mereka, memobilisasi dukungan, dan menantang narasi dominan. Namun, media juga memiliki sisi gelap, seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi, yang dapat mengaburkan pemahaman politik pemuda jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang memadai.

Di sinilah peran pendidikan politik menjadi krusial. Pendidikan politik berfungsi sebagai filter yang membantu pemuda menavigasi banjir informasi di media dengan cara yang kritis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik, pemuda tidak hanya belajar tentang sistem pemerintahan dan hak-hak mereka sebagai warga negara, tetapi juga mengembangkan kemampuan literasi media—seperti

membedakan fakta dari opini, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi sumber informasi (Kahne & Bowyer, 2017). Dengan demikian, pendidikan politik memungkinkan pemuda untuk menjadi konsumen media yang cerdas dan produsen konten yang bertanggung jawab.

Pemuda, sebagai pihak ketiga dalam hubungan simbiosis ini, memainkan peran aktif dalam menghidupkan dinamika antara media dan pendidikan politik. Mereka tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga aktor yang mengubah informasi tersebut menjadi aksi nyata. Misalnya, gerakan sosial seperti #BlackLivesMatter dan #FridaysForFuture menunjukkan bagaimana pemuda dapat memanfaatkan media untuk mengangkat isu-isu penting dan mendorong perubahan kebijakan (Tufekci, 2017). Di sisi lain, pemuda juga menjadi subjek yang terus belajar dan berkembang melalui pendidikan politik, yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara lebih efektif.

Hubungan simbiosis ini juga menciptakan lingkaran yang saling memperkuat. Media yang berkualitas dapat meningkatkan efektivitas pendidikan politik dengan menyediakan sumber informasi yang akurat dan berimbang. Pendidikan politik, pada gilirannya, dapat meningkatkan kualitas partisipasi pemuda di media dengan memastikan bahwa mereka terlibat dalam diskusi yang produktif dan berbasis fakta. Pemuda yang terdidik secara politik dan aktif di media kemudian dapat mendorong terciptanya konten yang lebih informatif dan inspiratif, sehingga memperkaya ekosistem media itu sendiri.

Namun, hubungan ini juga menghadapi tantangan. Misalnya, dominasi algoritma di media sosial seringkali menciptakan "gelembung filter" (*filter bubbles*) yang membatasi paparan pemuda terhadap perspektif yang berbeda, sehingga berpotensi memperkuat polarisasi (Rachimoellah et al., 2024).

Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan politik dan teknologi dapat menciptakan kesenjangan partisipasi di antara pemuda dari latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hubungan simbiosis ini inklusif dan adil, dengan memberikan akses yang setara terhadap media, pendidikan, dan kesempatan partisipasi bagi semua pemuda.

Hubungan simbiosis antara media, pemuda, dan pendidikan politik tidak hanya penting untuk membentuk generasi muda yang informan dan kritis, tetapi juga untuk memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif di era informasi yang serba cepat. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan fondasi yang kokoh bagi partisipasi politik yang bermakna dan berkelanjutan.

PERKEMBANGAN MEDIA DI ERA DIGITAL

Perkembangan media di era digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, mengonsumsi informasi, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Transformasi dari media konvensional—seperti surat kabar, radio, dan televisi—ke media digital telah membawa revolusi yang tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga budaya, ekonomi, dan politik. Media konvensional, yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama informasi dan hiburan, kini harus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Surat kabar, yang dulu menjadi primadona dalam menyebarkan berita, kini menghadapi penurunan oplah dan beralih ke platform daring untuk bertahan hidup. Radio dan televisi, yang pernah menjadi pusat perhatian keluarga di ruang tamu, kini harus bersaing dengan layanan streaming seperti Spotify, Netflix, dan YouTube yang menawarkan konten *on-demand* yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Transformasi ini tidak hanya tentang perubahan platform, tetapi juga tentang perubahan cara informasi diproduksi,

disebarkan, dan dikonsumsi. Di era digital, siapa pun bisa menjadi produsen konten. Blog, podcast, dan video YouTube telah memberdayakan individu untuk menciptakan dan menyebarkan informasi tanpa bergantung pada institusi media tradisional. Hal ini telah mendemokratisasi akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti maraknya konten yang tidak terverifikasi dan sulitnya membedakan antara sumber yang kredibel dan yang tidak.

Media sosial telah menjadi jantung dari perkembangan media di era digital. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita mengonsumsi informasi. Media sosial telah membuat informasi menjadi lebih personal, interaktif, dan instan. Kita tidak lagi harus menunggu jam berita malam untuk mendapatkan update terbaru; cukup buka Twitter atau Instagram, dan kita bisa langsung terhubung dengan peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain. Namun, dampak media sosial terhadap pola konsumsi informasi tidak selalu positif. Salah satu efek yang paling menonjol adalah fragmentasi audiens. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan pengguna, menciptakan "gelembung filter" yang membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Hal ini dapat memperkuat polarisasi dan membuat diskusi publik menjadi semakin terkotak-kotak.

Selain itu, media sosial juga telah mempercepat penyebaran disinformasi dan hoaks. Informasi yang viral seringkali didorong oleh emosi dan sensasionalisme, bukan oleh akurasi atau relevansi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, media sosial dipenuhi dengan informasi yang salah tentang obat-obatan dan vaksin, yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Tanpa literasi media yang memadai, pengguna media sosial rentan terjebak dalam pusaran informasi yang menyesatkan.

Di sisi lain, media sosial juga membawa peluang besar. Ia telah menjadi alat yang ampuh untuk mobilisasi sosial dan advokasi. Gerakan seperti #BlackLivesMatter dan #MeToo menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mengangkat isu-isu penting, memobilisasi massa, dan mendorong perubahan kebijakan. Media sosial juga memberikan suara kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan, memungkinkan mereka untuk menyuarakan aspirasi dan menantang narasi dominan.

Perkembangan media di era digital tidak akan berhenti di sini. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *virtual reality* (VR), dan *blockchain* diprediksi akan membawa perubahan lebih besar lagi dalam cara kita mengonsumsi dan berinteraksi dengan informasi. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi konten lebih lanjut, sementara *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam distribusi informasi. Namun, di tengah semua kemajuan ini, tantangan terbesar tetap ada pada bagaimana kita, sebagai masyarakat, dapat memanfaatkan media digital secara bijaksana. Literasi media, pendidikan kritis, dan regulasi yang bertanggung jawab akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa perkembangan media di era digital membawa manfaat, bukan mudarat.

PERAN MEDIA DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN AGENDA SETTING

Media dan politik memiliki hubungan yang erat dan kompleks, di mana media tidak hanya menjadi penyalur informasi, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik, mengarahkan agenda politik, dan bahkan menjadi alat propaganda dan kontrol sosial. Sejak awal kemunculannya, media telah digunakan oleh berbagai pihak—baik pemerintah, partai politik, maupun kelompok

kepentingan—untuk memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, media tidak hanya menjadi cermin realitas politik, tetapi juga aktor aktif yang membentuk realitas tersebut.

Salah satu peran media yang paling kontroversial adalah sebagai alat propaganda dan kontrol sosial. Propaganda, yang seringkali diasosiasikan dengan rezim otoriter, sebenarnya juga digunakan dalam sistem demokrasi, meskipun dengan cara yang lebih halus dan terselubung. Media dapat digunakan untuk menyebarkan narasi tertentu, mempromosikan kebijakan pemerintah, atau bahkan menciptakan musuh bersama untuk mempersatukan masyarakat. Misalnya, selama perang atau konflik politik, media seringkali digunakan untuk membangun dukungan publik dengan menyajikan informasi yang sepihak atau dramatis. Dalam konteks ini, media tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membingkai pesan tersebut sedemikian rupa untuk memengaruhi emosi dan sikap khalayak.

Selain propaganda, media juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara massal, media dapat memengaruhi norma, nilai, dan perilaku masyarakat. Misalnya, melalui pemberitaan yang intensif tentang kasus korupsi atau kejahatan, media dapat menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku dan mendorong perubahan perilaku. Namun, kontrol sosial ini juga dapat disalahgunakan, seperti ketika media digunakan untuk menstigmatisasi kelompok tertentu atau membungkam suara kritis. Dalam beberapa kasus, media bahkan menjadi alat untuk mempertahankan status quo, dengan cara mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting atau menciptakan distraksi melalui konten hiburan yang berlebihan.

Di sisi lain, media juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Opini publik tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses yang melibatkan informasi,

diskusi, dan interpretasi. Media, sebagai sumber informasi utama bagi kebanyakan orang, memiliki kekuatan untuk memengaruhi bagaimana suatu isu dipahami dan direspons oleh publik. Misalnya, melalui pemberitaan yang berulang-ulang tentang isu tertentu, media dapat membuat isu tersebut menjadi prioritas dalam benak publik, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *agenda setting*. Teori *agenda setting*, yang pertama kali diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw (1972), menjelaskan bahwa media tidak selalu berhasil menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tetapi mereka sangat efektif dalam menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu mana yang dianggap penting dan layak mendapat perhatian.

Contoh nyata dari peran media dalam *agenda setting* dapat dilihat dalam pemberitaan tentang perubahan iklim. Meskipun isu ini telah menjadi ancaman serius selama puluhan tahun, baru belakangan ini media mulai memberikan perhatian yang lebih besar, sehingga mendorong kesadaran dan aksi publik yang lebih luas. Di sisi lain, media juga dapat mengabaikan isu-isu tertentu, baik karena tekanan politik, kepentingan bisnis, atau kurangnya minat publik. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya memengaruhi apa yang kita pikirkan, tetapi juga apa yang tidak kita pikirkan.

Namun, kekuatan media dalam membentuk opini publik dan agenda setting tidak terlepas dari tantangan. Di era digital, di mana informasi dapat diproduksi dan disebarluaskan oleh siapa saja, media tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya penentu agenda. Media sosial, blog, dan platform digital lainnya telah menciptakan ruang alternatif di mana opini publik dapat terbentuk tanpa bergantung pada media arus utama. Hal ini telah mendemokratisasi proses pembentukan opini, tetapi juga menciptakan tantangan baru, seperti maraknya disinformasi dan polarisasi.

Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling memengaruhi dan saling membentuk. Media memiliki kekuatan untuk memengaruhi politik melalui propaganda, kontrol sosial, dan agenda setting, sementara politik juga memengaruhi media melalui regulasi, tekanan, atau bahkan kooptasi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa media tetap independen dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dan ruang publik yang sehat. Tanpa media yang kritis dan berintegritas, demokrasi akan kehilangan salah satu pilar utamanya, dan masyarakat akan rentan terhadap manipulasi dan kontrol.

PEMUDA SEBAGAI AKTOR PERUBAHAN

Pemuda, dengan semangat yang menggebu dan pikiran yang kritis, selalu menjadi garda terdepan dalam gelombang perubahan sosial dan politik. Mereka bukan sekadar generasi penerus, melainkan kekuatan aktif yang terus mendobrak batas, menantang *status quo*, dan merajut visi baru untuk masa depan. Dalam sejarah, pemuda telah membuktikan diri sebagai katalisator perubahan—dari gerakan kemerdekaan yang mengusir kolonialisme hingga aksi iklim global yang dipimpin oleh sosok seperti Greta Thunberg. Dinamisme mereka tercermin dari keberanian mengambil risiko, kreativitas dalam merancang solusi, dan ketangguhan menghadapi ketidakadilan. Karakteristik ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari fase kehidupan di mana mereka sedang mencari identitas, menggali makna, dan merespons kegelisahan akan dunia yang penuh paradoks.

Partisipasi politik pemuda tidak lagi terkurung dalam kotak konvensional seperti pemungutan suara atau keanggotaan partai. Mereka telah menciptakan ruang gerak yang lebih luas dan cair. Demonstrasi jalanan, misalnya, menjadi medium untuk menyuarakan tuntutan konkret, seperti yang terlihat dalam

gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia atau protes mahasiswa di Hong Kong. Media sosial, dengan daya jangkauan globalnya, menjadi senjata ampuh untuk memobilisasi massa, seperti tagar #BlackLivesMatter yang mengguncang kesadaran global tentang rasialisme. Bahkan di tingkat akar rumput, pemuda menginisiasi program pendidikan, bank sampah, atau dapur komunitas—aksi-aksi kecil yang beresonansi besar. Namun, partisipasi ini tidak lepas dari faktor pendorong. Akses terhadap pendidikan politik, misalnya, menjadi kunci: pemuda yang memahami hak dan kewajiban konstitusional cenderung lebih vokal. Lingkungan sosial juga berperan; dukungan keluarga atau komunitas bisa menjadi angin bagi sayap aktivisme mereka.

Namun, jalan menuju perubahan tidaklah mulus. Pemuda hari ini berhadapan dengan tantangan yang kompleks, terutama di era di mana media digital menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, media sosial memberdayakan mereka untuk bersuara, tetapi di sisi lain, algoritma yang membentuk "gelembung filter" justru memperdalam polarisasi. Pemuda terperangkap dalam ruang gema (*echo chambers*) di mana mereka hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, memicu konflik antarkelompok dan mengikis ruang dialog. Belum lagi banjir disinformasi yang meracuni nalar kritis, seperti hoaks vaksin atau narasi konspirasi yang viral selama pandemi. Tantangan lain adalah minimnya ruang partisipasi yang inklusif. Di banyak negara, pemuda diundang ke meja diskusi hanya sebagai simbol—suara mereka didengar, tetapi jarang dipertimbangkan. Kebijakan politik seringkali dibuat tanpa melibatkan perspektif generasi yang justru akan merasakan dampaknya paling lama.

Di balik tantangan ini, potensi pemuda tetap tak terbantahkan. Mereka adalah generasi yang lahir dan besar di tengah derasnya arus informasi, membuat mereka mahir

memanfaatkan teknologi untuk advokasi. Gerakan seperti #FridaysForFuture menunjukkan bagaimana pemuda bisa mengubah kesadaran global tentang krisis iklim hanya dengan kombinasi *tweet*, unggahan Instagram, dan aksi langsung. Di Indonesia, inisiatif seperti Garda Pangan atau Kawal Pemilu membuktikan bahwa pemuda bisa menjadi penjaga demokrasi dan keadilan sosial. Kunci untuk mengoptimalkan peran ini terletak pada pemberdayaan sistematis: pendidikan politik yang aplikatif, akses ke platform partisipasi yang nyata, serta dukungan struktural dari pemerintah dan masyarakat sipil.

Pemuda bukan hanya masa depan—mereka adalah masa kini yang sedang bertindak. Dengan semangat yang tak kenal lelah dan nalar kritis yang terasah, mereka mampu mengubah gelombang ketidakpastian menjadi energi progresif. Namun, tanpa ruang yang inklusif, pendidikan yang memadai, dan perlindungan dari racun disinformasi, potensi besar ini bisa menguap sia-sia. Masyarakat harus memastikan bahwa pemuda tidak hanya dielu-elukan sebagai pahlawan simbolis, tetapi benar-benar diberi kekuasaan untuk membentuk dunia yang mereka warisi.

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI FONDASI KESADARAN KRITIS

Pendidikan politik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kesadaran kritis warga negara, terutama di tengah kompleksitas tantangan global dan dinamika demokrasi yang terus berkembang. Secara konseptual, pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik (Westheimer & Kahne, 2004). Tujuannya tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang sistem pemerintahan atau mekanisme politik, tetapi juga

mencakup pengembangan kemampuan analitis, kritis, dan reflektif dalam merespons isu-isu publik. Dengan demikian, pendidikan politik berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik, antara pengetahuan dan aksi, serta antara individu dan masyarakat.

Peran pendidikan politik dalam membentuk warga negara yang aktif dan kritis tidak dapat dianggap remeh. Dalam konteks demokrasi, partisipasi publik yang informan dan rasional menjadi prasyarat bagi berfungsinya sistem politik secara efektif. Pendidikan politik memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, menganalisis kebijakan publik, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif (Kahne & Bowyer, 2017). Lebih dari itu, pendidikan politik juga membekali individu dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menolak praktik-praktik manipulatif, seperti propaganda, disinformasi, atau polarisasi, yang dapat menggerogoti fondasi demokrasi.

Media, sebagai salah satu saluran utama penyebaran informasi, memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan politik. Platform digital seperti YouTube, podcast, dan media sosial memungkinkan pendidikan politik menjangkau khalayak yang lebih luas, termasuk kelompok yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Media juga menawarkan format pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti diskusi langsung, tanya jawab dengan ahli, atau simulasi politik, yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan publik. Misalnya, kanal YouTube yang membahas isu-isu politik secara mendalam atau podcast yang mengundang pakar untuk membedah kebijakan publik dapat menjadi sumber pembelajaran yang efektif dan menarik.

Namun, penggunaan media sebagai alat pendidikan politik tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah utama adalah

maraknya hoaks dan disinformasi yang meracuni ruang publik. Media sosial, dengan algoritma yang cenderung memprioritaskan konten sensasional, seringkali menjadi sarana penyebaran informasi yang bias atau menyesatkan (Tandoc, Lim, & Ling, 2018). Tantangan lain adalah bias informasi, di mana media tertentu hanya menyajikan perspektif sepihak, memperkuat polarisasi dan mengikis nalar kritis. Untuk mengatasi ini, literasi media menjadi komponen penting dalam pendidikan politik. Masyarakat perlu diajarkan cara memverifikasi informasi, mengenali bias, dan mengevaluasi sumber dengan kritis.

Di samping peran media, integrasi pendidikan politik dalam sistem pendidikan formal tetap menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Pendidikan formal memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran politik generasi muda sejak dini. Kurikulum pendidikan politik yang komprehensif tidak hanya mengajarkan teori politik, tetapi juga melibatkan siswa dalam praktik-praktik partisipatif, seperti simulasi pemilu, debat kebijakan, atau proyek komunitas. Contohnya, di Finlandia, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aplikatif, di mana siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep politik, tetapi juga terlibat langsung dalam proses demokrasi (Banks, 2008).

Beberapa negara telah mengembangkan praktik pendidikan politik yang efektif dan dapat menjadi referensi. Di Amerika Serikat, program "*We the People*" mengajarkan siswa tentang konstitusi melalui kompetisi debat dan esai, memadukan pengetahuan teoretis dengan keterampilan berpikir kritis. Sementara itu, di Australia, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk mempromosikan partisipasi aktif siswa dalam komunitas lokal, seperti melalui proyek sukarela atau kampanye sosial (Print, 2007). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang efektif tidak hanya tentang transfer

pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan keterampilan partisipatif.

Pentingnya pendidikan politik dalam sistem pendidikan formal juga terlihat dari dampaknya yang jangka panjang. Pemuda yang terpapar pendidikan politik sejak dini cenderung lebih aktif dalam partisipasi politik, baik melalui pemungutan suara, gerakan sosial, atau keterlibatan dalam partai politik. Mereka juga lebih mampu menghadapi tantangan seperti disinformasi atau polarisasi, karena telah dibekali dengan alat-alat analitis yang diperlukan. Namun, untuk mencapai hal ini, kurikulum pendidikan politik harus dirancang dengan hati-hati—tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menciptakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, berdebat, dan bereksperimen dengan ide-ide politik.

Secara keseluruhan, pendidikan politik merupakan fondasi yang esensial bagi pembentukan warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks era digital yang penuh tantangan, pendidikan politik tidak hanya menjadi alat untuk memahami dunia, tetapi juga senjata untuk melawan disinformasi, polarisasi, dan apatisisme. Dengan memadukan pendekatan formal dan non-formal, serta memanfaatkan potensi media secara bijaksana, pendidikan politik dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

SINERGI MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK

Di tengah arus deras informasi dan dinamika politik yang semakin kompleks, sinergi antara media, pemuda, dan pendidikan politik menjadi fondasi penting bagi demokratisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan ekosistem yang memungkinkan partisipasi politik yang lebih bermakna dan

transformatif. Media, dengan jangkauan dan pengaruhnya yang luas, menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi dan memfasilitasi diskusi publik. Pemuda, dengan energi dan idealisme mereka, menjadi aktor perubahan yang dinamis dan kritis. Sementara itu, pendidikan politik berperan sebagai fondasi yang membekali pemuda dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk terlibat dalam proses demokrasi secara bertanggung jawab. Bersama-sama, mereka membentuk lingkaran yang saling menguatkan, di mana media memberdayakan pemuda, pemuda memperkaya ruang publik, dan pendidikan politik memastikan bahwa partisipasi tersebut didasarkan pada kesadaran kritis dan pemahaman yang mendalam.

Media memiliki potensi besar untuk memberdayakan pemuda, terutama di era digital di mana informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Platform seperti YouTube, podcast, dan media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan aspirasi mereka, terlibat dalam diskusi, dan mengorganisir gerakan sosial. Misalnya, gerakan #FridaysForFuture yang dipelopori oleh Greta Thunberg menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi massa dan mendorong perubahan kebijakan global. Namun, akses terhadap informasi saja tidak cukup. Di sinilah pendidikan politik memainkan peran krusial. Pendidikan politik membekali pemuda dengan kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga produsen konten yang bertanggung jawab dan partisipan politik yang aktif.

Kolaborasi antara media, pemuda, dan lembaga pendidikan telah melahirkan berbagai inisiatif yang inspiratif. Di Indonesia, misalnya, gerakan Kawal Pemilu melibatkan pemuda dalam

memantau proses pemilu secara independen, dengan dukungan media digital untuk menyebarkan temuan mereka. Di Amerika Serikat, program "*News Literacy Project*" bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengajarkan siswa cara memverifikasi informasi dan melawan disinformasi. Sementara itu, di Eropa, platform seperti "*European Youth Portal*" menyediakan sumber daya pendidikan politik dan media bagi pemuda untuk terlibat dalam isu-isu Uni Eropa. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat menciptakan ruang bagi pemuda untuk belajar, berpartisipasi, dan berkontribusi pada demokratisasi.

Namun, sinergi ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi disinformasi dan polarisasi politik yang semakin menguat di era digital. Media sosial, dengan algoritma yang cenderung memprioritaskan konten sensasional, seringkali menjadi sarana penyebaran hoaks dan narasi yang memecah belah. Pemuda, sebagai pengguna aktif media sosial, rentan terpapar oleh informasi yang bias dan provokatif. Untuk mengatasi ini, pendidikan politik perlu menekankan literasi media sebagai komponen inti, mengajarkan pemuda cara memverifikasi informasi, mengenali bias, dan mengevaluasi sumber dengan kritis. Selain itu, media juga harus bertanggung jawab dalam menyajikan konten yang berimbang dan faktual, sambil menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif dan inklusif.

Di sisi lain, teknologi digital juga membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda. Platform seperti Change.org memungkinkan pemuda untuk memulai petisi dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Media sosial juga menjadi alat yang ampuh untuk memobilisasi massa, seperti yang terlihat dalam gerakan #BlackLivesMatter atau #MeToo. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dapat digunakan untuk memetakan isu-isu yang relevan bagi pemuda dan

merancang kebijakan yang responsif. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk mengumpulkan masukan dari pemuda tentang kebijakan publik, sementara lembaga pendidikan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kurikulum pendidikan politik yang interaktif dan menarik.

Namun, pemanfaatan teknologi ini harus diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai. Pemuda perlu dibekali dengan pemahaman tentang etika digital, privasi data, dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi. Tanpa fondasi ini, partisipasi politik pemuda berisiko menjadi sekadar aktivitas simbolis yang tidak membawa perubahan nyata. Pendidikan politik, dalam hal ini, berperan sebagai jembatan yang menghubungkan potensi teknologi dengan kebutuhan demokrasi, memastikan bahwa partisipasi pemuda didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan kesadaran kritis.

Sinergi antara media, pemuda, dan pendidikan politik bukan hanya tentang memberdayakan individu, tetapi juga tentang menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan demokratis. Media yang berkualitas dapat meningkatkan efektivitas pendidikan politik dengan menyediakan sumber informasi yang akurat dan berimbang. Pendidikan politik, pada gilirannya, dapat meningkatkan kualitas partisipasi pemuda di media dengan memastikan bahwa mereka terlibat dalam diskusi yang produktif dan berbasis fakta. Pemuda yang terdidik secara politik dan aktif di media kemudian dapat mendorong terciptanya konten yang lebih informatif dan inspiratif, sehingga memperkaya ekosistem media itu sendiri.

Dalam konteks ini, sinergi antara media, pemuda, dan pendidikan politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan demokrasi di abad ke-21. Dengan memadukan kekuatan media, energi pemuda, dan fondasi pendidikan politik, kita dapat menciptakan masa depan demokrasi yang lebih inklusif,

berkelanjutan, dan penuh harapan. Namun, ini hanya mungkin terjadi jika kita mampu mengatasi tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan ketidaksetaraan akses, sambil memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Dengan demikian, sinergi ini bukan hanya tentang membangun demokrasi hari ini, tetapi juga tentang merawatnya untuk generasi mendatang.

KESIMPULAN

Memahami interaksi antara media, pemuda, dan pendidikan politik adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan ekosistem yang memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif, informan, dan berkelanjutan. Media berperan sebagai saluran informasi dan ruang diskusi, pemuda sebagai aktor perubahan yang dinamis, dan pendidikan politik sebagai fondasi untuk membangun kesadaran kritis serta keterampilan partisipasi. Bersama-sama, mereka membentuk lingkaran yang saling menguatkan, di mana media memberdayakan pemuda, pemuda memperkaya ruang publik, dan pendidikan politik memastikan bahwa partisipasi tersebut didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan bertanggung jawab.

Implikasi dari pemahaman ini sangat luas, baik bagi pembaca maupun peneliti. Bagi pembaca, kesadaran akan pentingnya sinergi antara media, pemuda, dan pendidikan politik dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan kritis dalam kehidupan demokrasi. Bagi peneliti, topik ini membuka ruang eksplorasi yang kaya, mulai dari studi tentang efektivitas program pendidikan politik berbasis media, analisis peran pemuda dalam gerakan sosial digital, hingga investigasi tentang dampak teknologi terhadap partisipasi politik generasi muda. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi

strategi yang paling efektif dalam memanfaatkan media dan pendidikan politik untuk memberdayakan pemuda, serta mengatasi tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan ketidaksetaraan akses.

Pada akhirnya, ajakan untuk memanfaatkan media dan pendidikan politik sebagai alat membangun masyarakat yang lebih demokratis adalah seruan yang mendesak. Media harus digunakan secara bijaksana, tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk dialog dan deliberasi yang konstruktif. Pendidikan politik harus diintegrasikan secara lebih luas, baik dalam kurikulum formal maupun melalui inisiatif nonformal, untuk memastikan bahwa setiap individu—khususnya pemuda—memiliki kesadaran kritis dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan memadukan kekuatan media, energi pemuda, dan fondasi pendidikan politik, kita dapat menciptakan masa depan demokrasi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan penuh harapan.

Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkembang. Dan dalam proses ini, media, pemuda, dan pendidikan politik adalah tiga pilar yang tidak bisa diabaikan. Mari kita bersama-sama memanfaatkan potensi mereka untuk membangun masyarakat yang lebih adil, kritis, dan demokratis—sebuah masyarakat di mana setiap suara didengar, setiap hak dihargai, dan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnett, J. J. (2000). *Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties*. *American Psychologist*, 55(5), 469.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). *The Logic Of Connective Action*. *Information, Communication & Society*,

- 15(5), 739–768.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press.
- Castells, M. (2013). *Communication power*. Oxford University Press.
- Checkoway, B. (2011). *What is youth participation?* Children and Youth Services Review, 33(2), 340–345.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). *Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation*. American Educational Research Journal, 54(1), 3–34.
- Kahne, J., Hodgin, E., & Eidman-Aadahl, E. (2016). *Redesigning civic education for the digital age: Participatory politics and the pursuit of democratic engagement*. Theory & Research in Social Education, 44(1), 1–35.
- Lim, M. (2017). *Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*. Critical Asian Studies, 49(3), 411–427.
- McGrew, S., Ortega, T., Breakstone, J., & Wineburg, S. (2017). *The Challenge That's Bigger than Fake News: Civic Reasoning in a Social Media Environment*. American Educator, 41(3), 4.
- McQuail, D. (2020). *McQuail's mass communication theory (7th ed.)*. Sage Publications.
- Nilan, P., & Wibawanto, G. R. (2024). *Religion and youth activism for viability in Indonesia*. Journal of Youth Studies, 1–17.
- Puspitasari, M. M. (2021). *The issue of entrepreneurship as a political gimmick or sustainability? (A study on 2019 presidential election campaign)*. IOP Conference Series:

- Earth and Environmental Science, 716(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012099>
- Rachimoellah, M., Lubis, P. H., & Utimadini, N. J. (2024). *Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media's Impact on Political Development*. Journal Of Middle East and Islamic Studies, 11(3), 2.
- Tandoc Jr., E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). *Defining "Fake News."* *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.
<https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Tufekci, Z. (2017). *In Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*.
<https://doi.org/10.5325/bustan.11.1.0077>
- Van Dijck, J. (2004). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). *What kind of citizen? The politics of educating for democracy*. American Educational Research Journal, 41(2), 237–269.

BAB 2

EVOLUSI MEDIA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK

Susi, S.Pd., M.Pd.
Universitas Pamulang
E-mail: dosen02865@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan media menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi arah pendidikan politik di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor dalam membentuk opini publik, memediasi diskursus politik, dan menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Seiring bergesernya pola komunikasi dari media tradisional menuju media digital, masyarakat mengalami transformasi dalam cara menerima dan merespons informasi politik. Dalam konteks ini, media bukan hanya mencerminkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan budaya komunikasi dan struktur kekuasaan yang menyertainya. Media telah menjadi kekuatan sosial yang menentukan arah pendidikan politik, baik secara formal maupun informal, dengan intensitas dan jangkauan yang semakin luas seiring perkembangan zaman (Nofianto et al., 2023).

Pendidikan politik melalui media pada awalnya terpusat pada institusi-institusi formal, seperti sekolah, partai politik, dan lembaga negara, yang mengandalkan media cetak sebagai saluran utama. Namun kini, melalui teknologi digital, setiap individu memiliki potensi menjadi aktor pendidikan politik yang aktif. Media sosial memungkinkan penyebaran narasi politik secara cepat dan lintas batas geografis, memberi ruang bagi

munculnya beragam perspektif dan opini yang tidak selalu tersedia dalam media arus utama. Perubahan ini membuat pendidikan politik semakin desentralistik dan partisipatif. Siapa pun yang memiliki akses internet dapat terlibat dalam perbincangan politik, dari aktivis hingga pelajar, dari akademisi hingga ibu rumah tangga. Media digital meruntuhkan sekat antara penyampai dan penerima informasi, menjadikan pendidikan politik sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang (Zonyfar et al., 2022).

Transformasi digital yang begitu cepat juga mengubah sistem kerja media itu sendiri. Media tidak lagi terbatas pada surat kabar, radio, dan televisi, tetapi berkembang menjadi berbagai platform digital yang saling terintegrasi, seperti portal berita daring, podcast, vlog politik, hingga siaran langsung di media sosial. Kecepatan informasi dalam dunia digital memengaruhi cara masyarakat memahami politik; peristiwa politik yang sebelumnya hanya diketahui melalui media massa kini bisa dipantau langsung melalui siaran *real-time* di ponsel pribadi. Namun, keterbukaan ini tidak selalu disertai dengan kedalaman pemahaman. Banyak warga yang terjebak pada informasi dangkal, sensasional, atau bahkan menyesatkan karena kurangnya kemampuan memilah dan memahami konteks dari informasi tersebut (Polizzi, 2019).

Dalam masyarakat demokratis, media idealnya berfungsi sebagai ruang publik, tempat warga berdiskusi dan membentuk pendapat secara rasional. Konsep ini, yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, menekankan pentingnya media dalam mendorong terbentuknya diskursus publik yang kritis dan terbuka (Habermas, 2010). Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa ruang publik digital terfragmentasi, dipenuhi oleh algoritma yang memperkuat polarisasi, dan memisahkan individu ke dalam ruang gema yang sempit. Akibatnya, alih-alih menjadi tempat belajar politik yang

konstruktif, media digital bisa berubah menjadi arena konflik dan perpecahan, apalagi bila dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit (Yilmaz et al., 2024).

Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa evolusi media membawa peluang besar dalam memperluas akses pendidikan politik. Kalangan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan karena keterbatasan geografis, ekonomi, atau pendidikan kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi politik. Banyak komunitas di daerah terpencil mulai aktif dalam diskusi kebijakan publik setelah mendapat pelatihan literasi digital. Program-program pendidikan politik berbasis komunitas yang memanfaatkan media sosial juga bermunculan dan menjangkau generasi muda yang selama ini cenderung apatis terhadap politik. Media dengan demikian menjadi alat emansipatoris, memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini tidak terdengar (Arniti, 2020).

Namun, perlu dicatat bahwa ketersediaan informasi yang melimpah tidak serta merta meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Banyak warga yang terpapar informasi politik hanya sebatas mengikuti tren, tanpa pendalaman terhadap substansi isu. Dalam beberapa kasus, media bahkan menjadi alat mobilisasi politik yang manipulatif, di mana *framing* terhadap suatu isu bisa diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendidikan politik melalui media harus dibarengi dengan penguatan literasi media, agar masyarakat dapat membaca berita secara kritis, mengenali bias, serta mampu membedakan antara fakta dan opini (Dewi & Elfiandri, 2024).

Literasi media menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Literasi ini bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap cara kerja media, motivasi ekonomi-politik di balik produksi konten, serta implikasi sosial

dari informasi yang dikonsumsi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama dalam membangun ekosistem literasi media yang merata dan berkelanjutan. Tanpa kemampuan ini, masyarakat akan mudah terprovokasi, mudah percaya hoaks, dan akhirnya bersikap apatis terhadap politik karena kehilangan kepercayaan terhadap sistem informasi yang mereka konsumsi sehari-hari (Ozel, 2025).

Di Indonesia, dinamika ini tampak semakin mencolok menjelang pemilu atau momentum politik besar lainnya. Media sosial berubah menjadi arena pertempuran narasi antarpendingukung politik, sementara kampanye digital kerap menggunakan taktik yang manipulatif demi mendapatkan simpati publik. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan politik melalui media harus diarahkan untuk menciptakan pemilih yang cerdas, bukan sekadar konsumen janji-janji politik. Strategi pendidikan politik perlu menyasar pemilih muda, dengan pendekatan yang sesuai karakteristik *digital native*: visual, singkat, interaktif, dan berbasis data. Kampanye edukatif melalui video singkat, infografik, dan diskusi daring terbukti lebih efektif dibandingkan dengan ceramah konvensional (Farid, 2023).

Meskipun tantangan yang dihadapi tidak ringan, peran media dalam pendidikan politik tetap penting dan strategis. Untuk itu, media perlu dikelola secara bijak dan bertanggung jawab, baik oleh jurnalis, pembuat kebijakan, maupun masyarakat sebagai pengguna. Ruang media harus dilindungi dari intervensi politik yang otoriter, namun juga dijaga dari penyalahgunaan kebebasan yang merusak tatanan demokrasi. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip yang harus dijaga dalam ekosistem media digital. Pendidikan politik yang sehat hanya mungkin

terwujud bila media berfungsi sebagai ruang dialog, bukan sekadar ruang propaganda (Krishnaiah, 2024).

Dengan demikian, memahami evolusi media sebagai sarana pendidikan politik bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga krusial bagi masa depan demokrasi itu sendiri. Di era informasi yang serba cepat ini, masyarakat dituntut untuk menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan selektif. Media tidak lagi bisa dipandang sebagai alat pasif, melainkan sebagai aktor dalam sistem politik yang berpengaruh langsung terhadap kualitas warga negara. Jika dimanfaatkan dengan benar, media bisa menjadi instrumen untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, memperluas partisipasi politik, dan membangun warga negara yang berdaulat secara pengetahuan (Tarsidi et al., 2023).

SEJARAH MEDIA DALAM PENDIDIKAN POLITIK

Perkembangan media dan pendidikan politik saling terkait erat dalam perjalanan sejarah umat manusia. Media, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi alat utama dalam menyampaikan nilai-nilai politik, membentuk opini, dan menciptakan partisipasi publik. Seiring waktu, evolusi teknologi komunikasi telah mempengaruhi cara individu memahami kekuasaan, negara, dan kewarganegaraan. Dari komunikasi lisan di ruang-ruang komunitas tradisional hingga penyebaran informasi digital yang bersifat global dan interaktif, sejarah pendidikan politik melalui media mencerminkan transformasi besar dalam budaya politik masyarakat. Pendidikan politik yang dahulu bersifat elit dan terbatas kini mengalami desentralisasi berkat keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh media modern (Obradović, 2023).

Di Indonesia, pemanfaatan media dalam pendidikan telah berlangsung sejak masa kolonial, di mana surat kabar dan siaran radio digunakan untuk menyampaikan narasi nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Setelah kemerdekaan, media

menjadi bagian dari strategi pembangunan karakter warga negara. Lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI digunakan untuk mendidik masyarakat tentang demokrasi, hak dan kewajiban politik, serta agenda kebangsaan. Seiring perkembangan teknologi, media terus berevolusi dari media cetak, elektronik, hingga digital. Setiap fase perkembangan media membawa serta perubahan cara komunikasi politik disampaikan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat (Darmanto et al., 2022). Di tengah arus transformasi ini, peran media sebagai agen pendidikan politik semakin nyata—tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai ruang produksi makna politik yang memengaruhi kesadaran kolektif.

Masa Tradisional: Komunikasi Lisan dan Tulisan

Pada masa awal peradaban, pendidikan politik berlangsung melalui komunikasi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat, pidato kepala suku, petuah para tetua adat, serta ritual sosial merupakan sarana utama dalam menyampaikan nilai-nilai politik seperti kepemimpinan, keadilan, musyawarah, dan kewajiban kolektif. Dalam masyarakat agraris dan komunitas adat, pendidikan politik tidak berlangsung melalui institusi formal, melainkan melalui pengalaman kolektif dan praktik hidup bersama. Ruang-ruang seperti balai desa atau tempat ibadah menjadi titik pertemuan wacana yang bersifat politis. Proses ini menekankan pentingnya relasi sosial dan kepercayaan, di mana informasi politik tidak hanya dipahami sebagai data, tetapi sebagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat (Fadrullah & Syam, 2024).

Bersamaan dengan munculnya kemampuan menulis, bentuk pendidikan politik mengalami transformasi besar. Tulisan menjadi media yang memperkuat daya simpan informasi dan memungkinkan penyebaran ide lintas wilayah serta lintas generasi. Pada masa Yunani dan Romawi kuno, naskah-naskah

pada batu, papirus, atau lembaran logam berisi hukum, filosofi, serta ajaran politik digunakan untuk mengedukasi warga negara, khususnya kaum elite. Tradisi retorika berkembang menjadi keterampilan politik utama, di mana kemampuan berbicara dan menulis menjadi penanda kecakapan publik. Keberadaan polis di Yunani sebagai komunitas politik mandiri merupakan titik mula terbentuknya ruang publik yang mengedepankan diskusi rasional dan keterlibatan warga dalam urusan kenegaraan. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan pembentukan warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya (Shokri, 2015).

Era Media Cetak: Revolusi Informasi Melalui Media Massa

Era media cetak menandai revolusi besar dalam penyebaran informasi politik yang lebih sistematis, terstruktur, dan masif. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 membuka jalan bagi produksi informasi dalam skala besar, sekaligus mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan politik (Eisenstein, 2013). Surat kabar, pamflet, dan buku politik menjadi sarana penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak warga negara, prinsip kebebasan, dan pentingnya partisipasi dalam pemerintahan (Briggs & Burke, 2010). Dalam sejarah Eropa, media cetak memainkan peran penting dalam mendukung gerakan reformasi, revolusi Prancis, dan penyebaran gagasan Pencerahan yang melandasi semangat demokrasi modern. Penyebaran ide-ide politik tidak lagi bergantung pada aristokrasi atau gereja, tetapi juga dapat diakses oleh kelas menengah dan intelektual perkotaan, yang kemudian menjadi motor penggerak perubahan politik (Habermas, 2015).

Di Indonesia, perkembangan media cetak memiliki sejarah yang tidak kalah penting dalam membentuk kesadaran politik dan identitas nasional. Surat kabar seperti Medan Prijaji yang terbit pada awal abad ke-20 menjadi pelopor penyebaran

kesadaran nasional dan kritik terhadap kolonialisme, terutama melalui bahasa cetak yang menyatukan pembaca lintas etnis dan wilayah (Anderson, 2006). Setelah kemerdekaan, media seperti Kompas, Tempo, dan Sinar Harapan menjadi referensi penting dalam membentuk wacana publik tentang arah pembangunan nasional dan dinamika demokrasi (Daniarsa & Ningsih, 2023). Media cetak tidak hanya menyampaikan fakta politik, tetapi juga membongkai isu-isu sosial melalui sudut pandang tertentu, yang pada akhirnya mempengaruhi opini masyarakat. Bahkan dalam masa-masa represi politik, seperti pada era Orde Baru, media cetak tetap menjadi medium perlawanan simbolik yang memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kontrol terhadap kekuasaan negara (Heryanto, 2009). Dalam hal ini, pendidikan politik melalui media cetak membentuk tradisi membaca yang reflektif, memperkenalkan diskursus publik berbasis teks, dan menciptakan ruang berpikir yang lebih luas dibanding media lisan sebelumnya.

Era Penyiaran: Radio dan Televisi sebagai Media Pendidikan Politik

Memasuki abad ke-20, perkembangan teknologi penyiaran membawa media ke dalam bentuk yang lebih cepat dan merakyat melalui radio dan televisi. Radio menjadi media utama dalam menyampaikan pesan-pesan politik secara langsung dan luas, terutama pada masa perang dan perjuangan kemerdekaan. Di Indonesia, radio memainkan peran penting sebagai alat perjuangan pada masa kolonial dan awal kemerdekaan. Siaran radio seperti Radio Republik Indonesia (RRI), yang didirikan pada tahun 1945, menjadi medium strategis untuk membangkitkan semangat nasionalisme, menyampaikan pidato tokoh-tokoh perjuangan, serta menyebarluaskan informasi mengenai agenda kemerdekaan dan pembentukan negara (Kitley, 2014). Keberadaan radio menjadi simbol kedaulatan

informasi dan alat mobilisasi politik rakyat di masa transisi kekuasaan kolonial (Sen & Hill, 2007). Sifat audio dari radio memungkinkan pesan politik menjangkau masyarakat luas, termasuk mereka yang buta huruf atau tinggal di daerah terpencil, sehingga memperluas basis partisipasi politik secara inklusif (McLuhan & Gordon, 2003).

Televisi kemudian memperkuat fungsi pendidikan politik melalui visualisasi informasi yang lebih dramatis dan persuasif. Sejak berdirinya TVRI sebagai lembaga penyiaran nasional, pemerintah menggunakan televisi sebagai instrumen untuk menyampaikan ideologi negara, program pembangunan, serta membentuk persepsi publik tentang kehidupan politik nasional. Program-program seperti pidato kenegaraan, debat politik, hingga dokumenter sejarah kebangsaan disusun untuk meningkatkan pemahaman warga tentang sistem politik dan peran mereka sebagai warga negara (Nafi & Alamsyah, 2023). Namun, di samping manfaatnya, media penyiaran juga memiliki sisi gelap. Berita yang tidak netral atau program yang bersifat indoktrinatif dapat menghambat terciptanya diskursus politik yang sehat. Selain itu, dalam era kontemporer, siaran televisi juga berisiko menyebarkan berita hoaks atau *framing* politik yang tajam jika tidak diimbangi oleh prinsip jurnalisme yang profesional (Le, 2024).

Era Digital: Internet dan Media Sosial sebagai Platform Pendidikan Politik

Era digital menandai fase baru dalam evolusi media yang membawa dampak besar terhadap pendidikan politik. Internet memungkinkan arus informasi politik bergerak secara cepat, melintasi batas wilayah, dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. *Website* atau laman berita, blog, hingga kanal edukasi berbasis video seperti YouTube menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam memahami isu-isu politik kontemporer.

Karakteristik internet yang interaktif membuat komunikasi politik bersifat dua arah; masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi politik. Hal ini menciptakan ruang publik baru yang lebih cair dan partisipatif, di mana wacana politik bisa dibentuk dari bawah, bukan hanya dari elite atau institusi formal. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari maraknya diskusi politik di media sosial yang melibatkan akademisi, aktivis, politisi, bahkan masyarakat biasa dalam satu ruang wacana yang setara (Latief & Tripuspita, 2024).

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah mengubah pola komunikasi politik secara radikal. Kampanye politik digital, debat antarpending, serta edukasi publik tentang hak politik kini dilakukan dalam bentuk konten visual, infografis, dan video pendek. Pola ini sangat efektif menjangkau generasi muda yang cenderung visual dan cepat dalam menyerap informasi. Namun demikian, era digital juga membawa tantangan serius, seperti penyebaran disinformasi, penggunaan buzzer politik, hingga polarisasi opini publik yang tajam. Algoritma media sosial yang hanya menyajikan konten serupa dengan preferensi pengguna juga berpotensi menciptakan “ruang gema” (*echo chamber*), yang justru membatasi keberagaman pandangan. Oleh karena itu, meskipun internet memberi peluang besar bagi pendidikan politik yang lebih terbuka, perlu diiringi dengan kecakapan digital agar masyarakat dapat mengakses informasi secara bijak dan kritis (Ariestandy et al., 2024).

Masa Depan: *Artificial Intelligence* dan Interaktivitas dalam Pendidikan Politik

Dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), masa depan pendidikan politik memasuki babak baru yang lebih interaktif, adaptif, dan berbasis data. AI

tidak hanya memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, tetapi juga mampu mempersonalisasi materi pendidikan politik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu. Misalnya, *chatbot* yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan seputar hak politik, konstitusi, atau sistem pemerintahan dapat mempercepat proses pembelajaran warga negara. Bahkan, analisis big data kini digunakan untuk memetakan tren opini publik secara *real time*, yang bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu atau lembaga pendidikan untuk merancang strategi komunikasi politik yang lebih efektif. Dalam konteks ini, AI berpotensi menjadi fasilitator demokrasi digital yang lebih cerdas dan responsif terhadap dinamika masyarakat (Susi et al., 2025).

Lebih dari itu, teknologi *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR) mulai dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman pendidikan politik yang imersif dan kontekstual. Pengguna dapat “menghadiri” sidang parlemen secara virtual, mensimulasikan pemungutan suara, atau mengikuti alur pembuatan kebijakan secara interaktif. Inovasi ini memperkaya cara belajar politik yang tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan motorik. Di Indonesia, potensi penggunaan teknologi ini masih sangat terbuka, khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kampus. Namun, tantangan utama tetap terletak pada kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta potensi penyalahgunaan data oleh aktor politik. Oleh karena itu, penerapan AI dan teknologi imersif dalam pendidikan politik ke depan harus disertai dengan regulasi etis dan transparansi, agar tujuan demokratis tetap menjadi fondasi utama dari setiap inovasi digital yang dikembangkan (Polizzi, 2019).

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK

Media Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Media memiliki peran strategis dalam pendidikan politik karena kemampuannya dalam menyebarluaskan informasi, membentuk opini publik, dan menyediakan ruang bagi diskusi politik. Di era modern, media tidak lagi terbatas pada peran informatif semata, melainkan juga menjadi forum deliberatif tempat berbagai pandangan politik dipertemukan. Surat kabar, radio, televisi, hingga platform digital telah menjadi jembatan antara negara dan warga dalam menyampaikan isu-isu politik yang kompleks. Fungsi ini menjadikan media sebagai aktor penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat, terutama dalam sistem demokrasi yang menuntut partisipasi warga secara aktif dan rasional (Ukraine & Sharipov, 2024).

Namun demikian, kekuatan media dalam membentuk opini juga menyimpan potensi manipulasi dan penyalahgunaan. Dalam banyak kasus, media digunakan sebagai alat propaganda oleh pihak-pihak berkepentingan politik tertentu. *Framing* berita yang bias, penyebaran informasi menyesatkan, hingga praktik jurnalisme sensasional dapat mengarahkan opini publik ke arah yang tidak objektif. Oleh karena itu, pendidikan politik melalui media harus diiringi dengan literasi media yang kuat, yaitu kemampuan warga untuk menganalisis pesan media secara kritis, mengenali bias, serta mengevaluasi kredibilitas sumber informasi (Barasa & Riyanto, 2023). Warga yang memiliki literasi media tinggi akan mampu memilah informasi politik yang relevan dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan emosional.

Dalam kajian komunikasi politik, terdapat tiga generasi besar yang menandai perubahan cara warga berinteraksi dengan

media dan pesan politik. Generasi pertama disebut era retorika politik, di mana kemampuan berbicara tokoh politik menjadi alat utama dalam mempengaruhi publik. Generasi kedua ditandai dengan dominasi media massa, seperti televisi dan surat kabar, sebagai penentu arus informasi. Sementara generasi ketiga merupakan era media baru (*new media*), di mana warga tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten politik secara mandiri. Transisi antargenerasi ini menunjukkan bahwa media bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga membentuk pola partisipasi politik yang berbeda di setiap masanya (Chekunova, 2022).

Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan Politik Digital

Perkembangan media digital telah membuka peluang luar biasa dalam pendidikan politik, terutama dalam hal aksesibilitas, kecepatan informasi, dan partisipasi publik. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan signifikan yang mengancam kualitas demokrasi. Penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui media sosial menjadi salah satu ancaman utama. Berita palsu, hoaks politik, dan narasi kebencian tersebar dengan cepat dan luas, sering kali tanpa disertai verifikasi. Hal ini menyebabkan kebingungan informasi di masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan proses demokrasi. Ketika masyarakat tidak dapat membedakan fakta dan opini, maka pendidikan politik yang sehat pun menjadi sulit terwujud (Yilmaz et al., 2024).

Selain itu, algoritma media sosial yang dirancang untuk menyajikan konten sesuai preferensi pengguna dapat menciptakan apa yang disebut sebagai “ruang gema” (*echo chamber*). Dalam kondisi ini, pengguna hanya terpapar pada sudut pandang yang sejalan dengan keyakinannya, sementara pandangan yang berbeda justru diabaikan atau dihadang oleh sistem. Akibatnya, terjadi polarisasi politik yang tajam, yang

menghambat dialog dan kesepahaman antarwarga. Ruang publik digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan secara sehat justru berubah menjadi arena konflik yang memperuncing perbedaan. Pendidikan politik di era digital harus mampu mengatasi fenomena ini dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, serta dengan membekali warga dengan keterampilan berpikir kritis dalam mengelola informasi politik yang kompleks (Polizzi, 2019).

Meski demikian, media digital juga membuka jalan baru bagi pembentukan komunitas politik yang lebih cair dan lintas batas geografis. Kini masyarakat dapat membentuk forum politik virtual melalui grup WhatsApp, komunitas Telegram, hingga platform seperti X (Twitter) atau YouTube. Warga yang sebelumnya tidak memiliki akses ke ruang diskusi politik kini dapat berpartisipasi, bertanya, bahkan menginisiasi aksi kolektif digital. Sebuah studi oleh (Arrazak & Adnan, 2025) menunjukkan bahwa keterlibatan politik berbasis komunitas digital dapat meningkatkan kepercayaan sosial, memperluas pengetahuan politik, dan mendorong aksi nyata di dunia nyata. Dengan demikian, pendidikan politik digital menghadirkan ruang alternatif yang menjanjikan, asalkan dikelola dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan etika informasi.

Dampak Media Pada Partisipasi Politik

Media memainkan peran penting dalam memobilisasi partisipasi politik warga negara. Keberadaan media yang masif, baik media massa maupun media digital, memungkinkan informasi politik menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu singkat. Informasi tentang tahapan pemilu, profil kandidat, isu-isu kebijakan publik, hingga proses pengambilan keputusan politik kini tersedia secara luas dan dapat diakses dengan mudah. Studi (Abdullah et al., 2024) menegaskan bahwa media, khususnya media sosial, memiliki daya tarik tersendiri

dalam menjangkau pemilih muda. Melalui pendekatan visual dan interaktif, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter terbukti mampu meningkatkan kesadaran politik generasi muda yang selama ini dianggap apatis terhadap urusan publik.

Namun demikian, dampak media terhadap partisipasi politik tidak sepenuhnya positif. Di tengah banjir informasi, banyak individu yang mengalami kejenuhan politik atau bahkan menjadi sinis terhadap politik karena dominasi konten yang bersifat negatif, provokatif, atau partisan. Media juga berpotensi menciptakan persepsi yang tidak utuh terhadap isu-isu publik, terutama jika penyajiannya tidak berimbang atau terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan. Hal ini dapat memicu sikap apatis, di mana sebagian warga memilih untuk menarik diri dari ruang publik dan enggan menggunakan hak politiknya. Polarisasi opini yang diperkuat oleh algoritma media digital turut mempersempit ruang dialog, sehingga warga yang berbeda pandangan cenderung saling menolak alih-alih berdiskusi secara deliberatif (Polizzi, 2019).

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi budaya digital di Indonesia. Dalam kondisi keterbatasan mobilitas fisik, aktivitas politik dan sosial beralih ke ruang digital. Peningkatan signifikan terjadi dalam penggunaan aplikasi konferensi daring, webinar politik, diskusi virtual, dan kampanye digital yang mengedepankan interaksi berbasis data dan narasi (Arianto, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi dalam menjaga partisipasi politik tetap aktif meski dalam situasi krisis. Oleh karena itu, penting untuk merancang model partisipasi politik digital yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya berfokus pada kuantitas kehadiran warga di ruang digital, tetapi juga pada kualitas keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Literasi Media dan Pendidikan Politik Kritis

Literasi media merupakan fondasi penting dalam pendidikan politik di era digital yang kompleks dan penuh disrupsi. Literasi ini mencakup kemampuan individu untuk mengenali, menafsirkan, dan mengevaluasi pesan-pesan politik yang tersebar melalui berbagai saluran media. Dalam konteks ini, warga negara dituntut tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga memahami konteksnya, mengkritisi sumbernya, dan menyadari bias yang mungkin terkandung di dalamnya. Polizzi (2021) menegaskan bahwa literasi media tidak bisa dilepaskan dari literasi demokrasi, karena keduanya saling menguatkan dalam membentuk warga yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik yang kritis berupaya membentuk kesadaran politik yang mendalam, bukan sekadar pengetahuan permukaan tentang sistem pemerintahan.

Dalam praktiknya, pendidikan politik kritis mendorong warga untuk memahami relasi kekuasaan, mempertanyakan narasi dominan, dan membangun kemampuan untuk berpartisipasi secara deliberatif dalam kehidupan publik. Media—baik tradisional maupun digital—dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses ini melalui program-program yang mencakup debat publik, forum diskusi, dan liputan kebijakan yang berimbang. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, misalnya, dapat mengoptimalkan media sosial untuk menyampaikan informasi yang faktual dan partisipatif, seperti yang dilakukan dalam berbagai sosialisasi pemilu daring (Sari et al., 2023). Dengan pendekatan edukatif yang tepat, media dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Namun, peningkatan literasi media harus pula diiringi dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem digital yang sehat. Dalam era keterbukaan informasi, risiko paparan terhadap berita palsu, ujaran kebencian, dan konten

ekstrem meningkat secara signifikan. Literasi digital yang kuat membantu masyarakat untuk menjaga ketahanan psikologis dan sosial terhadap konten yang merusak. Penelitian (Dewi & Elfiandri, 2024) menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, kebijakan negara, dan etika digital dalam membangun masyarakat yang resilien terhadap disinformasi. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berbasis pada literasi media bukan hanya tugas sekolah atau media, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

TRANSFORMASI MEDIA DAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Transformasi media digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara demokrasi dijalankan, khususnya di Indonesia. Internet dan media sosial membuka ruang diskursus politik yang lebih luas, yang tidak lagi dimonopoli oleh elite politik dan media arus utama. Masyarakat kini dapat mengakses dokumen kebijakan, menonton siaran langsung rapat DPR, hingga menanggapi pernyataan pejabat secara *real time*. Hal ini memperbesar peluang transparansi dan akuntabilitas kekuasaan. Namun pada saat yang sama, derasnya arus informasi juga menciptakan kebingungan, fragmentasi wacana, dan sering kali memperkuat sentimen emosional daripada rasionalitas politik. Dalam konteks ini, transformasi digital menjadi pedang bermata dua: di satu sisi memperkuat demokrasi, di sisi lain menantang kestabilannya (Sm, 2023).

Salah satu indikator utama kualitas demokrasi adalah partisipasi warga yang sadar dan terinformasi. Namun di era digital, partisipasi politik kerap kali bersifat simbolik—seperti menyukai, membagikan, atau mengomentari konten politik—tanpa keterlibatan substansial dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini dikenal sebagai *slacktivism*. Generasi muda Indonesia, misalnya, menunjukkan antusiasme tinggi di

media sosial menjelang pemilu, tetapi angka partisipasi nyata dalam kegiatan politik formal seperti pemungutan suara atau diskusi publik justru stagnan. Masalah ini diperparah oleh dominasi narasi populis dan kampanye politik yang mengandalkan strategi emosi, bukan program. Maka, jika tidak disertai dengan pendidikan politik yang serius dan berkelanjutan, transformasi media justru berpotensi melemahkan fondasi deliberatif dalam demokrasi (Tarsidi et al., 2023).

Dalam sistem demokrasi yang sehat, media memainkan peran sebagai *watchdog*—penjaga terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, peran ini semakin menonjol dengan kehadiran jurnalisme warga dan media alternatif yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan media arus utama. Investigasi independen tentang korupsi, pelanggaran HAM, atau konflik kepentingan sering kali berasal dari kanal-kanal digital nonkonvensional seperti blog, kanal YouTube, atau media komunitas. Warga kini dapat mendokumentasikan kejadian di lapangan dan menyebarkannya secara langsung ke publik. Ini memperkuat fungsi media sebagai sarana kontrol horizontal dari rakyat terhadap negara. Namun, tidak semua konten yang bersirkulasi mengandung validitas data atau akurasi etika jurnalistik, sehingga tetap diperlukan literasi informasi dan sistem verifikasi yang kuat agar media digital dapat benar-benar menjadi alat kontrol demokratis yang sah (Zonyfar et al., 2022).

Di sisi lain, hadir pula tantangan etika dan hukum dalam penggunaan media digital untuk kepentingan politik. Penyebaran ujaran kebencian, *doxing*, hingga manipulasi opini publik melalui *buzzer* atau *troll farm* merupakan fenomena yang mencemari ruang digital dan melemahkan prinsip *fair play* dalam demokrasi. Sayangnya, regulasi hukum yang ada sering tertinggal dibanding kecepatan perkembangan teknologi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika informasi masih

menghadapi dilema antara menjaga kebebasan berekspresi dengan kebutuhan untuk melindungi ruang publik dari penyalahgunaan. Dalam banyak kasus, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru lebih sering digunakan untuk membungkam kritik dibanding melindungi warga dari disinformasi. Maka, perlu dirumuskan kebijakan yang progresif, transparan, dan partisipatif agar ruang digital tetap menjadi arena demokrasi yang inklusif dan sehat (Yilmaz et al., 2024).

Menghadapi realitas kompleks tersebut, dibutuhkan sinergi antara tiga pilar utama: pendidikan, media, dan masyarakat sipil. Pendidikan harus mampu membekali warga negara dengan kemampuan literasi digital dan politik yang kuat sejak dini, tidak hanya dalam konteks penggunaan teknologi, tetapi juga dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Media, di sisi lain, harus menjalankan fungsinya dengan etika dan profesionalisme, menjunjung integritas jurnalistik dan menghindari praktik-praktik politik partisan. Sementara masyarakat sipil harus terus mengawal ruang digital sebagai ruang publik yang sehat, dengan memperjuangkan transparansi, melawan disinformasi, dan memperluas ruang diskusi yang inklusif. Ketiga unsur ini, jika bekerja bersama, dapat menciptakan ekosistem media yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif dalam mendorong demokrasi yang partisipatif dan bermartabat (Polizzi, 2019).

Ke depan, penguatan demokrasi digital di Indonesia membutuhkan desain kebijakan yang adaptif, teknologi yang inklusif, serta budaya politik yang lebih deliberatif. Negara perlu hadir bukan sebagai pengontrol informasi, tetapi sebagai fasilitator terciptanya ekosistem digital yang sehat dan adil. Pemberdayaan komunitas-komunitas literasi digital, dukungan terhadap jurnalisme independen, serta pelibatan generasi muda dalam produksi pengetahuan politik digital adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil. Demokrasi di era digital

bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal keberanian untuk membuka ruang partisipasi warga, menjamin hak atas informasi yang benar, dan membangun kultur politik yang berbasis pada penalaran, bukan sekadar opini. Jika hal ini tercapai, maka media digital akan benar-benar menjadi lokomotif yang menggerakkan demokrasi menuju arah yang lebih berkualitas dan berkeadaban (Tarsidi et al., 2023).

KESIMPULAN

Evolusi media dari masa ke masa telah memberikan pengaruh mendalam terhadap proses pendidikan politik di Indonesia. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog publik, pembentuk opini, dan bahkan alat mobilisasi politik. Dalam perkembangannya, media mengalami pergeseran peran, dari alat komunikasi elitis menjadi ruang terbuka yang dapat diakses siapa saja. Transformasi ini berdampak pada meningkatnya kesadaran politik warga, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik lintas kelompok sosial.

Di tengah kemajuan teknologi digital, media memainkan peran yang semakin kompleks dalam membentuk wacana politik. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, mengomentari isu politik, hingga terlibat dalam gerakan kolektif melalui kanal digital. Fenomena ini memperlihatkan demokratisasi ruang politik secara substansial, di mana warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari proses politik. Meski demikian, potensi positif ini tidak lepas dari sisi gelap—seperti misinformasi, ujaran kebencian, polarisasi opini, dan manipulasi algoritma yang mempersempit keberagaman pandangan.

Situasi ini menuntut kehadiran pendidikan politik yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan formal, tetapi juga membekali warga dengan keterampilan literasi media yang

kritis. Kemampuan untuk mengenali bias, menganalisis pesan media, dan mengidentifikasi motif politik di balik informasi menjadi penting dalam membangun warga negara yang cerdas secara digital. Tanpa keterampilan tersebut, partisipasi politik yang tampak aktif bisa berubah menjadi konsumsi informasi yang reaktif dan dangkal, yang justru menghambat proses demokratisasi yang lebih bermakna.

Untuk mewujudkan ruang digital yang sehat dan produktif bagi pendidikan politik, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil. Media perlu menjalankan fungsinya dengan etika dan tanggung jawab publik; pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang adil dan transparan; dan masyarakat harus terus didorong untuk menjadi aktor yang aktif serta reflektif dalam ruang publik digital. Ketiganya merupakan fondasi penting dalam menjaga agar demokrasi digital tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara normatif dan substansial.

Dengan demikian, kualitas demokrasi di era digital sangat bergantung pada bagaimana warga negara berinteraksi dengan informasi politik yang mereka konsumsi sehari-hari. Media memiliki kekuatan untuk mencerdaskan atau menyesatkan, tergantung pada bagaimana ia digunakan dan bagaimana masyarakat membacanya. Oleh karena itu, masa depan pendidikan politik yang bermakna terletak pada kemampuan kolektif kita dalam mengelola media sebagai ruang pembelajaran, refleksi, dan partisipasi yang etis dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, N. H., Zaki, T. S. A. T., & Ahmad, M. F. (2024). *Shaping the Future: Social Media's Role in Youth Political Information and Engagement - A Review of Literature*. International Journal of Academic Research in Business and

- Social Sciences, 14(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i12/23955>
- Anderson, B. R. O. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed)*. Verso.
- Arianto, B. (2021). Pandemi Covid-19 dan Transformasi Budaya Digital di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/titian.v5i2.15309>
- Ariestandy, D., Adidharma, W., & Isdendi, R. R. (2024). *Transformation Of Political Participation In The Digital Age, The Role Of Social Media In Shaping Public Opinion And Mass Mobilization*. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)*, 3(9), 1738–1745. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v3i9.145>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Arrazak, M., & Adnan, M. (2025). *The Influence of Social Media Usage and Political Trust on Young Voters Political Participation in Padang City*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2160>
- Barasa, M., & Riyanto, F. X. A. (2023). Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 188–195. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1785>
- Briggs, A., & Burke, P. (2010). *A social history of the media: From Gutenberg to the Internet (3. ed. reprinted)*. Polity Press.
- Chekunova, M. A. (2022). *The new media-discourse culture and modern political communication studies*. Verhnevolzhski

- Philological Bulletin, 1(28), 55–63.
<https://doi.org/10.20323/2499-9679-2022-1-28-55-63>
- Daniarsa, H. L., & Ningsih, H. K. (2023). *Tendency in Indonesian Newspaper Editorials: Genre and APPRAISAL Studies*. LITERA, 22(2), 188–199.
<https://doi.org/10.21831/ltr.v22i2.58651>
- Darmanto, Masduki, & Wiryawan, H. (2022). *Radio Broadcasting and Indonesian Nationalism: During the Last Decade of Dutch Colonialism*. Journal of Radio & Audio Media, 29(1), 104–119.
<https://doi.org/10.1080/19376529.2022.2035730>
- Dewi, N. P. S., & Elfiandri, E. (2024). *Overcoming Disinformation and Hoaxes in Political Communication: Promoting Media and Fact Literacy*. Journal International Dakwah and Communication, 4(1), 186–198.
<https://doi.org/10.55849/jidc.v4i1.663>
- Eisenstein, E. L. (2013). *The printing press as an agent of change: Communications and cultural transformations in early modern Europe, volumes I and II*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107049963>
- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional. Jurnal Ilmu Dan Budaya, 45(1), 41–49.
<https://doi.org/10.47313/jidb.v45i1.3035>
- Farid, M. (2023). *The Digital Public Sphere And The Face Of Indonesian Political Education*. AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies, 8(3), 417–427.
<https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i3.2658>
- Habermas, J. (2010). Ruang publik: Sebuah kajian, tentang kategori, masyarakat borjuis (Cet. 3). Balesastra Pustaka.

- Habermas, J. (2015). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Polity Press.
- Heryanto, A. (Ed.). (2009). *Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics (Transf. to digital pr)*. Routledge.
- Kitley, P. (2014). *Television, Nation, and Culture in Indonesia*. Ohio University Press.
- Krishnaiah, S. (2024). *A study on role of media in politics*. mLAC Journal for Arts, Commerce and Sciences (m-JACS) ISSN: 2584-1920, 2(1), 8–11. <https://doi.org/10.59415/mjacs.v2i1.17>
- Latief, I. S., & Tripuspita, N. (2024). *Political education in the digital era to encourage first-time voter participation*. International Conference on Aplied Social Sciences in Education, 1(1), 71–76. <https://doi.org/10.31316/icasse.v1i1.6850>
- Le, L. (2024). *Media Frame and Audience Cognitive Bias: Assessing News Effectiveness from a Social Psychological Perspective*. International Journal of Social Sciences and Public Administration, 4(2), 35–41. <https://doi.org/10.62051/ijsspa.v4n2.05>
- McLuhan, M., & Gordon, W. T. (2003). *Understanding media: The extensions of man (Critical ed)*. Gingko Press.
- Nafi, A. T., & Alamsyah, A. (2023). *Dinamika Program Siaran TVRI Tahun 1969-1989*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/sabda.18.1.1-10>
- Nofianto, E., Fitriyah, F., & Supratiwi, S. (2023). *Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Politik oleh Pejabat Publik (Studi pada Akun Media Sosial Nur Hidayat Sardini)*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 855. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3060>

- Obradović, N. (2023). *Political communication and traditional media – an inseparable connection*. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 1, 001. <https://doi.org/10.22190/fupsph2301001o>
- Ozel, A. (2025). Media literacy in the digital age – understanding its importance and impact: A theoretical framework. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 749–752. <https://doi.org/10.36713/epra19853>
- Polizzi, G. (2019, March 30). *Information Literacy in the Digital Age: Why Critical Digital Literacy Matters for Democracy* (1st ed., Informed Societies, pp. 1–24). Facet. <https://doi.org/10.29085/9781783303922.003>
- Sari, E. A., Setiawan, R. A. D., & Jandevi, U. (2023). *Social Media in Electoral Communication: A Case Study of Strategic Initiatives by Bantul Election Commission for the 2024 Elections*. CHANNEL: Jurnal Komunikasi, 11(2), 137–143. <https://doi.org/10.12928/channel.v11i2.377>
- Sen, K., & Hill, D. T. (2007). *Media, culture, and politics in Indonesia* (1st Equinox ed). Equinox Pub.
- Shokri, M. (2015). *Rhetoric Tradition and Democracy: Isocrates' Role in Ancient Greek Political Idea. Start Point of Western Political Philosophy*. Studia Humana, 4(3), 14–36. <https://doi.org/10.1515/sh-2015-0017>
- Sm, P. P. (2023). *The Role of Media Digital in Building Democracy in Indonesia*. Indonesia Media Law Review, 2(2). <https://doi.org/10.15294/imrev.v2i2.68068>
- Susi, Rahayu, Y.M., Zahra, N.A., and Koimah, S.M.. (2025). Implementasi Artificial Intelligence Terhadap Perkembangan Digital Kewarganegaraan Mahasiswa. Academy of Education Journal, 16(1), 62–72. <https://doi.org/10.47200/aoej.v16i1.2728>

- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). *Unveiling Utopian Civic Engagement: Empowering Digital Natives through Digital Literacy for a Better Future*. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v2i2.681>
- Ukraine, T. S. N. U. of K., Kyiv, & Sharipov, R. (2024). *Interaction between the media and the political system in the context of developing public opinion*. *Politology Bulletin*, 93, 184–196. <https://doi.org/10.17721/2415-881x.2024.93.184-196>
- Yilmaz, I., Triwibowo, W., Bachtiar, H., & Barton, G. (2024). *Competing Populisms, Digital Technologies and the 2024 Elections in Indonesia*. European Center for Populism Studies. <https://doi.org/10.55271/pp0029>
- Zonyfar, C., Maharina, M., Sihabudin, S., & Ahmad, K. (2022). Literasi digital: Penguatan etika dan interaksi siswa di media sosial. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(2), 1426. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7274>

BAB 3

MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG BARU PENDIDIKAN POLITIK

Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.
IPOSS Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PENDAHULUAN

Media sosial sudah merupakan instrumen penting pada pembentukan pola pendidikan politik publik. Keberadaannya memungkinkan akses informasi luas, diskusi terbuka, serta partisipasi aktif dalam wacana politik. Berbeda dengan metode sosialisasi politik tradisional yang mengandalkan institusi pendidikan formal dan media massa konvensional, media sosial menciptakan ruang interaktif lebih dinamis dan personal. Perubahan ini berdampak pada cara individu, terutama generasi muda, memahami isu politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, adalah krusial mengerti peran media sosial membangun kesadaran politik serta tantangan yang menyertainya.

Peran Media Sosial dalam Pendidikan Politik

Media sosial mentransformasi bagaimana individu mendapatkan, memahami, serta mendiskusikan informasi politik. Sebagai platform interaktif, media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita politik secara instan dan terhubung langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk politisi, akademisi, serta masyarakat sipil. Berbeda dengan media tradisional semisal televisi serta koran yang menyajikan informasi satu arah, media sosial bersifat

partisipatif, memfasilitasi pemakai untuk selain mengonsumsi, juga berkontribusi pada wacana politik. Dalam konteks pendidikan politik, media sosial memfasilitasi penyebaran ideologi, kebijakan, serta isu penting yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan demokrasi. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, masyarakat semakin bergantung pada media sosial sebagai sumber utama pembelajaran politik.

Interaksi yang terjadi di media sosial memberi kesempatan luas bagi masyarakat menaikkan pemahaman politik. Di era digital ini individu dapat mengakses berbagai sumber informasi dari berbagai perspektif dari berita independen, pernyataan resmi pemerintah, hingga analisis akademik mendalam. Namun, kualitas pendidikan politik melalui media sosial sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam memilah informasi kredibel dan memahami konteks politik lebih luas. Penggunaan media sosial oleh partai politik dapat membentuk persepsi pemilih muda terhadap identitas dan citra politik yang dibangun, menunjukkan bahwa media sosial selain berperan menjadi sarana komunikasi, juga menjadi alat pendidikan politik yang mempengaruhi preferensi politik individu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman politik seseorang selain dipengaruhi konten yang dikonsumsi, juga oleh cara berinteraksi dan berpartisipasi dalam diskusi politik di dunia maya (Abid et al., 2021).

Efektivitas media sosial dalam pendidikan politik menghadapi berbagai tantangan seperti dominasi informasi yang bersifat bias atau partisan yang dapat membentuk pemahaman politik yang kurang objektif. Media sosial juga memunculkan fenomena *filter bubble* di mana algoritma platform cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan pengguna sehingga mempersempit sudut pandang politik. Untuk memaksimalkan manfaat media sosial sebagai sarana pendidikan politik, diperlukan pendekatan lebih kritis dalam

mengonsumsi dan menganalisis informasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi sehat dan berbasis data menjadi faktor penting meningkatkan kualitas pendidikan politik berbasis media sosial.

Perubahan Pola Sosialisasi Politik di Era Digital

Sosialisasi politik mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya media sosial sebagai ruang utama diskusi publik. Jika sebelumnya pemahaman politik masyarakat dibentuk melalui interaksi langsung dengan keluarga, institusi pendidikan, dan media konvensional, kini media sosial berperan sebagai agen sosialisasi politik dominan. Perubahan ini berdampak besar terhadap bagaimana masyarakat khususnya generasi muda mengembangkan kesadaran politik. Media sosial memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok politik, menyampaikan opini secara terbuka, serta mengakses informasi lebih luas mengenai kebijakan pemerintah dan dinamika politik global. Media sosial selain menjadi sumber informasi politik, juga ruang partisipasi aktif pada pembentukan opini serta kesadaran politik.

Dalam konteks sosialisasi politik, media sosial mempercepat penyebaran nilai politik serta membentuk pola pikir masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dengan platform semisal X, Facebook, serta Instagram, masyarakat bisa berinteraksi langsung terhadap tokoh politik, akademisi, dan aktivis, serta mengikuti perkembangan politik *real-time*. Diskusi yang sebelumnya terbatas pada lingkungan akademik atau forum resmi kini dapat diakses siapa saja, sehingga terjadi desentralisasi informasi politik. Penggunaan media sosial oleh siswa sekolah menengah di Amerika Serikat berkontribusi signifikan terhadap proses sosialisasi politik karena lebih sering terpapar diskusi politik daripada generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial selain sarana komunikasi,

juga alat pembentukan kesadaran politik yang bisa menaikkan partisipasi publik dalam proses demokrasi (Anderson, 2020).

Namun perubahan pola sosialisasi politik ini juga menimbulkan tantangan baru seperti munculnya fragmentasi informasi, di mana individu lebih cenderung mengakses informasi dari sumber sesuai dengan preferensi masing-masing, tanpa memperhatikan perspektif beragam. Fenomena tersebut memperkuat polarisasi politik serta mengurangi kemungkinan dialog yang konstruktif. Penyebaran informasi yang tidak diverifikasi atau hoaks semakin memperumit proses sosialisasi politik, karena masyarakat sering menerima informasi sesat atau bias. Diperlukan pendekatan semakin kritis dalam mengonsumsi informasi politik dari media sosial, serta upaya edukasi lebih luas meningkatkan kesadaran pentingnya sumber informasi yang kredibel dan objektif. Meskipun media sosial telah membawa perubahan positif dalam pola sosialisasi politik, penggunaannya harus disertai dengan literasi digital memadai agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Literasi Digital sebagai Kunci Pemahaman Politik di Media Sosial

Literasi digital menjadi faktor kunci memastikan masyarakat dapat memanfaatkan media sosial secara efektif dalam pendidikan politik. Dengan arus informasi semakin cepat dan tidak terbatas, kemampuan memilah dan menganalisis informasi politik secara kritis menjadi keterampilan yang sangat penting. Literasi digital selain meliputi kapabilitas fundamental pada penggunaan teknologi digital, juga melibatkan penguasaan mengenai bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan diterima publik. Tanpa literasi digital yang memadai, pengguna media sosial rentan terhadap penyebaran berita palsu, propaganda politik, dan manipulasi informasi yang dapat

mempengaruhi persepsi serta keputusan politik. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas pemahaman politik di era digital.

Tantangan utama literasi digital adalah meningkatnya fenomena misinformasi dan disinformasi yang secara luas tersebar di media sosial. Banyak pengguna media sosial menerima informasi politik tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber sehingga mudah terpengaruh narasi sesat atau bias. Algoritma media sosial sering menyajikan konten yang selaras terhadap peminatan pemakai, menciptakan ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat sudut pandang tertentu dan mengurangi paparan terhadap perspektif lain. Literasi digital yang kokoh memungkinkan individu mengerti cara kerja algoritma dalam menentukan informasi yang diterima sehingga dapat mengembangkan pemahaman politik lebih kritis dan beragam. Dengan pemahaman ini individu dapat lebih sadar terhadap bagaimana teknologi membentuk akses terhadap informasi dan menghindari perangkap bias yang sering muncul di media sosial (Pangrazio & Godhe, 2020).

Untuk menaikkan literasi digital pada pendidikan politik diperlukan strategi komprehensif termasuk integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal, kampanye kesadaran publik, serta pelatihan bagi masyarakat luas. Pendidikan literasi digital harus mencakup kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi, memahami bias dalam pemberitaan, serta mengenali teknik manipulasi yang sering digunakan dalam kampanye politik daring. Dengan pendekatan ini masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengolah informasi politik yang diterima dan tidak mudah terpengaruh propaganda yang tidak berbasis fakta. Literasi digital menjadi elemen fundamental dalam memastikan pendidikan politik melalui

media sosial bisa bermanfaat maksimal untuk publik (Livingstone & Helsper, 2002).

Media Sosial dan Partisipasi Politik Generasi Muda

Generasi muda memiliki pola partisipasi politik berbeda daripada generasi terdahulu, terutama dalam hal keterlibatan melalui media sosial. Jika generasi terdahulu lebih banyak berpartisipasi dalam politik melalui saluran konvensional seperti pemilu, partai politik, dan demonstrasi fisik, generasi muda saat ini lebih cenderung mengekspresikan pandangan politik melalui media sosial. Platform digital seperti X, Instagram, serta TikTok merupakan sarana pokok dalam penyampaian opini, pengorganisasian gerakan sosial, serta interaksi dengan isu politik yang dianggap penting. Partisipasi politik melalui media sosial memungkinkan generasi muda untuk terlibat dalam diskusi politik tanpa harus terikat pada struktur formal sehingga dapat mengekspresikan pandangan lebih bebas dan kreatif (Bennett, 2021).

Partisipasi politik generasi muda melalui media sosial juga terlihat dalam berbagai gerakan sosial dan kampanye digital yang berhasil membawa perubahan signifikan. Dari kampanye kesadaran lingkungan hingga gerakan keadilan sosial, generasi muda telah memanfaatkan media sosial sebagai alat mobilisasi massa efektif dengan menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi, mengorganisasikan aksi, serta mempengaruhi kebijakan publik melalui tekanan sosial. Pendidikan politik efektif harus berorientasi pada partisipasi aktif, dan media sosial menawarkan ruang semakin inklusif untuk generasi muda dilibatkan pada wacana demokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran politik melalui media sosial, generasi muda berpeluang semakin besar dalam mempengaruhi kebijakan serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Dewey, 2024).

Namun walaupun media sosial memberi kesempatan luas bagi generasi muda dalam berpartisipasi dalam politik, terdapat masalah yang harus diatasi seperti rendahnya tingkat keterlibatan pada proses politik formal semisal pemilu dan pembuatan kebijakan. Banyak generasi muda yang aktif di media sosial, tetapi tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan politik konvensional. Media sosial juga bisa menciptakan ilusi keterlibatan politik yaitu seseorang merasa telah berkontribusi dalam perubahan hanya dengan membagikan konten atau memberikan komentar, tanpa tindakan nyata. Adalah krusial untuk generasi muda menyeimbangkan partisipasi politik di media sosial dengan keterlibatan dalam proses politik lebih substantif seperti pemungutan suara, advokasi kebijakan, dan kegiatan sosial di komunitas. Melalui pendekatan lebih holistik, media sosial bisa merupakan sarana lebih efektif untuk menaikkan partisipasi politik generasi muda dan memperkuat demokrasi.

Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Pendidikan Politik

Media sosial berperan kompleks dalam pendidikan politik dengan dampak positif maupun negatif. Media sosial memberi akses informasi meluas, memungkinkan publik memahami isu politik lebih mendalam. Platform digital ini juga menjadi sarana bagi publik berperan serta aktif pada diskusi politik, berbagi opini, serta mengorganisasikan gerakan sosial. Media sosial mempunyai potensi pula sebagai sarana penyebaran disinformasi, propaganda politik, serta memperburuk polarisasi masyarakat. Adalah krusial pemahaman bagaimana media sosial mempengaruhi pendidikan politik semakin meluas, serta bagaimana cara memitigasi dampak negatifnya.

Dampak positif utama media sosial adalah kemampuan menyebarkan informasi politik dengan cepat dan luas. Dengan

platform digital seperti X, Facebook, dan Instagram, masyarakat tidak lagi bergantung pada media tradisional untuk mendapatkan berita politik. Informasi yang tersedia di media sosial juga lebih beragam, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai perspektif dari berbagai kelompok dan individu. Media sosial memungkinkan komunikasi langsung antara masyarakat dan pemangku kepentingan politik, seperti politisi dan aktivis. Media sosial mentransformasi lanskap komunikasi politik melalui pemberian akses langsung pada masyarakat untuk berinteraksi dengan pemimpin dan lembaga politik yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi. Media sosial selain merupakan sumber informasi politik, juga alat demokratisasi komunikasi yang memungkinkan partisipasi politik semakin luas.

Media sosial juga membawa berbagai tantangan dalam pendidikan politik seperti penyebaran informasi yang tidak akurat. Misinformasi dan disinformasi menjadi masalah semakin serius, di mana berita palsu atau informasi yang telah dimanipulasi dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik secara keliru. Media sosial juga sering memperburuk polarisasi politik dengan memperkuat *filter bubble* dan *echo chamber*, yaitu pemakai hanyalah terpaparkan informasi yang mendukung sudut pandang pengguna serta jarang mendapat perspektif lain. Fenomena ini menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk melakukan diskusi politik yang sehat dan berbasis data. Untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam pendidikan politik, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, agar lebih mampu mengenali informasi yang valid dan menghindari jebakan bias politik yang dapat memperburuk ketegangan sosial (Iskandar, 2025).

MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT MOBILISASI DAN POLITISASI PUBLIK

Kemajuan media sosial mentransformasi cara masyarakat melakukan interaksi terhadap politik. Dari sekadar platform berbagi informasi, media sosial merupakan sarana pokok pada mobilisasi politik dan politisasi publik. Aktor politik baik individu maupun kelompok memanfaatkan platform digital untuk membangun opini, menggerakkan massa, serta menguatkan ideologi tertentu. Fenomena ini selain berlangsung pada negara maju, juga pada negara berkembang di mana media sosial merupakan alat efektif untuk membentuk kesadaran politik. Namun pemakaian media sosial pada politik juga menghadirkan tantangan besar, termasuk penyebaran informasi yang bias, polarisasi, serta manipulasi opini publik.

Media Sosial sebagai Sarana Kampanye Politik

Perkembangan teknologi digital mengubah cara kampanye politik dijalankan di seluruh dunia. Media sosial kini merupakan alat pokok untuk politisi serta partai politik untuk menyebarkan pesan terhadap publik. Berbeda dengan metode kampanye tradisional yang mengandalkan televisi, radio, serta koran, media sosial memungkinkan komunikasi langsung antara politisi dan pemilih. Interaksi ini menciptakan keterlibatan lebih personal, meningkatkan efektivitas kampanye, serta memperluas jangkauan audiens dalam waktu singkat. Dengan berbagai fitur seperti siaran langsung, polling, dan diskusi daring, media sosial menawarkan peluang besar bagi politisi untuk membangun citra, merespons isu politik terkini, serta menggerakkan pendukung secara lebih cepat dan efisien (Chadwick, 2022).

Kampanye politik di media sosial juga memberi kesempatan untuk politisi menyelaraskan strategi komunikasi selaras karakteristik audiens. Kandidat yang menargetkan pemilih muda lebih cenderung menggunakan platform seperti Instagram dan

TikTok, sementara kandidat yang ingin menjangkau kelompok usia lebih tua mungkin lebih aktif di Facebook atau X. Media sosial selain digunakan dalam menyebarkan pesan politik, juga membentuk narasi yang dapat mengubah pandangan masyarakat pada sebuah isu ataupun kandidat. Media sosial selain merupakan sarana dalam penyebaran informasi, juga berperan penting untuk membangun opini publik serta menciptakan tren politik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu (Wolfsfeld, 2022).

Meskipun media sosial memberikan banyak keuntungan dalam kampanye politik, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil seperti penyebarluasan informasi sesat ataupun manipulatif yang dapat menyesatkan pemilih. Kandidat sering menggunakan strategi propaganda digital untuk menyerang lawan politik atau memanipulasi opini publik dengan cara yang tidak etis. Algoritma media sosial yang didesain untuk menyajikan konten berdasar peminatan pemakai bisa pula menyebabkan *filter bubble* yaitu fenomena pemilih hanyalah terpaparkan informasi yang mendukung pandangan politik sendiri. Akibatnya diskusi politik di media sosial cenderung menjadi lebih tertutup dan polarisasi politik semakin meningkat. Literasi digital yang baik menjadi faktor penting bagi masyarakat agar mampu menyaring informasi lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi politik yang menyesatkan.

Aktivisme Digital dan Gerakan Politik di Media Sosial

Media sosial juga telah berkembang menjadi alat utama dalam mobilisasi politik dan aktivisme digital. Berbagai gerakan politik dan sosial kini bermula dari platform digital, memungkinkan individu dan kelompok untuk menyuarakan aspirasi secara luas tanpa harus melalui jalur formal seperti partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Fenomena ini membuktikan media sosial dapat berfungsi menjadi sarana

demokratisasi yang memperkuat peran serta masyarakat dalam politik, terutama bagi kelompok yang sebelumnya kurang memiliki akses ke ruang publik. Dengan memanfaatkan platform seperti X, Facebook, dan Instagram, aktivis dapat menyebarkan informasi, mengorganisasikan protes, serta menarik perhatian media dan pemerintah terhadap isu yang diperjuangkan.

Gerakan politik yang lahir dari media sosial sering berkembang dengan cepat dan mendapatkan dukungan besar masyarakat. Contoh paling nyata adalah gerakan #BlackLivesMatter yang berawal dari media sosial serta lalu meluas sebagai gerakan global melawan rasisme dan kekerasan polisi. Media sosial berperan sebagai instrumen utama dalam mobilisasi politik, memungkinkan kelompok marginal untuk menyampaikan suara dan meningkatkan partisipasi politik dalam skala global. Fenomena ini membuktikan media sosial selain sebagai sarana komunikasi, juga menjadi ruang untuk kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam sistem politik konvensional. Dengan viralnya suatu isu di media sosial, pemerintah dan institusi terkait sering terpaksa merespons dan mengambil tindakan untuk menanggapi tuntutan publik (Alodat et al., 2023).

Namun efektivitas aktivisme digital dalam menciptakan perubahan nyata masih menjadi perdebatan. Tantangan utama adalah fenomena *slacktivism* di mana individu merasa telah berkontribusi terhadap suatu gerakan hanya dengan membagikan informasi atau menyukai sebuah unggahan tanpa benar-benar mengambil tindakan nyata di dunia *offline*. Tidak semua gerakan politik yang muncul di media sosial berdampak jangka panjang, terutama jika tidak didukung strategi kuat dalam dunia nyata. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan propaganda atau mengarahkan opini publik dengan tujuan tertentu. Dalam

beberapa kasus, gerakan politik yang muncul di media sosial dapat dimanipulasi oleh kelompok berkepentingan untuk memperkeruh situasi politik atau menciptakan ketidakstabilan sosial. Meskipun aktivisme digital berpotensi besar dalam memperjuangkan perubahan, diperlukan strategi lebih terstruktur dan dukungan nyata agar gerakan politik dapat menghasilkan dampak lebih signifikan dan berkelanjutan.

Peran *Influencer* dan *Buzzer* dalam Mempengaruhi Opini Publik

Pada masa digital media sosial menjadi sarana bagi individu berpengaruh atau *influencer* untuk membentuk opini publik tentang berbagai isu termasuk politik. *Influencer* politik sering terdiri dari aktivis, jurnalis, akademisi, atau figur publik yang memiliki daya tarik dan kredibilitas tinggi di mata pengikutnya dengan menggunakan platform seperti YouTube, X, dan Instagram untuk menyampaikan pandangan politik, mengkritik kebijakan pemerintah, atau mendukung kandidat tertentu dalam pemilu. Banyak yang menjadi sumber informasi alternatif bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpercayaan terhadap media konvensional. Kehadiran *influencer* dalam politik semakin memperkuat keterlibatan publik dalam diskusi politik dalam bentuk dukungan maupun perlawanan terhadap kebijakan tertentu.

Ada pula kelompok *buzzer* yang secara aktif berperan membentuk opini publik dengan strategi komunikasi lebih agresif. *Buzzer* biasanya bekerja dalam tim dan didanai pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan kepentingan politik tertentu. *Buzzer* dapat berperan dalam meningkatkan citra seorang kandidat, menjatuhkan lawan politik, atau bahkan menyebarkan propaganda yang bertujuan untuk memanipulasi opini masyarakat. *Buzzer* politik di media sosial lazim dipakai membangun opini publik melalui strategi

komunikasi yang terstruktur, bahkan dengan menyebarkan informasi yang bias atau tidak akurat. Kenyataan tersebut menunjukkan media sosial selain menjadi ruang diskusi yang terbuka, juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu (Neyasyah, 2020).

Meskipun *influencer* dan *buzzer* berdampak besar dalam membentuk opini publik, peran tersebut sering menuai kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan etika penggunaan media sosial sebagai alat propaganda politik, terutama ketika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan. Keberadaan *buzzer* sering menciptakan polarisasi politik yang tajam di masyarakat, di mana individu hanya mengonsumsi informasi yang sesuai dengan preferensi politik tanpa mempertimbangkan perspektif lain. Adalah penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dibangun secara strategis oleh aktor politik tertentu (Freelon et al., 2020).

Misinformasi, Polarisasi, dan Tantangan Pendidikan Politik di Media Sosial

Misinformasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan media sosial sebagai ruang politik. Informasi tak benar ataupun bias secara mudah tersebar luas serta mempengaruhi opini publik. Fenomena ini diperparah dengan adanya algoritma media sosial yang cenderung menguatkan polarisasi politik melalui penyajian konten hanya yang selaras terhadap peminatan pemakai. Ketika individu hanya mendapatkan informasi dari satu sisi politik, cenderung mengembangkan pandangan yang semakin ekstrem dan sulit menerima perspektif berbeda. Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya diskusi politik secara sehat.

Polarisasi politik yang dipicu oleh media sosial dapat menciptakan ketegangan sosial signifikan. Media sosial berperan besar memperdalam polarisasi politik karena algoritma platform digital mendorong pengguna untuk terus mengonsumsi informasi yang selaras terhadap sudut pandang politik masing-masing. Situasi tersebut diperparah dengan munculnya fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* yaitu individu hanyalah terpaparkan informasi yang memperkuat keyakinan masing-masing, sementara pandangan alternatif diabaikan atau bahkan dianggap sebagai ancaman. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan demokrasi, karena masyarakat tidak lagi memiliki akses terhadap berbagai perspektif yang diperlukan untuk membuat keputusan politik secara bijaksana (Kubin & Sikorski, 2021).

Untuk ini diperlukan pendekatan yang semakin kritis untuk mengonsumsi informasi politik pada media sosial. Literasi digital dan pendidikan politik lebih inklusif menjadi faktor penting dalam membentuk masyarakat yang lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Pemerintah, akademisi, serta platform media sosial perlu bekerja sama menciptakan regulasi yang mampu menekan penyebaran misinformasi dan membangun ekosistem media sosial yang lebih sehat. Masyarakat juga harus lebih aktif melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak terjebak siklus penyebaran hoaks yang merugikan demokrasi (Guess et al., 2018).

Regulasi dan Etika dalam Penggunaan Media Sosial untuk Pendidikan Politik

Regulasi untuk pemakaian media sosial bagi tujuan politik merupakan wacana yang bertambah krusial pada masa digital. Berbagai negara mulai menerapkan kebijakan yang mengatur penyebaran informasi politik di platform digital guna mencegah penyalahgunaan dan penyebaran misinformasi. Regulasi ini

bertujuan untuk menciptakan ruang politik yang lebih transparan dan etis, di mana masyarakat dapat mengakses informasi politik yang akurat tanpa terpengaruh oleh propaganda atau hoaks yang sering beredar di media sosial. Regulasi yang ketat juga diperlukan untuk menekan praktik tidak etis seperti kampanye hitam, penyebaran berita palsu, serta penggunaan akun bot yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik.

Namun penerapan regulasi dalam ruang digital sering menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi dan menghambat diskusi politik yang sehat. Di sisi lain tanpa regulasi jelas, media sosial dapat terus menjadi alat politisasi yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Regulasi media sosial dalam politik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan upaya pencegahan penyalahgunaan informasi. Kebijakan yang diterapkan harus mampu mengakomodasi kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan integritas informasi yang disebarkan di media sosial (Kanga et al., 2021).

MASA DEPAN MEDIA SOSIAL DALAM PENDIDIKAN POLITIK

Media sosial merupakan platform pokok dalam membentuk kesadaran politik serta pendidikan politik di berbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi terus mendorong perubahan dalam cara individu memperoleh informasi, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam politik. Seiring berkembangnya digitalisasi, pendidikan politik semakin bergantung pada media sosial sebagai ruang interaksi dinamis. Namun, tantangan seperti misinformasi, polarisasi, dan kurangnya literasi digital masih menjadi hambatan utama. Masa depan pendidikan politik melalui media sosial akan sangat dipengaruhi oleh inovasi teknologi, strategi optimalisasi penggunaan platform digital,

serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ruang diskursus politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Inovasi Teknologi dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Politik

Kemajuan teknologi digital mentransformasi cara masyarakat mengakses serta memahami pendidikan politik. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), big data, serta teknologi *blockchain* memungkinkan penyebaran informasi politik secara lebih cepat, akurat, dan interaktif. Media sosial yang berbasis algoritma canggih memungkinkan pengguna menerima informasi yang diselaraskan peminatan masing-masing, membangun pengalaman yang semakin personal. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku pengguna dalam mengonsumsi informasi politik sehingga platform dapat menampilkan konten yang lebih relevan dan mendidik. Digitalisasi dalam pendidikan politik mengalami pergeseran besar, di mana media sosial kini berfungsi sebagai medium utama dalam membentuk opini dan kesadaran politik masyarakat. Namun meskipun teknologi membawa kemudahan dalam akses informasi politik, ada tantangan besar dalam memastikan bahwa informasi yang diterima oleh publik bersifat objektif dan tidak dipengaruhi bias algoritma (Williamson et al., 2020).

Teknologi *blockchain* juga mulai digunakan dalam ranah politik untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar. *Blockchain* memungkinkan pembuatan database yang tidak dapat diubah, sehingga informasi politik yang diunggah dapat diverifikasi keasliannya. Teknologi ini berpotensi mengurangi penyebaran berita palsu dan misinformasi yang sering menjadi hambatan dalam pendidikan politik yang sehat. *Big data* juga berperan penting dalam memahami tren politik masyarakat. Dengan analisis *big*

data, pemerintah dan organisasi politik dapat mengidentifikasi isu yang paling banyak diperbincangkan dan mengembangkan strategi pendidikan politik lebih efektif. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data dan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak berkepentingan. Kebijakan perlindungan data ketat harus diterapkan untuk mencegah eksploitasi informasi pengguna dalam kepentingan politik tertentu.

Strategi Efektif dalam Mengoptimalkan Media Sosial untuk Literasi Politik

Agar media sosial dapat menjadi sarana efektif pada pendidikan politik, diperlukan strategi yang sistematis serta berbasis pada pendekatan holistik. Langkah utama adalah peningkatan program literasi media yang berorientasi pada pemahaman politik yang mendalam. Literasi politik yang baik selain mencakup kemampuan mengakses informasi, juga dalam menganalisis kredibilitas sumber, memahami konteks politik, serta mengidentifikasi bias dalam berita yang beredar. Program literasi politik harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, jurnalis, dan praktisi politik. Pendekatan berbasis teknologi dalam literasi politik selain membantu meningkatkan pemahaman politik masyarakat, juga mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Inisiatif yang terstruktur dalam meningkatkan pemahaman politik melalui media sosial harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan keterlibatan berbagai pihak.

Strategi lain adalah pemanfaatan konten interaktif yang menarik dan mudah diakses berbagai kelompok masyarakat. Dalam era digital generasi muda cenderung lebih tertarik pada konten visual dan interaktif daripada teks panjang yang bersifat akademik. Penggunaan video edukatif, infografis, serta diskusi daring melalui webinar dan *podcast* menjadi metode yang

efektif dalam meningkatkan literasi politik. Kampanye digital yang menggunakan pendekatan naratif yang kuat juga membantu masyarakat memahami isu politik dengan cara yang semakin terpersonalisasi serta berelevansi terhadap kehidupan keseharian. Penggunaan *fact-checking tools* yang mudah diakses dapat membantu pengguna dalam memilah informasi yang benar dari berita palsu (Gaultney et al., 2022).

Media Sosial sebagai Ruang Diskursus Politik yang Demokratis

Media sosial berpotensi besar menjadi ruang diskursus politik yang lebih demokratis daripada media konvensional. Berbeda dengan televisi atau surat kabar yang sering dikendalikan oleh kepentingan tertentu, media sosial memberi akses semakin meluas pada publik dalam berperan serta pada diskusi politik. Siapa pun dapat menyampaikan opini, berdiskusi, atau bahkan menantang kebijakan pemerintah melalui platform digital. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politik tanpa harus melalui institusi formal. Media sosial berpotensi menjadi arena demokratisasi politik, asalkan pengguna memiliki literasi media yang memadai untuk memahami perbedaan antara fakta dan opini. Namun meskipun media sosial memberikan kebebasan berekspresi, tantangan dalam menjaganya tetap demokratis dan sehat masih menjadi isu utama (Sunstein, 2022).

Tantangan utama dalam menjadikan media sosial sebagai ruang diskusi politik yang demokratis adalah tingginya tingkat polarisasi dan penyebaran misinformasi. Algoritma media sosial sering memperkuat pandangan tertentu dengan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna yang menciptakan *echo chamber*. Dalam lingkungan seperti ini, pengguna cenderung hanyalah terpaparkan informasi yang

mendukung sudut pandang masing-masing serta jarang terlibat dalam diskusi yang memperdebatkan berbagai perspektif. Fenomena ini dapat mempersempit ruang diskursus politik yang seharusnya bersifat inklusif dan berbasis pada pertukaran gagasan. Adalah krusial untuk platform media sosial membangun mekanisme yang dapat mendorong pengguna agar lebih terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Program literasi digital yang lebih luas harus diperkenalkan agar masyarakat mampu memilah informasi yang berbasis fakta dari yang bersifat opini atau propaganda.

Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan diskusi politik di media sosial tidak didominasi oleh aktor yang memiliki kepentingan tertentu seperti kelompok politik atau *buzzer* yang berusaha mempengaruhi opini publik. Dalam beberapa kasus media sosial telah digunakan untuk menyebarkan disinformasi dengan tujuan membentuk persepsi publik secara sistematis. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur transparansi informasi politik di media sosial. Beberapa negara telah mulai menerapkan aturan yang mewajibkan akun politik atau iklan kampanye di media sosial untuk menyertakan informasi tentang sumber pendanaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam diskusi politik digital. Dengan regulasi yang lebih ketat dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menjaga integritas ruang digital, media sosial dapat berkembang menjadi ruang diskusi politik yang betul-betul demokratis serta bermanfaat untuk pendidikan politik.

Prospek dan Tantangan Pendidikan Politik di Era Media Sosial

Pendidikan politik di era media sosial memiliki prospek sangat cerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Media sosial memungkinkan individu untuk mengakses

informasi politik secara cepat serta mudah, tanpa dibatasi ruang serta waktu. Dengan meningkatnya penetrasi internet, terutama di kalangan generasi muda, media sosial bisa merupakan sarana utama membangun kesadaran politik dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Kampanye politik, diskusi publik, dan gerakan sosial kini lebih mudah disebarkan melalui platform digital, memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami isu politik yang berkembang. Media sosial dapat berfungsi sebagai katalisator demokrasi dengan memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi dalam diskusi politik semakin inklusif serta interaktif. Media sosial berpotensi sebagai instrumen pokok untuk membina pemilih yang lebih cerdas dan kritis pada dinamika politik (Zhuravskaya et al., 2020).

Namun di balik prospek yang menjanjikan terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa pendidikan politik melalui media sosial tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Tantangan utama adalah penyebaran misinformasi dan berita palsu yang dapat membentuk opini publik yang menyesatkan. Dalam banyak kasus algoritma media sosial berkecenderungan mengutamakan konten yang bisa mencuri perhatian, terlepas dari validitas informasi yang disajikan. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap propaganda politik yang tidak berbasis pada fakta. Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* memperkuat bias kognitif pengguna sehingga cenderung hanya mengonsumsi informasi yang selaras terhadap pandangan politik masing-masing. Kondisi tersebut bisa menghambat proses pendidikan politik yang seharusnya mengedepankan keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Dibutuhkan strategi yang semakin efektif dalam mengedukasi publik tentang pentingnya verifikasi informasi dan literasi digital yang memadai.

Kendala lain dalam pendidikan politik melalui media sosial adalah adanya intervensi politik yang dapat memanipulasi opini publik. Oknum pemerintah serta aktor politik ada yang memakai media sosial dalam menyebarkan narasi yang menguntungkan kepentingan sendiri, terkadang dengan cara yang tidak transparan. Fenomena ini dapat merusak integritas demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi politik yang tersedia di ruang digital. Regulasi lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial tidak digunakan sebagai alat manipulasi politik. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangatlah krusial untuk membangun ekosistem media sosial yang semakin sehat serta edukatif. Dengan pendekatan sistematis dan berbasis pada transparansi, media sosial dapat berkembang menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pendidikan politik, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang objektif dan berkualitas.

KESIMPULAN

Media sosial telah membuka ruang baru bagi pendidikan politik dengan memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan partisipasi yang lebih aktif. Namun, efektivitas media sosial dalam mendidik masyarakat bergantung pada tingkat literasi digital pengguna. Studi menunjukkan bahwa individu dengan pemahaman yang baik tentang literasi digital lebih mampu memilah informasi yang kredibel dan berkontribusi secara konstruktif dalam diskusi politik daring. Di sisi lain, media sosial juga memiliki potensi untuk memicu polarisasi politik dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Tantangan ini menuntut strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan media sosial untuk pendidikan politik. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam mengembangkan program literasi media yang mendorong pemahaman politik yang lebih

kritis. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi ruang demokratis yang mendukung partisipasi politik yang lebih inklusif dan berbasis informasi yang akurat.

Meskipun inovasi teknologi telah membuka peluang besar bagi pendidikan politik, tantangan dalam penggunaannya tetap tidak bisa diabaikan. Teknologi yang semakin canggih juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda politik atau menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Fenomena *deepfake* telah menimbulkan kekhawatiran serius dalam politik digital karena dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dalam bentuk video atau audio yang sangat meyakinkan. Adanya *filter bubble* dan *echo chamber* akibat algoritma media sosial dapat menghambat pendidikan politik yang berbasis pada keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Masa depan pendidikan politik selain bergantung pada teknologi yang berkembang, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut digunakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, A., Harrigan, P., & Roy, S. (2021). *A relationship marketing orientation in politics: Young voters' perceptions of political brands' use of social media*. Journal of Strategic Marketing.
- <https://doi.org/10.1080/0965254X.2020.1777457>
- Alodat, A. M., Al-Qora'n, L. F., & Hamoud, M. A. (2023). *Social media platforms and political participation: A study of Jordanian youth engagement*. Social Sciences.
- Anderson, D. (2020). *US High School Students' social Media Use And Their Political Socialization*. Communication Today.
- Bennett, W. L. (2021). *The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of*

- participation*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 644(1), 20–39.
- Chadwick, A. (2022). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
- Dewey, J. (2024). Democracy and education., degruyter.com. <https://doi.org/10.7312/dewe21010-003>
- Freelon, D., Marwick, A., & Kreiss, D. (2020). *False equivalencies: Online activism from left to right*. Science, 369(6508), 1197–1201.
- Gaultney, I. B., Sherron, T., & Boden, C. (2022). *Political Polarization, Misinformation, and Media Literacy*. Journal of Media Literacy Education.
- Guess, A., Nyhan, B., Reifler, J., P., & Viotty, S. (2018). *Selective exposure to misinformation: Evidence from the consumption of fake news during the 2016 US presidential campaign*. European Research Council. Mihailidis, 61(4), 441–454.
- Iskandar, D. (2025). *A Review of Social Media for Civic Education: Engaging Youth for Democracy: Amy L. Chapman, A Review of Social Media for Civic Education: Engaging Youth for*, Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/15512169.2025.2478380>
- Kamga, B. F., Kokam, D., & Nchofoung, T. N. (2021). *Social media and political instability: Some empirical evidence*. Economics Bulletin.
- Kubin, E., & Sikorski, C. V. (2021). *The role of (social) media in political polarization: a systematic review*. Annals of the International.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2002). *Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide*. New Media & Society, 9(4), 671–696.

- Neyasyah, M. S. (2020). *Legal Resilience in the Phenomenon of Social Media Political Buzzer in Indonesia*. 3rd International Conference on Law And.
- Pangrazio, L., & Godhe, A. L. (2020). *What is digital literacy? A comparative review of publications across three language contexts*. E-Learning and Digital. <https://doi.org/10.1177/2042753020946291>
- Sunstein, C. R. (2022). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). *Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency*. Learning, media and technology, Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641>
- Wolfsfeld, G. (2022). *Making Sense of Media and Politics: Five Principles in Political Communication* (2nd ed.). <https://doi.org/10.4324/9781003176657>
- Zhuravskaya, E., Petrova, M., & Enikolopov, R. (2020). *Political effects of the internet and social media*. Annual Review of Economics, 12, 415–438.

BAB 4

BIAS DAN DISINFORMASI: ANCAMAN MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK

Hendy Achmad Reynaldi, S.I.P.
Victoria University of Wellington
E-mail: reynalhend@myvuw.ac.nz

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media mengintensifikasi terselenggaranya pendidikan politik, terutama untuk kalangan pemuda. Berkembang pesatnya teknologi media baru atau *new media technology* berupa peranti-peranti komunikasi digital—misalnya platform media sosial, situs web, dan sebagainya—yang melahirkan konten-konten interaktif dan *user-generated*, merevolusi bagaimana informasi dihasilkan, dibagikan, dan dikonsumsi termasuk dalam konteks praktik pendidikan politik. Sebagai contoh, beberapa perguruan tinggi di Tiongkok telah mendayagunakan akun resmi WeChat universitas yang menyajikan berita politik terkini, diskusi topik hangat, dan konten-konten relevan lainnya sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi, melainkan juga terlibat secara aktif dalam diskusi politis dan refleksi ideologis (Yuan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pelajar atau mahasiswa dapat menjadi semakin kuat partisipasinya dalam proses pendidikan politik. Dengan demikian, teknologi media baru bukan sekadar menjadi peranti penyebar informasi, tetapi juga menjadi ruang interaktif yang mampu menumbuhkan kesadaran politik dan nilai-nilai ideologis di kalangan generasi muda secara lebih efektif.

Di luar lingkup pendidikan formal, intensifikasi penyelenggaraan pendidikan politik juga terjadi melalui platform

media edukasi lewat hiburan atau *edutainment*. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah akun Instagram @pinterpolitik yang menyajikan informasi politik dalam format visual menarik seperti infografis, video pendek, dan animasi. Pendekatan ini bukan hanya menyampaikan konten informatif, tetapi juga menarik perhatian pemuda dari kalangan generasi Z yang cenderung lebih responsif terhadap konten visual di media sosial (Maulana et al., 2024). Dengan gaya penyampaian yang ringan namun tetap berbobot, konten *edutainment* semacam ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi politik anak-anak muda, membangun kesadaran kritis, dan mendorong partisipasi mereka dalam diskursus politik secara proaktif. Dengan kata lain, media sosial berbasis *edutainment* memiliki kedudukan dan legitimasi perannya sendiri dalam konteks pendidikan politik di era digital.

Bak pisau bermata dua, terdapat dualitas eksistensi dari teknologi media baru itu sendiri yang mana pada satu sisi peranti ini memberikan banyak manfaat terhadap praktik pendidikan politik, tetapi ia juga berpotensi menjadi sumber ancaman dan bahaya pada saat yang sama. Media sosial seperti Facebook dan X (sebelumnya 'Twitter') memang memungkinkan partai politik dan figur publik menjangkau khalayak ramai secara langsung, membingkai opini publik, dan mendorong partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, sedikitnya regulasi terhadap penyebaran informasi palsu membuka celah bagi propaganda politik yang dapat memanipulasi persepsi publik dan tersebar disinformasi yang dapat memperlemah kualitas demokrasi. Melalui risetnya tentang konsolidasi demokrasi di Nigeria, Goddy Uwa dan Christianah Ronk (2023) menunjukkan bahwa media sosial sebagai sarana komunikasi yang efisien juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten menyesatkan lewat akun palsu, bot, atau *framing* berita yang penuh bias. Semua orang perlu

menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi memerlukan literasi digital dan etika bermedia agar fungsinya sebagai peranti pendidikan politik tidak berubah menjadi senjata yang dapat memecah belah masyarakat dan mendelegitimasi institusi demokrasi di suatu wilayah.

Lebih lanjut, sisi gelap dari perkembangan teknologi media baru ini membuka ruang lebar bagi munculnya fenomena *post-truth*, sebuah keadaan di mana bias emosional dan keyakinan personal mengalahkan fakta objektif. Secara lebih spesifik, fenomena *post-truth* merujuk pada keadaan ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh emosi ketimbang fakta sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang relatif dan terpinggirkan. Menurut perspektif Lee McIntyre, fenomena *post-truth* meniscayakan kebohongan yang diulang terus-menerus di media sosial bahkan dapat dianggap sebagai kebenaran, terutama jika informasi hoaks tersebut sejalan dengan identitas atau keyakinan kelompok tertentu (Ressa, 2021). Hal ini diperparah oleh peran algoritma sejumlah platform media sosial yang lebih menonjolkan konten yang lebih sesuai dengan kecenderungan emosional pengguna sehingga menimbulkan bias dan *filter bubble* sehingga menyebabkan keterasingan intelektual. Alih-alih menjadi alat pencerdasan publik, media sosial dalam hal ini berpotensi menjadi sarana manipulasi psikologis massal yang dapat menyesatkan persepsi masyarakat akan kenyataan sebagaimana adanya.

Media sebagai alat sejatinya bersifat netral, artinya baik atau buruknya tergantung seberapa bijak manusia mempergunakannya, termasuk dalam urusan pendidikan politik. Bab ini mencoba menjelaskan secara koheren mengapa media melalui fenomena *post-truth* sebagai sumber ancaman dapat memengaruhi praktik pendidikan politik pada masa kini. Lebih lanjut, bab ini juga mencakup bagaimana proses hubungan kausal di antara kedua variabel tersebut berlangsung. Jawaban

atas kedua identifikasi masalah tersebut diharapkan dapat memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan basis pengetahuan bagi masyarakat dalam menyikapi dengan bijak adanya ancaman media tat kala menyelenggarakan pendidikan politik.

DINAMIKA FENOMENA POST-TRUTH DALAM MEDIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK

Secara sederhana, perkembangan teknologi baru yang melahirkan fenomena *post-truth* di mana opini publik lebih dibentuk oleh emosi dan keyakinan pribadi daripada fakta objektif, kemudian memunculkan problematika turunan dalam bentuk bias dan disinformasi. Bias kognitif berupa kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu hal, orang, atau kelompok tertentu daripada yang lain dengan cara kurang adil akan menjadi fondasi psikologis yang mendorong seseorang untuk menolak bukti nyata dan tetap berpegang pada keyakinan yang keliru (McIntyre, 2018). Sementara itu, disinformasi sebagai bentuk informasi salah yang disebarkan secara sengaja dan cepat melalui dinamika konten-konten viral di media sosial akan memperkuat efek kontaminasi sosial yang membingungkan banyak orang (Urs, 2024). Kedua hal ini memperlihatkan bahwa informasi yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya terancam oleh kesalahan yang tidak disengaja, melainkan juga oleh upaya sadar untuk menyesatkan. Lantas, sejauh mana bias dan disinformasi menjadi sebegitu mengancam terhadap praktik pendidikan politik?

Bias sebagai Ancaman Pendidikan Politik

Terhadap pendidikan politik, sebuah bias dapat menciptakan pemahaman yang keliru tentang isu-isu politik dan menurunkan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara

aktif dalam proses demokrasi. Bias-bias kognitif seperti *confirmation bias*, *motivated reasoning*, dan *backfire effect* membuat seseorang cenderung mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang selaras dengan keyakinan awalnya untuk mempertahankan identitas dan kenyamanan emosional, bahkan ketika dihadapkan pada fakta yang bertentangan sekalipun (McIntyre, 2018). Jika tidak ditangani secara kritis, sebuah bias dapat membingkai opini publik yang tidak etis dan memperkuat propaganda tertentu (Susilawati & Kurnia, 2024). Pendidikan politik tidak semestinya sekadar mengajarkan substansi politik, tetapi juga perlu membekali para pembelajarnya dengan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran epistemologis supaya mereka mampu mengenali serta menanggulangi bias informasi dengan mengedepankan etika dan tanggung jawab.

Contoh nyata mengenai bias sebagai penyebab terancamnya pendidikan politik dapat dilihat pada kasus bias media dalam pemilihan umum presiden Iran tahun 2017. Dalam kasus ini, bias media mengemuka dalam tiga bentuk, yakni *gatekeeping bias*, *coverage bias*, dan *statement bias*. Studi oleh Ameli dan Molaei (2020) terhadap saluran Telegram AkhbareFori menunjukkan kecenderungan signifikan media ini yang mendukung kelompok reformis dibanding konservatif kendati kanal ini tidak secara gamblang terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Hal ini terbukti lewat temuan adanya sebagian besar total pemberitaan yang diarahkan pada kandidat reformis dan hanya sebagian kecil sisanya pada kandidat konservatif dengan proporsi pemberitaan positif untuk kelompok reformis yang dua kali lebih banyak dibanding untuk kelompok konservatif (Ameli & Molaei, 2020). Studi ini menandakan bahwa bias informasi di media sosial sekalipun tidak disengaja tetap dapat membingkai opini publik secara tidak adil. Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, perihal semacam ini

mengkhawatirkan karena dapat memunculkan persepsi yang keliru tentang proses demokrasi dan melemahkan kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan politik yang independen dan rasional.

Berdasarkan kasus di atas, terdapat tiga macam bias yang dapat diciptakan oleh suatu media dalam konteks kontestasi politik. Pertama, *gatekeeping bias* terjadi ketika media memilah-milah sumber berita yang cenderung berpihak pada kelompok tertentu sehingga narasi politik yang disajikan menjadi tidak berimbang. AkhbareFori menciptakan bias ini dengan cara menyeleksi lebih dari 19% sumber berita dari media *mainstream* yang berafiliasi dengan kelompok reformis, sedangkan hanya 16,8% dari pihak konservatif (Ameli & Molaei, 2020). Ke dua, *coverage bias* merujuk pada perbedaan jumlah atau proporsi pemberitaan masing-masing kelompok politik yang tidak seimbang. AkhbareFori diketahui memberikan porsi 39% berita tentang kelompok reformis dan 29,7% mengenai pihak konservatif (Ameli & Molaei, 2020). Ke tiga, *statement bias* muncul melalui nada penyampaian berita liputan. AkhbareFori ditemukan telah menyampaikan 24% dari berita kelompok reformis dengan nada positif yang mana persentase ini dua kali lipat lebih besar dibanding 13,4% berita positif tentang pihak konservatif, sedangkan kelompok reformis hanya menerima 4,5% berita negatif dibanding 8,2% bagi pihak konservatif (Ameli & Molaei, 2020). Ketiga bias ini menrepresentasikan bahwa pola pemberitaan AkhbareFori mencerminkan keberpihakan terselubung meskipun tidak menyatakan afiliasi politik secara eksplisit. Ketidakseimbangan semacam ini dapat menyesatkan persepsi publik dan menciptakan ilusi objektivitas yang membahayakan proses pendidikan politik.

Bias merupakan tantangan serius yang mengancam kualitas pendidikan politik di tengah pengaruh fenomena *post-truth*. Secara psikologis, bias-bias kognitif pada dasarnya terbentuk

karena kecenderungan manusia untuk merasa nyaman secara emosional dan condong terhadap identitas kelompok tertentu sekalipun harus mengabaikan fakta objektif (McIntyre, 2018). Pada praktiknya, bias ini tidak hanya tercermin dalam perilaku perorangan, tetapi juga terwujud dalam pemberitaan media yang tidak seimbang sebagaimana kasus AkhbareFori pada pemilu Iran 2017. Disadari atau tidak, manakala media menghadirkan narasi yang tidak netral, maka masyarakat pun rentan terjebak dalam ilusi objektivitas dan mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis. Maka dari itu, pendidikan politik yang etis harus mencakup literasi digital dan pembelajaran reflektif tentang cara kerja sebuah bias supaya masyarakat mampu membangun resiliensi epistemologis dan bersikap rasional di tengah derasnya arus informasi yang penuh manipulasi.

Disinformasi sebagai Ancaman Pendidikan Politik

Disinformasi sebagai upaya sadar dalam penyampaian informasi yang salah guna membingungkan orang lain tentu menjadi ancaman bagi pendidikan politik. Jika misinformasi dipahami sebagai penyampaian informasi yang salah tanpa unsur kesengajaan, maka disinformasi melibatkan niat manipulatif untuk menyesatkan audiens dan membentuk persepsi yang keliru atas realitas. Pada era hiperkonektivitas seperti sekarang ini, disinformasi tidak hanya menyebar melalui saluran digital secara cepat, tetapi juga didorong oleh struktur algoritmik yang menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber* sehingga membatasi keberagaman informasi yang diterima oleh seseorang (Bertoli et al., 2025). Hal ini memungkinkan narasi palsu tersebar luas mengingat dapat diperkuat oleh aktor politik, influencer digital, bahkan platform media sosial yang melakukan monetisasi terhadap perhatian publik (Seo, 2024). Sebagai akibatnya, proses pembentukan opini publik menjadi penuh bias dan bersifat manipulatif serta mengganggu tujuan utama

pendidikan politik sebagai sarana pencerdasan warga negara. Jika tidak dikendalikan dengan baik, disinformasi dapat menurunkan kualitas partisipasi demokratis dan memperparah fragmentasi sosial dalam masyarakat.

Di Indonesia, disinformasi pernah menjadi salah satu permasalahan serius pada pergolakan narasi politik selama pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Disinformasi bukan hanya merusak kualitas informasi publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memobilisasi dukungan emosional dan menciptakan persepsi palsu di tengah masyarakat. Melalui penelitiannya, Jatmiko (2019) mengungkapkan bahwa beragam narasi tidak berdasar seperti tuduhan manipulasi *quick count*, klaim kontainer surat suara tercoblos, dan propaganda *people power* diproduksi dan disebarluaskan secara masif melalui media sosial oleh oknum kubu politik tertentu. Praktik ini mencerminkan bahwa disinformasi membentuk wacana politik yang akan melahirkan bias dalam benak masyarakat. Sebagai akibatnya, bukan saja publik menjadi bingung dan terpecah belah, melainkan pula pendidikan politik menjadi terganggu karena tiap individu tidak lagi terlatih untuk berpikir kritis berdasarkan informasi yang valid sebab terbiasa menelan mentah-mentah narasi partisan yang dikemas secara manipulatif (Jatmiko, 2019). Dalam konteks demokrasi, situasi semacam ini merupakan ancaman serius bagi partisipasi politik yang rasional dan penuh pertimbangan.

Disinformasi dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 menyebar melalui mekanisme digital yang kompleks, mulai dari seleksi algoritmik hingga manipulasi emosional berbasis konten media sosial. Proses ini berlangsung dengan menanamkan narasi alternatif dalam ruang digital yang telah dipersonalisasi sesuai preferensi audiens. Jatmiko (2019) menuturkan bahwa media sosial seperti Facebook dan Twitter berperan besar dalam membentuk ekosistem informasi yang

tertutup di mana algoritma hanya menyajikan konten sesuai preferensi sebelumnya yang dapat memperkuat bias informasi. Dalam ruang digital, narasi emosional seperti propaganda *people power* dan tuduhan kecurangan pemilu terus diulang-ulang tanpa dasar data objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi tetap diterima publik karena selaras dengan kecenderungan ideologis mereka (Jatmiko, 2019). Lebih dari sekadar penyebaran informasi palsu, strategi ini memberikan *framing* terhadap wacana politik sebagai perkecamukan persepsi, bukan pertukaran ide rasional. Cara kerja disinformasi seperti ini dapat mereduksi fungsi pendidikan politik menjadi konsumsi narasi emosional, memperlemah penalaran kritis masyarakat, dan akhirnya menurunkan deliberasi demokratis di ruang publik.

Penting untuk ditekankan bahwa disinformasi dapat menjadi ancaman sistemik terhadap pendidikan politik yang sehat dan seimbang. Disinformasi tidak hanya merusak kualitas informasi, tetapi juga menghambat proses berpikir kritis masyarakat serta memperkuat polarisasi sosial melalui penyebaran narasi yang menyesatkan. Di ruang digital, disinformasi sering kali diperkuat oleh algoritma digital yang menciptakan ruang informasi tertutup (Bertoli et al., 2025). Dalam rangka menghadapi tantangan ini, literasi budaya dan kewarganegaraan dapat menjadi pendekatan strategis dalam pendidikan politik. Literasi budaya menanamkan kesadaran atas keberagaman dan mendorong skeptisisme yang sehat terhadap informasi yang ekstrem, sedangkan literasi kewarganegaraan memperkuat pemahaman hak dan tanggung jawab warga negara serta meningkatkan partisipasi politik yang rasional dan etis (Sabina et al., 2023). Tataran teknis tidak cukup untuk memecahkan persoalan disinformasi karena aspek kognitif, etis, dan budaya yang berkelanjutan harus diberi perhatian lebih dalam praktik pendidikan politik.

Pada akhirnya, bias dan disinformasi di tengah lanskap fenomena *post-truth* dalam media merupakan sumber ancaman nyata bagi pendidikan politik yang demokratis dan berintegritas. Perihal ini tidak hanya mendistorsi kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga membuka jalan bagi aktor-aktor politik untuk memanipulasi persepsi publik lewat media yang seharusnya netral. Media massa yang kerap kali digunakan sebagai alat propaganda politik terutama oleh pemiliknya membuktikan bagaimana kekuatan media dapat diarahkan untuk membentuk citra politik secara sepihak dan menyesatkan masyarakat (Rahman et al., 2018). Dalam keadaan seperti ini, pendidikan politik tidak cukup hanya menyampaikan wacana normatif tentang demokrasi, tetapi juga harus menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran literasi. Literasi budaya dan kewarganegaraan menjadi solusi strategis untuk secara menyeluruh menanggulangi disinformasi yang memicu bias, di mana masing-masing berperan membantu individu untuk mengenali dan menghargai keberagaman serta memperkuat daya berpikir kritis dan etika dalam partisipasi politik (Sabina et al., 2023). Pendidikan politik harus bertransformasi menjadi pendidikan literasi multidimensional yang etis, kontekstual, dan reflektif.

KESIMPULAN

Memahami potensi ancaman media terhadap pendidikan politik menjadi sangat penting di tengah-tengah fenomena *post-truth* saat ini yang seakan-akan tidak dapat dihindari. Media bukan sekadar saluran informasi, melainkan juga aktor yang mampu membingkai opini publik secara emosional terutama ketika bias dan disinformasi merajalela melalui algoritma digital yang mempersempit diversitas informasi itu sendiri. Problematika seperti bias kognitif dan penyebaran disinformasi yang dikemas secara manipulatif lewat media sosial telah

terbukti mengganggu proses pendidikan politik yang sehat. Kontestasi pemilihan umum di berbagai wilayah menunjukkan bagaimana narasi-narasi keliru dapat memecah belah masyarakat dan menurunkan kemampuan berpikir kritis mereka. Penting bagi semua pihak—baik pendidik, pembuat kebijakan, maupun masyarakat pada umumnya—untuk mendorong transformasi pendidikan politik menjadi pendidikan literasi multidimensional yang mengedepankan refleksi. Pelibatan literasi budaya dan kewarganegaraan ke dalam pendidikan politik merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan masyarakat di hadapan manipulasi informasi serta memperkuat daya berpikir kritis dan etika dalam partisipasi politik. Dengan kata lain, memahami ancaman media berarti juga membekali masyarakat agar tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi subjek proaktif dalam upaya membangun demokrasi yang inklusif dan rasional.

Demi mengatasi ancaman bias dan disinformasi yang mengganggu jalannya pendidikan politik, institusi-institusi pendidikan disarankan secara aktif memadukan literasi media, budaya, dan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pembelajaran. Secara lebih spesifik, penerapan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam praktik pendidikan politik dapat dilakukan melalui pembelajaran interdisipliner yang menekankan analisis konten media, diskusi reflektif, serta peningkatan kapasitas dalam demokrasi digital. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas digital juga penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan politik yang tahan terhadap manipulasi. Lewat Langkah-langkah ini, masyarakat termasuk di dalamnya generasi muda akan lebih siap menghadapi kompleksitas informasi di tengah maraknya fenomena post-truth dan ikut serta menjaga integritas demokrasi melalui partisipasi politik yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameli, S. R., & Molaei, H. (2020). *Election Journalism: Investigating Media Bias on Telegram during the 2017 Presidential Election in Iran*. *Digital Journalism*, 8(8), 975–991. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1777881>
- Bertoli, J. M., Silva, E. R. da, Casarejos, F., & Rufin, C. R. (2025). *The Loss of a Common World: Disinformation, Post-Truth and Democratic Instability*. *Organizações & Sociedade*, 32(111). <https://doi.org/10.1590/1984-92302025v32n0002en>
- Goddy Uwa, O., & Christianah Ronke, A. (2023). *Social Media and Political Propaganda: A double-edged Sword for Democratic Consolidation in Nigeria*. *International Journal of Social Science, Management and Economics Research*, 01(02), 011–015. <https://doi.org/10.61421/ijssmer.2023.1201>
- Jatmiko, M. I. (2019). Post-Truth, Media Sosial, dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *Jurnal Tabligh*, 20(1), 21–39.
- Maulana, Y., Mu'arifah, A., & Nanda, S. E. (2024). Pengaruh Media Sosial Dan Kualitas Informasi Instagram @Pinterpolitik Terhadap Kebutuhan Informasi Politik Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 45–58. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i03.1539>
- McIntyre, L. (2018). Post-Truth. In *The MIT Press Essential Knowledge Series*. Massachusetts Institute of Technology. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>

- Rahman, F. A., Rouf, M. F., Asyahidda, F. N., & Hufad, A. (2018). Bias Politik Dibalik Sebuah Media : Relevansi Sosialisasi Politik Di Indonesia. *Sosietas*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14599>
- Ressa, Y. P. (2021). Kebenaran dan Media Sosial di Era Post-Truth dalam Perspektif Post-Truth McIntyre dan Linguistik Kultural George A. Lindbeck. *Jurnal Teologi Kontekstual Oikumenis*, 1(2), 43–58.
- Sabina, D., Dewi, D.A., dan Hayat, R.S. (2023). Implementasi Literasi Budaya dan Kewarganegaraan Sebagai Solusi Disinformasi Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(3), 295–300. <https://doi.org/10.62007/joupi.v1i3.219>
- Seo, D. (2024). *Much Ado about Disinformation: A Critical Approach to Coping with Information Manipulation in a Post-Truth World*. *Scientia Militaria*, 52(2), 105–120. <https://doi.org/10.5787/52-2-1467>
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). Etika dalam Pendidikan Politik (menghadapi bias dan propaganda). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(2), 93–112. <https://doi.org/10.61476/4mdpy810>
- Urs, S. R. (2024). *Disinformation in the Post-Truth Era: Epistemological Constructs, Social Contagion, and the Role of the iField*. *Journal of Information and Knowledge*, 61(5), 261–269. <https://doi.org/10.17821/srels/2024/v61i5/171580>
- Yuan, Z. (2023). *The Role of New Media Technology in the Innovation of Ideological and Political Education in Colleges and Universities*. *International Journal of Science and Engineering Applications*, 12(01), 41–43. <https://doi.org/10.7753/ijsea1201.1012>

BAB 5

PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN POLITIK

Darto Wahidin, S.Pd., M.Sc.
Universitas Pamulang
E-mail: dosen02827@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Permasalahan politik telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sejak zaman kuno. Dari sistem monarki yang dominan pada banyak peradaban awal hingga munculnya ideologi demokrasi modern, dinamika politik mengalami perubahan signifikan seiring berjalannya waktu. Banyak sejarah yang menunjukkan, momen-momen penting sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan, ketidakadilan sosial, atau krisis ekonomi. Salah satu contoh yang mencolok adanya Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, yang tidak hanya mengubah wajah politik Prancis, tetapi juga memberikan inspirasi bagi gerakan sosial dan politik di seluruh dunia (Itsmenicks, 2024).

Memasuki abad ke-20, pergeseran ideologis seperti komunisme, kapitalisme, dan nasionalisme mengubah cara masyarakat melihat dan terlibat dalam politik. Pasca Perang Dunia II, banyak negara baru merdeka mengalami pergolakan politik yang sering kali melibatkan generasi muda yang berjuang untuk hak asasi manusia dan kebebasan. Gerakan hak sipil di Amerika Serikat, misalnya, didorong oleh pemuda yang berani menentang diskriminasi dan ketidakadilan rasial (Carson, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemuda telah lama menjadi elemen penting dalam dinamika politik, meskipun peran konkret pemuda sering kali terabaikan dalam narasi besar sejarah.

Tantangan politik semakin kompleks pada era globalisasi saat ini. Isu-isu seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan migrasi massal memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat (Samsudin, 2023). Dalam konteks ini, pemuda menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan identitas, nilai-nilai, dan aspirasi politik. Munculnya media sosial juga telah mengubah cara pemuda berinteraksi dengan isu-isu politik, memungkinkan informasi tersebar lebih cepat dan luas daripada sebelumnya (Elizamiharti & Nelfira, 2023). Hubungan antara pemuda dan permasalahan politik saat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas (Nowak, 2021). Ketidakpuasan terhadap pemerintahan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan sering kali memicu keterlibatan pemuda dalam isu-isu politik. Pada banyak negara, pemuda merasa terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan rasa frustrasi dan keinginan untuk berpartisipasi dalam perubahan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami bagaimana pemuda melihat dirinya sendiri dalam konteks politik. Banyak yang merasa bahwa suara pemuda tidak didengar, dan hal ini menciptakan kesenjangan antargenerasi. Sementara pemuda memiliki potensi untuk memengaruhi masa depan politik, pemuda sering kali dihadapkan pada sistem yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka (Irwandi et al., 2023). Ketidakpuasan ini dapat berujung pada gerakan protes, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap status quo dan keinginan untuk reformasi (Dewi, 2024).

Fenomena ini terlihat di berbagai belahan dunia, di mana demonstrasi dan gerakan sosial sering kali dipimpin oleh pemuda. Dari *Arab Spring* hingga gerakan *Black Lives Matter*, keterlibatan pemuda dalam protes sosial menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya peduli terhadap isu-isu yang memengaruhi

kehidupannya, tetapi juga memiliki keberanian untuk menuntut perubahan (Fullam, 2016). Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal dukungan dan sumber daya untuk memfasilitasi partisipasi politik yang lebih luas.

Di tengah perubahan ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan dan pemberdayaan dapat membantu pemuda untuk lebih terlibat dalam politik (Riyanti et al., 2023). Pendidikan yang berkualitas dan akses terhadap informasi yang benar dapat meningkatkan kesadaran politik pemuda, memungkinkan pemuda untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan (Lestari et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara generasi yang lebih tua dan pemuda dalam menciptakan ruang dialog yang konstruktif dapat mengurangi kesenjangan generasi dan menciptakan jembatan untuk pemahaman yang lebih baik.

Dalam konteks negara berkembang, di mana tantangan ekonomi dan sosial lebih mendalam, pemuda sering kali berada di garis depan perubahan. Namun, untuk menjadi agen perubahan yang efektif, pemuda memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemerintah (Faradila et al., n.d.). Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak pemuda, akses terhadap pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Perubahan politik tidak akan terjadi tanpa adanya upaya sadar dari semua elemen masyarakat. Pemuda memiliki potensi untuk menjadi katalisator dalam proses ini, tetapi tantangan yang dihadapi harus ditangani secara holistik. Dengan memahami permasalahan politik dari masa ke masa dan hubungan yang kompleks antara pemuda dan isu-isu politik, langkah-langkah yang lebih strategis dapat diambil untuk memberdayakan generasi muda dalam menghadapi tantangan yang ada (Fahrezi et al., 2023).

Permasalahan-permasalahan tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan tulisan ini. Tujuan tulisan ini berfokus pada

dua aspek utama yang berkaitan dengan keterlibatan pemuda dalam politik. Pertama, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam arena politik, dengan mempertimbangkan elemen-elemen sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik generasi muda. Kedua, tulisan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari partisipasi pemuda terhadap perubahan kebijakan publik, dengan mengkaji bagaimana suara dan tindakan pemuda dapat mempengaruhi keputusan politik dan mengarah pada transformasi dalam kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui analisis mendalam terhadap kedua aspek ini, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan yang berarti mengenai peran vital pemuda dalam proses politik kontemporer.

Terdapat beberapa tulisan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan, pertama penelitian yang dilakukan oleh Alhadar et al. (2023) yang berjudul “Peningkatan Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Akan Politik di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango”. Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali peran pemuda dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa. Kelebihan penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung tentang peran pemuda dalam konteks desa, namun kekurangannya hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi karena terbatas pada satu desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tresnani & Adhitya (2024) yang berjudul “Optimalisasi Keterlibatan Pemuda sebagai Generasi Perubahan dalam Sistem Demokrasi Melalui Pemilihan Umum 2024”. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menyediakan analisis mendalam mengenai peran pemuda dalam pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi. Kelebihan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemuda dalam konteks demokrasi,

namun kekurangannya fokus pada pemilu 2024 sehingga tidak mencakup aspek jangka panjang.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Azmy et al. (2024) yang berjudul “Peran Pemuda Sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Pergerakan Nasional”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi peran pemuda dalam berbagai aspek perubahan sosial dan politik. Kelebihan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang peran pemuda dalam konteks nasional, namun kekurangannya tidak membahas faktor eksternal yang mempengaruhi peran pemuda secara menyeluruh.

Tulisan ini memiliki kesamaan dengan beberapa tulisan dari hasil penelitian terdahulu tersebut (Alhadar et al., 2022; Azmy et al., 2024; Tresnani & Adhitya, 2023) dalam hal fokus pada peran pemuda sebagai agen perubahan dalam konteks politik. Seperti yang terlihat pada penelitian Alhadar et al. (2022) ada penekanan pada peran pemuda dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, penelitian Tresnani & Adhitya (2023) juga membahas keterlibatan pemuda dalam pemilu, yang sejalan dengan tujuan tulisan ini untuk menganalisis partisipasi pemuda dalam arena politik. Semua tulisan dari hasil penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya pemuda dalam memengaruhi dinamika sosial dan politik di masyarakat.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan yang diambil. Tulisan ini tidak hanya fokus pada satu aspek, seperti kesadaran politik atau pemilu, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi partisipasi pemuda. Sementara penelitian Azmy et al. (2024) menyoroti peran pemuda dalam pergerakan nasional, tulisan ini lebih menekankan evaluasi dampak dari partisipasi pemuda terhadap kebijakan publik, yang mencakup analisis yang lebih luas mengenai bagaimana tindakan pemuda dapat memengaruhi keputusan politik secara langsung.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan analisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dengan evaluasi dampak dari keterlibatan pemuda dalam kebijakan publik. Tulisan ini berupaya memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara partisipasi pemuda dan perubahan kebijakan, serta menjelaskan bagaimana suara generasi muda dapat menjadi kekuatan transformasi yang signifikan dalam konteks politik kontemporer. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pemahaman tentang peran vital pemuda dalam proses politik yang lebih responsif dan inklusif.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLIBATAN PEMUDA DALAM POLITIK

Terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam arena politik dengan mempertimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan sosial yang mendukung memiliki dampak besar terhadap sikap politik pemuda.

Keluarga merupakan salah satu faktor paling awal yang membentuk kesadaran politik (Wahyu, 2022). Ketika pemuda dibesarkan dalam keluarga yang aktif secara politik, nilai-nilai tersebut sering kali ditransfer kepada individu masing-masing. Diskusi tentang isu-isu politik di rumah, serta keterlibatan orang tua dalam kegiatan politik, menciptakan suasana yang memungkinkan pemuda untuk memahami pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Sebaliknya, pemuda yang tumbuh dalam lingkungan yang apatis terhadap politik cenderung menganggap politik sebagai hal yang tidak relevan, sehingga mengurangi motivasi untuk berpartisipasi.

Peran teman sebaya juga sangat penting dalam membentuk sikap politik. Hubungan sosial di kalangan teman-teman dapat

memengaruhi keputusan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan politik (Tasari, 2013). Ketika kelompok teman memiliki minat yang tinggi terhadap isu-isu politik, pemuda yang tergabung dalam kelompok tersebut lebih cenderung untuk ikut serta dalam diskusi atau aksi politik. Keberadaan jaringan sosial yang positif dapat mendorong pemuda untuk lebih aktif berpartisipasi, sedangkan teman-teman yang apatis dapat menciptakan pengaruh negatif yang menjauhkan pemuda dari kegiatan politik.

Komunitas lokal turut berkontribusi dalam membentuk keterlibatan pemuda. Di daerah-daerah di mana organisasi masyarakat sipil aktif dan terdapat program-program partisipasi, pemuda lebih mungkin untuk terlibat dalam politik. Forum-forum diskusi, program pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial lainnya dapat memberikan kesempatan bagi pemuda untuk berlatih dan belajar tentang pentingnya keterlibatan politik (Pratama et al., 2024). Keberadaan inisiatif komunitas yang mendorong partisipasi politik dapat memperkuat rasa tanggung jawab pemuda terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi juga memainkan peran sentral dalam menentukan tingkat partisipasi pemuda. Tingkat pendidikan dan latar belakang ekonomi keluarga sering kali menjadi indikator utama seberapa besar pemuda dapat terlibat dalam politik. Pemuda yang berasal dari keluarga dengan pendidikan yang baik cenderung memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan yang tinggi sering kali berhubungan dengan kesadaran politik yang lebih tinggi, serta kemampuan untuk memahami isu-isu kompleks yang dihadapi oleh masyarakat (Brutu et al., 2024). Di sisi lain, pemuda yang menghadapi kesulitan ekonomi sering kali terfokus pada masalah pribadi dan mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan dan apatisme terhadap sistem politik (Kurnia et al., 2025). Dalam situasi seperti ini, perhatian pemuda cenderung lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada isu-isu politik. Namun, dalam beberapa kasus, kondisi ekonomi yang buruk juga dapat memotivasi pemuda untuk terlibat dalam politik. Ketika merasakan ketidakadilan sosial, pemuda yang terpinggirkan secara ekonomi sering kali menjadi lebih sadar akan ketidakadilan dan berupaya memperjuangkan perubahan.

Faktor budaya juga memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap dan perilaku politik pemuda. Nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi yang dianut oleh masyarakat dapat membentuk cara pemuda memandang politik (Safitri et al., 2023). Dalam beberapa budaya, keterlibatan politik dianggap sebagai tanggung jawab sosial, sementara di budaya lainnya, partisipasi politik bisa dipandang skeptis atau bahkan tidak penting. Budaya politik yang ada di suatu negara atau komunitas memengaruhi cara pemuda berinteraksi dengan politik. Banyak negara yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat, pemuda cenderung lebih terlibat dalam proses politik dibandingkan dengan negara yang memiliki sistem otoriter.

Media juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya politik di kalangan pemuda. Dengan akses yang lebih besar terhadap informasi melalui media sosial dan platform digital, pemuda dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang isu-isu politik dan berpartisipasi dalam diskusi (Saad et al., 2020). Namun, media juga dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Ketidakpastian informasi yang beredar di media sosial dapat mengurangi keinginan pemuda untuk terlibat dalam politik.

Pendidikan menjadi elemen kunci yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik pemuda. Pemuda yang mendapatkan

pendidikan yang baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (Jannah dan Sulianti, 2021). Pendidikan politik yang diberikan di sekolah dan universitas dapat meningkatkan kesadaran politik serta kemampuan analitis yang diperlukan untuk memahami isu-isu kompleks. Program pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dapat membantu membentuk karakter pemuda yang aktif secara politik (Riyanti et al., 2023). Meskipun pendidikan formal berperan penting, kurangnya pendidikan yang memadai tentang isu-isu politik dapat menjadi hambatan bagi partisipasi pemuda. Kontribusi kaum muda bisa saja terhambat jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, yang dapat menyebabkan partisipasi yang kurang aktif (Tresnani dan Adhitya, 2023). Ketika pendidikan tidak memberikan ruang untuk membahas politik secara terbuka, pemuda mungkin merasa tidak siap atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan politik yang berkualitas menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dan pelatihan bagi pendidik agar dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya keterlibatan politik (Affandi et al., 2019).

Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara pemuda berinteraksi dengan politik. Media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, mengorganisir acara, dan membangun komunitas di sekitar isu-isu politik. Pemuda yang aktif di media sosial sering kali menjadi penggerak utama dalam kampanye politik, protes, dan gerakan sosial (Andriyendi et al., 2023). Keterlibatan melalui media sosial memungkinkan pemuda untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi secara lebih luas. Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif. Penyebaran

informasi yang salah dan berita palsu dapat menciptakan kebingungan dan apatisme di kalangan pemuda (Oktavian & Sulistyowati, 2024). Ketidakpastian informasi yang beredar di media sosial dapat mengurangi kepercayaan pemuda terhadap institusi politik dan memperlemah niat mereka untuk terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk memiliki keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi yang diterima.

Keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik juga berkontribusi pada partisipasi politik. Organisasi-organisasi ini sering kali menyediakan ruang bagi pemuda untuk belajar tentang isu-isu politik, berlatih kepemimpinan, dan membangun jaringan. Melalui partisipasi dalam organisasi, pemuda dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam proses politik (Suwarji, 2022). Organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok kepemudaan lainnya berfungsi sebagai jembatan antara pemuda dan dunia politik. Kegiatan yang diadakan oleh organisasi ini, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye, dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong pemuda untuk mengambil tindakan (Suwarji, 2022). Namun, tantangan tetap ada. Beberapa pemuda mungkin merasa bahwa organisasi politik tidak relevan dengan kehidupan pemuda sehari-hari atau tidak mampu mewakili aspirasinya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk beradaptasi dan menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pemuda.

DAMPAK PARTISIPASI PEMUDA TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK

Partisipasi pemuda dalam politik sering kali terlihat melalui berbagai bentuk aksi, mulai dari demonstrasi hingga kampanye sosial. Aksi-aksi ini tidak hanya mencerminkan pendapat pemuda, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu

yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh nyata dapat ditemukan dalam gerakan iklim global yang diprakarsai oleh pemuda, di mana suara pemuda berhasil menarik perhatian media dan pembuat kebijakan (Manurung, 2025). Melalui kampanye yang terorganisir, pemuda berhasil memengaruhi agenda politik dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi perubahan iklim. Gerakan ini menunjukkan bahwa ketika pemuda bersatu dan bersuara, dampaknya dapat jauh lebih besar daripada yang diperkirakan.

Di tingkat lokal, partisipasi pemuda dalam forum-forum komunitas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kebijakan (Agustina dan Sukmana, 2023). Pemuda yang terlibat dalam organisasi masyarakat sipil sering kali memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pengambil keputusan. Melalui dialog dan advokasi, pemuda dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mungkin tidak terwakili. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemuda berhasil memengaruhi kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan dengan mengajukan usulan yang berdasarkan penelitian dan pengalaman langsung di lapangan. Ketika pemuda terlibat dalam proses pengambilan keputusan, suara pemuda menjadi bagian penting dari kebijakan yang dihasilkan. Terkait dengan organisasi masyarakat, Karang Taruna adalah lembaga yang berfungsi sebagai mitra desa. Di dalamnya, terdapat anggota yang mayoritas adalah generasi muda, yang memiliki potensi untuk menjadi pelopor utama dalam mendorong gerakan-gerakan inovasi terhadap struktur nilai politik di masyarakat (Alhadar et al., 2022).

Namun, tidak semua suara pemuda didengar dengan cara yang sama. Terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam upaya untuk memengaruhi kebijakan publik. Salah satu tantangan utama, kurangnya akses terhadap platform yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Meskipun media

sosial memberikan ruang bagi pemuda untuk berbagi pandangan, tidak semua pemuda memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi (Haniko et al., 2023). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam representasi suara yang dapat memengaruhi efektivitas partisipasi pemuda. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa semua pemuda, terutama yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap saluran partisipasi politik.

Keterlibatan pemuda dalam kampanye politik juga menjadi indikator penting dari dampak pemuda terhadap perubahan kebijakan. Banyak pemuda yang terjun ke dalam dunia politik sebagai calon legislatif atau anggota partai politik (Suwarji, 2022). Melalui posisi ini, pemuda memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan secara langsung. Dalam beberapa kasus, pemuda yang terpilih sebagai wakil rakyat berhasil memperjuangkan isu-isu yang penting bagi generasi muda, seperti pendidikan, lingkungan, dan lapangan kerja. Ketika pemuda duduk di meja perundingan, pemuda dapat membawa perspektif baru yang lebih segar dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, partisipasi pemuda dalam pemilihan umum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil politik (Setiawan & Djafar, 2023). Ketika pemuda berbondong-bondong memilih, hal ini dapat mengubah arah hasil pemilu. Pemuda yang aktif memilih dapat memengaruhi kebijakan partai politik dengan menuntut perhatian lebih pada isu-isu yang menjadi prioritasnya. Dengan menunjukkan kekuatan suara dalam pemilihan umum, pemuda dapat mendorong partai politik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi pemuda. Fenomena ini terlihat pada pemilu pada beberapa negara, di mana peningkatan partisipasi pemilih muda berdampak pada pergeseran kebijakan yang lebih progresif.

Dampak dari partisipasi pemuda juga terlihat dalam gerakan sosial yang lebih luas. Ketika pemuda terlibat dalam gerakan sosial, seperti protes atau kampanye kesadaran, pemuda dapat memobilisasi masyarakat untuk mendukung perubahan kebijakan. Contoh yang jelas dapat dilihat dalam gerakan *Black Lives Matter*, di mana pemuda memainkan peran sentral dalam menyebarkan pesan dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak (Wibowo, 2024). Gerakan-gerakan ini tidak hanya berhasil menarik perhatian publik terhadap isu-isu penting, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

Perubahan kebijakan yang dipicu oleh partisipasi pemuda sering kali melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, pemuda bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Kerja sama ini memungkinkan pemuda untuk memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memperkuat suara yang kuat. Melalui pendekatan kolaboratif, pemuda dapat memperluas jangkauan pengaruhnya dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun partisipasi pemuda dalam perubahan kebijakan publik memiliki banyak potensi, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adanya ketidakpastian politik dan perubahan lingkungan yang cepat (Margiansyah, 2020). Ketika situasi politik berubah, prioritas kebijakan juga dapat berubah. Pemuda yang sebelumnya aktif dalam advokasi mungkin merasa kehilangan arah atau tidak lagi relevan. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah strategi dapat memastikan

bahwa suara pemuda tetap didengar dalam konteks yang terus berubah.

Aspek lain yang tidak kalah penting adanya pendidikan politik. Pendidikan yang baik dapat membekali pemuda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kebijakan publik (Riyanti et al., 2023). Dengan pemahaman yang baik tentang proses politik, pemuda dapat lebih mudah mengevaluasi isu-isu yang ada dan menyusun argumen yang kuat untuk mendukung perubahan. Pendidikan juga dapat mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial, meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kaum muda yang memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai agen perubahan sosial biasanya memiliki semangat yang besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan perubahan yang diharapkan (Azmy et al., 2024).

Peran media dalam membentuk persepsi publik juga patut dicermati. Media memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini masyarakat dan membentuk narasi seputar isu-isu politik (Setiawan dan Djafar, 2023). Ketika media meliput aksi pemuda dan gerakan sosial dengan cara yang positif, hal ini dapat meningkatkan visibilitas isu-isu yang diangkat oleh pemuda. Sebaliknya, media yang cenderung mengabaikan suara pemuda atau memandangnya dengan skeptis dapat menciptakan hambatan dalam upaya pemuda untuk memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk memahami cara media bekerja dan memanfaatkan platform yang ada untuk menyampaikan pesan kepada publik.

Partisipasi pemuda dalam politik juga berhubungan erat dengan identitas dan aspirasi. Pemuda sering kali memiliki visi yang berbeda tentang masa depan dan perubahan yang diinginkan. Ketika pemuda dapat mengekspresikan identitas mereka melalui partisipasi politik, hal ini membuka ruang untuk

diskusi yang lebih luas tentang nilai-nilai dan prioritas yang dianggap penting (Setiawan & Djafar, 2023). Pemuda yang merasa bahwa identitas dan aspirasinya diakui dalam kebijakan publik cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik.

Dalam beberapa kasus, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi kebijakan yang lebih luas (Muqsith, 2019). Ketika pemuda berhasil menciptakan momentum dan menggerakkan masyarakat, hal ini dapat berujung pada perubahan sistemik yang lebih mendalam. Misalnya, gerakan yang diprakarsai oleh pemuda dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga lingkungan. Dengan menggabungkan suara dan tindakan, pemuda dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dampak dari partisipasi pemuda dalam kebijakan publik tidak hanya terlihat di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat internasional. Pemuda yang terlibat dalam gerakan global sering kali mampu memengaruhi kebijakan di negara-negara lain. Misalnya, gerakan pemuda untuk keadilan iklim telah berhasil mendorong negara-negara untuk lebih ambisius dalam upaya mengatasi perubahan iklim (Manurung, 2025). Ketika pemuda dari berbagai negara bersatu untuk menyuarakan kepentingan bersama, dampaknya dapat melampaui batas-batas negara dan memengaruhi kebijakan global.

Melalui berbagai bentuk partisipasi, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam kebijakan publik. Meskipun tantangan tetap ada, peluang untuk memengaruhi keputusan politik terus berkembang. Dengan mengakui pentingnya suara pemuda dan memberikan ruang bagi keterlibatan, masyarakat dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan adil. Partisipasi pemuda tidak hanya membawa perubahan bagi

generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

KESIMPULAN

Keterlibatan pemuda dalam politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk elemen sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan sosial yang mendukung, seperti keluarga dan teman, berperan penting dalam membentuk kesadaran politik. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil dan pendidikan yang baik merupakan faktor kunci yang mendorong pemuda untuk berpartisipasi secara aktif. Ketika pemuda merasa bahwa suara dan tindakannya dapat memengaruhi kebijakan publik, motivasi untuk terlibat dalam politik meningkat secara signifikan. Dampak dari partisipasi ini terlihat dalam berbagai gerakan sosial yang berhasil mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran dari tulisan ini, untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam politik perlu adanya program pendidikan politik yang lebih komprehensif di sekolah dan universitas. Pendidikan yang mengajarkan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta keterampilan dalam analisis dan advokasi politik, akan membekali pemuda dengan pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat secara efektif. Selain itu, media sosial harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengedukasi dan mengorganisir pemuda, memastikan bahwa informasi yang akurat dan relevan dapat diakses dengan mudah. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah juga penting untuk menciptakan platform yang memungkinkan pemuda menyampaikan aspirasi dan ide-idenya.

Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan ruang yang mendukung partisipasi pemuda di berbagai level, baik lokal maupun nasional. Kebijakan yang mendorong keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan harus ditetapkan,

termasuk penyediaan akses yang lebih baik kepada pemuda dari berbagai latar belakang. Dengan memberikan dukungan yang diperlukan, serta mengakui dan menghargai kontribusi pemuda dalam proses politik, masyarakat dapat membangun generasi yang lebih aktif dan terlibat dalam membentuk kebijakan yang adil dan responsif. Transformasi kebijakan yang lebih inklusif akan tercapai apabila suara pemuda diintegrasikan secara sistematis dalam setiap tahap proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. N., Sulistyaningsih, T., & Hijri, Y. S. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://www.semanticscholar.org/paper/PELAKSANAAN-PROGRAM-PENDIDIKAN-POLITIK-DALAM-MUDA-Affandi/6a69fb95c4162df6dd7c79e9460e7b1486082b08>
- Agustina, Y., & Sukmana, H. (2023). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna di Pemerintahan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 438–454.
- Alhadar, S., Djunaidi, S. U., & Suleman, S. D. (2022). Peningkatan Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Akan Politik Pemerintahan di Desa Inomata Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Abdidas*, 3(1), 165–170. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.554>
- Andriyendi, D. O., S, N., & Dewi, S. F. (2023). Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemuda pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 101(1), 2798–6020. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.172>

- Azmy, F., Sianipar, M., Sinambela, M. G., & Sinaga, R. (2024). Peran Pemuda Sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Pergerakan Nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17703–17708.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14899>
- Brutu, S., Nainggolan, J. A., Sembiring, G. R., Trisna, W. A., Nainggolan, G., Andini, P., & Prayetno, P. (2024). Analisis Hubungan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Warga Negara (Studi Kasus di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan). *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 137–146.
<https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1588>
- Carson, C. (2025). American civil rights movement. *Britannica*.
<https://www.britannica.com/event/American-civil-rights-movement>
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998 : Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia. *Historia Vitae: Seri Pengetahuan Dan Pengajaran Sejarah*, 04(02), 76–90.
<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/HV/article/download/10017/4402>
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Fahrezi, M. S., Aulia, P. A., & Santoso, G. (2023). Membela Tanah Air dengan Segenap Jiwa: Peran dan Tanggung Jawab Generasi Muda dalam Menjaga Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(02), 391–404.
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/382/134>
- Faradila, N. Della, Haridinata, S., Dwiyaniti, A., Fitri, A., Wati, S., & Nurmala, A. (n.d.). Keterlibatan generasi muda dalam

- membangun masa depan kewarganegaraan. JKEPMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 141–147.
- Fullam, Y. (2016). *Becoming a youth activist in the internet age: a case study on social media activism and identity development*. International Journal of Qualitative Studies In Education, 30(4), 1–17. <https://doi.org/10.1080/09518398.2016.1250176>
- Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., Sofyan, & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. Jurnal Pengabdian West Science, 2(05), 306–315. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.371>
- Irwandi, M. D., Akbar, R., & Santa, R. (2023). Analisis Kesadaran Generasi Muda Indonesia Dalam Dunia Politik. Jurnal SOMA Sosio Dan Humaniora, 2(1), 107–116.
- Itsmenicks. (2024). *The French Revolution Causes, Events, and Impact*. CliffsNotes. <https://www.cliffsnotes.com/study-notes/20159636>
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif Mahasiswa sebagai Agen Of Change melalui Pendidikan Kewarganegaraan. ASANKA: Journal of Social Science And Education, 2(2), 181–193. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.3193>
- Kurnia, W. F., Dewi, A. P., & Arlianto, D. A. (2025). Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu. 1(1), 1–5.
- Lestari, D. Z., Tiurida, Y., Nabila, P. S., & Pangestoeti, W. (2024). Seminar Pemuda Berdaulat Undiksha: Menelaah Peran Pemuda dalam Menjaga Kelangsungan Demokrasi. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia, 1(3), 122–128. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.330>

- Manurung, P. M. N. (2025). Keadilan Iklim: Suara Anak Muda dalam Kebijakan Global. Binus University Character Building Development Center. <https://binus.ac.id/character-building/2025/04/keadilan-iklim-suara-anak-muda-dalam-kebijakan-global/>
- Margiansyah, D. (2020). Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 141–156. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/jpp.v17i1.863>
- Muqsith, M. A. (2019). Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial. *'Adalah*, 3(4), 19–25. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i4.17925>
- Nowak, N. (2021). Pemuda, Politik dan Keterlibatan Sosial di Indonesia Kontemporer. Friedrich-Elbert-Stiftung (FES). <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/18250.pdf>
- Oktavian, E. R., & Sulistyowati, F. (2024). Peran Literasi Digital Remaja dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoaks. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 3(1), 38–46. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JKP/article/download/401/262/1434>
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2986–2993. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>
- Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–31.
- Safitri, Y., Pane, A. E., & Harahap, E. W. (2023). Analisis Perilaku Politik , Budaya Masyarakat dan Agama di

- Indonesia. *Journal of Educationa Research*, 3(4), 1375–1380.
- Samsudin. (2023). Strategi Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kepemudaan Dan Keolahragaan Dalam Rangka Mendukung Program Ekonomi Hijau [Lemhanas RI]. In Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Vol. VIII (Issue I). <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000184/swf/7694/73SAMSUDIN.pdf>
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Peran Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik Pada Generasi Muda. *Journal Society*, 8(1), 87–97. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Suwarji. (2022). Partisipasi pemuda dalam mensukseskan parpol. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(3).
- Tasari, D. (2013). Peran Teman Sebaya Sebagai Agen Sosialisasi Politik Dalam Menumbuhkan Perilaku Memilih Remaja Pada Pemilihan Walikota Tahun 2011 RT 02 RW 01 Kecamatan Umbulharjo. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 113–124. <http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/view/9273>
- Tresnani, V. F., & Adhitya, M. D. K. (2023). Optimalisasi Keterlibatan Pemuda Sebagai Generasi Perubahan Dalam Sistem Demokrasi Melalui Pemilihan Umum 2024. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 44–54. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.238>

Wahyu, A. L. M. (2022). Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Pada Anak. *Academia Edu*, 1–23. https://www.academia.edu/92851845/Peran_Keluarga_Dalam_Meningkatkan_Kesadaran_Politik_Pada_Anak

Wibowo, C. A. A. (2024). Demokratisasi Media dalam Budaya Media Baru: Studi Kasus Gerakan Black Lives Matter Melalui Media Digital. *Researchgate.Net*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26713.945>

63

BAB 6

TANTANGAN APATISME POLITIK DI KALANGAN PEMUDA

Amri Wahid Hidayat, S.IP., M.I.Pol
Universitas Teuku Umar
E-mail: amriwahidayat@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Pemuda dalam sebuah negara memiliki makna yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat krusial. Berbagai harapan juga berada di pundak para pemuda, pemuda sebagai penerus bangsa yang akan menjadi pewaris dan melanjutkan pembangunan serta mengupayakan kemajuan negara. Sebagai agen perubahan, pemuda sering kali mengambil peran sebagai penggerak perubahan soal dan politik negara, dengan idealisme yang dimiliki, keberanian, serta energi untuk memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan mempertahankan nilai, budaya dan identitas bangsa. Pemuda juga sering kali yang menjadi *creator* dan *innovator* di dalam negara, dengan potensi kreativitas yang dimiliki pemuda memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan solusi baru dari setiap tantangan yang dihadapi negara baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, maupun lingkungan.

Dalam sistem negara demokrasi, pemuda memiliki hak dan kewajiban untuk ikut andil dalam setiap proses politik. Kesadaran politik dikalangan pemuda menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi mereka telah didengar dan diakomodir. Terlebih dalam negara dengan sistem demokrasi dituntut partisipasi politik dari para pemuda yang merupakan suatu hal substansial, karena dalam indikator mengukur seberapa baik kualitas dari demokrasi adalah tingkat

partisipasi politik masyarakat yang rendah ataupun tinggi (Dwira, 2015). Merujuk pada teori-teori politik, hukum dan kebijakan, dalam proses pembuatan setiap kebijakan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat yang mana pemuda adalah salah satu bagian terpenting didalamnya. Dengan demikian legitimasi dari sebuah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi lemah jika partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau bahkan tidak ada sama sekali. Sejatinya, partisipasi masyarakat dalam proses politik didalam negara dapat menjadi sarana untuk mengontrol atau pengawasan terhadap pemerintahan yang berjalan (Hapsari et al., 2022).

Pertisipasi pemuda dalam politik negara dan perintahan tidak selamanya hanya pada proses pembuatan kebijakan, kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah juga merupakan bentuk dari partisipasi dan kepedulian pemuda tentang bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana merujudkan pemerintahan dan prinsip *good governance* di dalam negara demokrasi. Namun, apabila pemuda apatis dengan politik dan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah maka proses partisipasi tidak terwujud dan menjadikan demokrasi di dalam negara tidak berjalan dengan baik. Apatisme merupakan tindakan ketidakpedulian seorang individu yang tidak memiliki minat pada aspek tertentu, termasuk di dalamnya aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Apatisme juga dapat diartikan sebagai ketidakpedulian seseorang terhadap isu-isu menyangkut dengan aspek kehidupan sosial dan seorang yang memiliki sikap apatis ini dapat dilihat dari kurangnya tanggung jawab sosial di dalam dirinya (Sarfaraz & Khalid, 2014).

Secara lebih khusus, apatisme dalam aspek politik dapat dimaknai dengan kurangnya minat terhadap masalah politik pemerintahan dan pemilu. Prilaku apatisme ini berupa ketidaktertarikan terhadap proses politik, dan ketidakpercayaan

terhadap lembaga politik dan negara yang mengakibatkan pada keengganan untuk terlibat dan berpartisipasi didalamnya (Marsuki et al., 2022). Apatisme di Indonesia menjadi semakin masif terutama dikalangan pemuda disebabkan oleh berbagai informasi negatif para pejabat publik, mulai dari gaya hidup yang tidak dapat dikontrol, berbagai masalah korupsi, hingga saling serang para politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Apatisme pemuda terhadap politik berdampak pada minimnya partisipasi politik pemuda yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas demokrasi dan yang paling parah jika legitimasi terhadap pemerintah dan kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah menjadi menurun. Maka, pentingnya partisipasi politik pemuda didalam negara menjadi sangat krusial demi menjaga negara ini tetap sesuai jalur demokrasi dan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

Tulisan ini selanjutnya akan membahas tentang golongan putih (golput) sebagai salah satu bentuk apatisme politik, dimana tindakan golput menjadi bentuk ketidakpedulian pemuda dan sikap menarik diri dari perpolitikan negara. Selanjutnya juga tulisan ini membahas implikasi apatisme pemuda terhadap demokrasi, dimana sikap apatis terhadap politik dapat mempengaruhi tingkat demokrasi dan dapat membawa negara kearah yang tidak baik. Untuk itu, pada tulisan ini pula dijelaskan tentang bagaimana strategi pendidikan politik yang paling dekat dengan dunia pemuda saat ini, yaitu pendidikan politik melalui media sosial. Karena untuk Kembali menumbuhkan partisipasi politik diperlukan upaya dari pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada pemuda.

GOLPUT SEBAGAI SIKAP APATISME POLITIK

Apatisme Politik menurut Laster Milbarth dan M.L.Goel dalam tulisannya *Political Participation*, menyatakan bahwa

apatitis adalah orang yang tidak mau terlibat dan menarik diri dari proses politik. Goel lebih mengkhususkan *Apathetic Inactive* (apatitis) adalah seseorang yang tidak terlibat dalam kegiatan pemilihan atau dengan kata lain tidak pernah memilih (Efriza, 2005). Sementara itu David F. Roth dan Frank L. Wilson menyatakan apatisisme politik sebagai “apolitis” yang merupakan bagian dari partisipasi politik. Apolitis adalah tindakan kelompok orang yang tidak mau terlibat dengan kegiatan politik dan tidak peduli dengan politik (Efriza, 2005). Apatisisme politik adalah suatu tindakan seseorang untuk tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam setiap proses politik yang terjadi di dalam negara, baik itu keterlibatan dalam proses kebijakan hingga pemilihan umum untuk mengisi jabatan publik.

Apatisisme politik ini muncul dari beberapa faktor dan penyebab, sikap apatis masyarakat tidak lepas dari pengalaman yang pernah diperoleh pada masa lalunya. Kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pejabat publik merupakan refleksi dari kinerja pemerintah yang dianggap tidak mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Rasa kecewa kepada pejabat publik ini menumbuhkan rasa putus asa sehingga masyarakat enggan menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah, dalam kondisi yang lebih parah adalah hilangnya semangat masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan berdemokrasi. Pada kondisi seperti ini, masyarakat akhirnya menilai bahwa perubahan tidak pernah terwujud, meskipun setiap pemilihan umum terjadi pergantian kepemimpinan namun keadaan masyarakat tidak jauh berbeda dengan periode-periode pemimpin sebelumnya.

Apatisisme politik tertuang dalam tindakan perilaku seseorang dengan aksi golput (golongan putih). Golput sendiri adalah perilaku politik yang mengindikasikan apatisisme seseorang terhadap politik. Berikut ini data yang memperlihatkan angkut golput tertinggi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia pada

pemilu tahun 2024 berdasarkan pada data yang diterbitkan oleh LSI Denny JA, hal ini menjadi indikasi partisipasi politik masyarakat Indonesia yang semakin rendah.

Tabel 6.1. Persentase Angka Golput 7 Provinsi Terbesar di Indonesia Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Persentase	
		Partisipasi	Golput
1	DKI Jakarta	53,09 %	46,91 %
2	Jawa Barat	63,02%	36,98 %
3	Jawa Timur	65,32 %	34,68 %
4	Jawa Tengah	70,52 %	29,48 %
5	Banten	63,90 %	36,10 %
6	Sumatera Utara	53,59 %	46,41 %
7	Sulawesi Selatan	70,16 %	29,84 %

Sumber: Diolah berdasarkan data LSI Denny JA tahun 2024

Melihat dari data diatas, angka golput pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Rata-rata angkat goput pada tahun 2024 mencapai 37,63%, sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan data dari LSI Denny JA adalah sebesar 31,40% atau dengan kata lain tingkat golput pada tahun 2024 melonjak sebesar 6,23%.

Adapun faktor-faktor yang mendorong tingginya golput diantaranya adalah: (1) masyarakat lelah dengan pemilu, karena sepanjang tahun 2024 terdapat pemilu legislatif dan pilkada serentak yang membuat energi masyarakat terkuras sehingga pemilu menjadi kurang menarik bagi masyarakat; (2) tidak ada kandidat yang menarik, atau kandidat yang muncul adalah orang-orang yang sama dengan pemilu sebelumnya; (3) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, hal ini karena masyarakat merasa kehidupan mereka tidak akan

berbeda atau masyarakat sudah putus asa dengan kondisi kehidupan yang tidak membaik meskipun berganti pemimpin; (4) apatisme politik yang semakin tinggi, berbagai citra buruk dari pejabat publik ataupun politisi mulai dari gaya hidup mewah hingga kasus korupsi memperbesar sikap apatis masyarakat dan semakin enggan untuk terlibat dalam proses politik.

Rosenberg dan Rush berpendapat apatisme di kalangan pemuda setidaknya memiliki tiga penyebab pokok, yaitu: (1) Takut terkena imbas negatif dari aktivitas politik; (2) Pemuda memiliki anggapan bahwa berpartisipasi dalam politik adalah tindakan yang sia-sia; dan (3) tidak memiliki ketertarikan dalam kegiatan politik (Michael & Althhoff, 2002). Rendahnya partisipasi dalam pemilu akan berdampak terhadap legitimasi dan kualitas demokrasi di suatu negara. Demokrasi akan dinilai buruk jika masyarakat tidak mau terlibat dan lebih memilih golput. Dampaknya adalah pemimpin yang terpilih dari pemilu tersebut tidak memiliki legitimasi kekuasaan yang kuat karena dianggap hanya mewakili sebagian masyarakat yang memilih saja dan bukan pilihan mayoritas masyarakat atau bukan hasil dari konsensus bersama.

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilu memberikan efek domino terhadap perpolitikan negara, ketika partisipasi rendah dalam pemilu akan memunculkan kelompok pemilih militan saja yang berpartisipasi dalam pemilu. Dengan kondisi yang seperti itu, pemilu hanya menjadi sarana memperkuat politik elitisme yang mana pemimpin hanya akan melayani dan memperjuangkan kepentingan kelompok kecil mereka yang militan sehingga masyarakat umum yang merupakan kelompok mayoritas terpinggirkan kepentingannya. Sudah semestinya peningkatan angka golput menjadi perhatian bersama dan pemerintah mulai menyusun langkah konkrit untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah

sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui pendidikan politik, transparansi pemerintahan dan memperbaiki citra pejabat publik dapat menjadi langkah yang tepat dan sudah sangat mendesak untuk dilakukan guna memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

IMPLIKASI APATISME POLITIK PEMUDA TERHADAP DEMOKRASI

Populasi pemuda di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu, keberadaan pemuda adalah suatu sumber kekuatan yang paling efektif untuk mengontrol proses-proses politik termasuk kebijakan dan kualitas demokrasi. Akan tetapi, kondisi meningkatnya apatisme politik dikalangan pemuda sangat disayangkan. Padahal, partisipasi politik pemuda adalah salah satu aspek penting proses transformasi politik di negara, dengan kehadiran pemuda sebagai penerus kepemimpinan negara pada masa yang akan datang menunjukkan bahwa siklus kepemimpinan dan keberlangsungan demokrasi di suatu negara berjalan dengan baik. Oleh sebab itu pula, diperlukan wadah ataupun program yang menarik yang lebih dekat dengan pemuda untuk kembali meningkatkan kepedulian pemuda dan partisipasi pemuda dalam politik, agar degradasi nilai-nilai demokrasi tidak semakin parah di Indonesia.

Fenomena pemuda yang terlibat dalam politik di Indonesia saat ini cenderung hanya terlihat pada permukaan saja. Hal ini terlihat dengan kemunculan politisi-politisi muda di kancah perpolitikan nasional, namun kemunculan pemuda ini tidak mampu menarik minat mayoritas pemuda lainnya untuk ikut berpartisipasi pada politik. Tidak adanya kemauan untuk terjun dan aktif secara langsung dalam organisasi politik ataupun organisasi yang mengawasi proses-proses politik seperti *Non Government Organization* (NGO). Fenomena tersebut dijelaskan juga pada penemuan Morissan (2016) yang mengatakan bahwa

kemunculan telah terdapat pemuda yang terjun dalam dunia politik, akan tetapi sebahagian besar pemuda lainnya masih enggan untuk ikut partisipasi politik dan mereka hanya sampai pada tingkatan membicarakan isu politik di media sosial atau dengan temannya sebagai bentuk opini saja.

Pentingnya partisipasi politik pemuda bagi negara demokrasi didasarkan oleh beberapa faktor yang mendasari, di antaranya: (1) partisipasi dibutuhkan untuk dapat melihat keadaan sosial dan ekonomi yang terjadi apakah dalam kondisi yang seharusnya atau tidak; (2) partisipasi dibutuhkan untuk dapat menganalisis penyebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi; (3) partisipasi dibutuhkan untuk mengetahui cara memecahkan masalah yang terjadi tersebut; dan (4) partisipasi dibutuhkan guna menumbuhkan nilai mandiri yang kuat dan dapat meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap pihak lain (Karamoy, 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa partisipasi pemuda dalam politik tidak terbatas pada partisipasi yang bentuknya formal saja, melainkan pemuda dapat melakukan partisipasi politik melalui berbagai sarana politik yang diwadahi oleh berbagai organisasi dan komunitas yang aktif melakukan advokasi pada setiap sektor baik pada kegiatan sosial, lingkungan, keagamaan, kemanusiaan, hingga pada politik pemerintahan.

Apatisme pemuda terhadap politik akan berdampak pada demokrasi di dalam negara. Sebagai negara demokrasi, pemerintah dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat maka akan sangat penting partisipasi politik sebagai bentuk legitimasi terhadap pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kebijakan dan proses politik negara dapat berjalan dengan baik (Hidayatullah, 2003). Sebagai sistem politik, demokrasi mengandung asas nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, kebebasan, hingga nilai toleransi yang didalamnya menjamin warga negara untuk bebas berpendapat

dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Partisipasi dan kontrol masyarakat sangatlah penting bagi negara demokrasi, karena dengan adanya kesadaran politik dan partisipasi yang aktif dari pemuda nilai-nilai demokrasi dapat dipertahankan dan pemerintahan dapat dikontrol.

Dari segi kebijakan, partisipasi pemuda dapat mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. Pemuda yang aktif menggali informasi tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan berdampak pada pemerintahan yang semakin terbuka dan semakin baik dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Pentingnya partisipasi pemuda dalam politik dan bagi sistem demokrasi adalah agar tidak ada penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintahan tidak dikontrol, dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pengabaian hak-hak warga. Ketika hal tersebut telah terjadi, kondisi negara akan kacau dan tidak ada yang bisa menjamin keberlangsungan demokrasi dapat terjaga. Pentingnya partisipasi politik pemuda yang baik agar meningkatkan kesadaran politik warga negara, karena semakin rendah kesadaran politik akan memunculkan kesempatan bagi penguasa atau pemerintah untuk lebih mudah mengelabui masyarakat.

MEMINIMALISASI APATISME PEMUDA DENGAN PENDIDIKAN POLITIK DI MEDIA SOSIAL

Sikap apatisisme politik di kalangan pemuda sangat berkaitan dengan tingkat pemahaman politik yang dimiliki. Media massa memiliki peran yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pengetahuan politik pemuda, berita negatif yang tersebar di media massa dan media sosial seringkali semakin memperparah

persepsi pemuda terhadap politik. Bagaimana pemeritaan-pemberitaan di media yang lebih sering mengekspose sisi negatif dari politik, seperti gaya hidup pejabat yang terlihat hedon, konflik antaraktor politik dalam perebutan kekuasaan, hingga upaya saling menjatuhkan antar lawan politik. Sementara itu sisi positif dari politik dan segala proses politik jarang untuk diangkat oleh media. Sehingga, berita-berita negatif tersebut semakin memperbesar apatisme politik pemuda dan semakin enggan untuk terlibat didalam politik. Dengan demikian, diperlukan peran dari media masa, sekolah sebagai sara pendidikan dan keluarga sebagai kelompok terkecil untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang politik, pendidikan politik, serta literasi politik (Maarisit, 2015).

Pendidikan Politik adalah faktor yang paling memiliki pengaruh dalam menumbuhkan tingkat partisipasi politik pemuda. Melalui pendidikan politik kepada pemuda dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kondisi politik yang berlangsung. Untuk memberikan semangat dan motivasi pemuda sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa, memastikan demokrasi dan pemilihan umum berjalan dan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi berdasarkan suara rakyatnya, maka sangat penting pemuda untuk diberikan program pendidikan politik yang lebih serius serta terprogram dengan baik. Pendidikan politik dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat guna meningkatkan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik sesuai dengan konsep dasar demokrasi, dimana kedaulatan berada pada masyarakat atau rakyat, maka masyarakat harus mampu melaksanakan tugasnya melalui partisipasi politik (Kantaprawira, 2004).

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah bagaimana kesadaran politik yang dimiliki oleh warga negara. Sementara itu, kesadaran politik lahir dari faktor internal dan

eksternal setiap individu. Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tingkat literasi politik warga negara merupakan faktor internal yang membentuk kesadaran politik (Aspiran, 2017). Sedangkan kesadaran politik yang berasal dari faktor eksternal adalah pendidikan politik yang diberikan negara kepada setiap warga negaranya melalui sekolah atau institusi pendidikan lainnya memiliki peran untuk menumbuhkan kesadaran politik pemuda (Purnawati, 2019). Membangun kesadaran politik melalui pendidikan politik yang baik adalah salah satu upaya negara untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda, sehingga para pemuda memiliki kemauan untuk ikut terlibat dalam isu-isu publik maupun politik serta kebijakan suatu negara.

Agar pendidikan politik berjalan efektif, maka perlu diterapkan model atau pendekatan yang paling relevan dengan kondisi pemuda saat ini, mulai dari sarana pendidikan politik hingga materi yang diberikan. Semuanya harus sesuai dengan karakter, minat, dan tingkat pemahaman pemuda saat ini tentang politik. Adapun sarana pendidikan politik yang paling dekat dengan pemuda saat ini selain keluarga, media massa, sekolah dan lingkungan adalah menggunakan media sosial. Pendidikan politik melalui media sosial ini dapat menjadi sarana yang lebih efektif karena partisipasi politik masyarakat umumnya akan meningkat sesuai dengan kebiasaan, dan hampir seluruh pemuda saat ini menggunakan media sosial untuk berinteraksi serta berbagi informasi sehari-hari. Berdasarkan data terbaru dari *We Are Social* pada bulan Januari tahun 2025 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 143 juta identitas yang jumlahnya setara dengan 50,02 % dari populasi masyarakat Indonesia (Muhammad, 2025).

Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 221.563.479

jiwa pengguna, dari total 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023. Sedangkan konten berita yang paling sering diakses adalah isu politik, sosial, hukum dan HAM sebesar 40,56% (APJII, 2024). Minat generasi muda terhadap konten dan berita tentang politik juga yang paling tinggi jika dibandingkan dengan isu lainnya.

Tabel 6.2. Persentase Konten Internet Berita Sering diakses Berdasarkan Generasi

No	Konten Sering diakses	Gen z (1997- 2013)	Millenial (1981- 1996)	Gen x (1965- 1980)	Baby Boomers (1946-1964)	Pre Boomer (<1945/ >79th)
1	Politik, Sosial, Hukum dan HAM	33,40%	41,94%	47,07%	51,55%	100%
2	Ekonomi, Keuangan dan Bisnis	26,83%	30,88%	29,92%	30,23%	100%
3	Kesehatan	23,13%	29,45%	31,10%	31,78%	0,00%
4	Budaya dan Pariwisata	24,98%	20,50%	19,62%	15,50%	0.00%
5	Olahraga	41,36%	28,95%	27,71%	20,93%	0.00%
6	Infotainment dan Gosip	31,42%	33,66%	27,57%	23,26%	100%
7	Pendidikan dan IPTEK	25,02%	16,89%	12,65%	12,79%	0,00%
8	Mancanegara	5,31%	4,21%	3,91%	2,33%	0,00%
9	Tidak Tahu/ Tidak Mengakses	3,58%	4,97%	8,08%	13,95%	0,00%

Sumber: Survei Internet Indonesia oleh APJIII, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa sebenarnya pemuda memiliki minat yang tinggi untuk memperoleh informasi atau konten tentang politik. Pemuda sering kali skeptis pada politik namun masih memiliki kesadaran terhadap isu politik. Skeptisisme pemuda terhadap politik ini disebabkan seringnya informasi atau konten yang mereka lihat menampilkan kondisi politik yang kotor dan penuh dengan praktik korupsi, sehingga pemuda merasa tidak akan memberikan dampak yang berarti meskipun mereka terlibat aktif dalam politik. Skeptisisme pemuda kepada politik juga disebabkan oleh paparan informasi bohong atau hoaks dimana berdasarkan survei APJII sebesar 49,51% hoaks tersebar adalah yang berkaitan dengan isu politik dan media paling sering ditemukan informasi hoaks adalah di media sosial dengan persentase sebesar 83,11% jika dibandingkan dengan media lainnya.

Media sosial sebagai media yang paling diminati berbagai kalangan dan hampir semua generasi, sudah sepantasnya dimanfaatkan sebagai sarana memberikan pendidikan politik kepada pemuda. Media sosial dapat menjadi sarana yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pendidikan politik karena media sosial menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi politik, sehingga para pemuda dapat memperoleh berita terkini dan relevan dengan minat mereka. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai platform diskusi pemuda mengenai berbagai isu politik yang sedang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, media sosial telah menciptakan ruang interaksi dan belajar dari satu sama lain pemuda. Penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan politik juga harus mengedepankan proses edukasi yang menarik serta kreatif, penggunaan konten kreatif seperti video, infografis dan program *podcast* yang menarik adalah salah satu cara yang dapat diambil dan paling dekat dengan karakter pemuda masa kini, sehingga mampu meningkatkan minat pemuda terhadap

politik dan dapat membantu mereka dapat pendidikan serta informasi yang posisitif tentang politik guna memudahkan mereka memahami isu yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dicerna.

KESIMPULAN

Golput sebagai bentuk dan sikap dari apatisisme pemuda terhadap politik mencerminkan ketidakpedulian yang semakin meluas dikalangan generasi pemuda, yang berpotensi mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Implikasi dari apatisisme ini sangat serius, karena rendahnya partisipasi pemuda dalam proses politik dapat mengakibatkan legitimasi pemerintah yang lemah dan mengurangi akuntabilitas serta transparansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Untuk meminimalisasi apatisisme ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan politik yang efektif dan efisien melalui sarana media sosial, yang merupakan platform yang paling dekat dan sering digunakan oleh pemuda. Melalui pendekatan ini, pemuda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi. Bahaya apatisisme politik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengarah pada ketidakstabilan negara, dimana kekuasaan dapat disalahgunakan tanpa adanya kontrol dari masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemuda adalah langkah krusial untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan bahwa suara generasi muda didengar dalam pembangunan bangsa. Harapan besar pada pemuda untuk dapat meningkatkan kesadaran politik dan akhirnya ikut dalam partisipasi politik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta kebijakan yang dikeluarkan, sehingga dapat mendinging kehidupan bernegara dan demokrasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024.
- Aspiran, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 1–19.
<http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/1491>
- Dwira, K. (2015). Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico Jurnal Ilmu Politik*, 1, 2015.
- Efriza, Y. R. (2005). Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik. Intrans Publisng.
- Hapsari, M. A., Wardhani, S. H. R., Ariyani, N., & Andani, D. (2022). Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 105–117.
<https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15180>
- Hidayatullah, I. U. S. (2003). Pendidikan Kewarganegaraan (Revisi 200). Prenada Media.
- Maarisit, Y. (2015). Partisipasi Politik Generasi Muda terhadap Pembangunan Politik di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijay. *Jurnal Lyceum*, 3(1).
- Marsuki, N. R., Oruh, S., & Agustang, A. (2022). *Youth Apathy in Political Contest: A Case Study in the 2020 Gowa Regency Head Election*. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 73–82. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i1.6296>
- Michael, R., & Althhoff, P. (2002). Pengantar Sosiologi Politik. Rajawali Pers.
- Muhammad, N. (2025). Daftar Media Sosial Paling Banyak digunakan di Indonesia Awal 2025. Databooks.

- <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67ca734b43927/daftar-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2025>
- Purnawati, L. (2019). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 55–71.
- Rusadi Kantaprawira. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar* (Edisi Revi). Sinar baru Algensindo.
- Sarfaraz, A., & Khalid, A. (2014). *Reasons for Political Interest and Apathy among University Students: A Qualitative Study*. *Political Interest and Apathy View project Customer Services in Pakistan View project*. *Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology* 2012, 10(1), 1. Parida S, Kaufmann SHE.
<https://www.researchgate.net/publication/260171871>

BAB 7

PERAN ORGANISASI PEMUDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK

Muhammad Ishak Syahadat, ST., M.I.P
Universitas Halu Oleo
E-mail: ishaksyahadat@uho.ac.id

PENDAHULUAN

Kesadaran politik merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk kehidupan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Di tengah dinamika politik yang kompleks, kelompok pemuda menempati posisi strategis dalam menggerakkan transformasi sosial dan politik melalui partisipasi aktif, baik secara individu maupun kolektif dalam organisasi pemuda. Organisasi pemuda tidak hanya menjadi wadah pembinaan generasi muda, tetapi juga instrumen penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat melalui Pendidikan politik, advokasi isu-isu publik, serta keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Peran pemuda dalam pembangunan politik telah lama menjadi perhatian ilmuwan politik. (Almond dan Verba, 1963) dalam karya klasiknya *The Civic Culture* menekankan pentingnya budaya politik partisipatif yang dibangun melalui pendidikan sejak dini, salah satunya melalui organisasi pemuda. Hal ini diperkuat oleh teori partisipatif politik yang menyatakan bahwa keterlibatan politik akan meningkat apabila individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang memadai (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Organisasi pemuda berperan sebagai sarana pelatihan kepemimpinan dan demokrasi, sekaligus sebagai actor yang mampu

mengartikulasikan kepentingan generasi muda dalam ranah politik.

Di Indonesia, organisasi pemuda telah memainkan peran signifikan dalam berbagai fase sejarah politik bangsa, mulai dari masa pergerakan nasional, era reformasi, hingga kontemporer. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda, baik dalam bentuk diskusi politik, pelatihan kepemimpinan, hingga advokasi kebijakan publik, menjadi bagian penting dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya secara politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2013), peran organisasi pemuda dalam konteks demokrasi Indonesia adaah sebagai aktor perubahan sosial yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Khususnya dalam membangun budaya politik yang inklusif dan berdaya kritis.

Namun demikian, tantangan terhadap eksistensi dan efektivitas organisasi pemuda juga tidak dapat diabaikan. Politisasi, pragmatisme, dan apatisme politik di kalangan pemuda menjadi hambatan serius yang dapat menggerus idealisme dan peran strategis organisasi pemuda. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan merekonstruksi peran organisasi pemuda dalam konteks politik kekinian guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap penguatan demokrasi dan peningkatan kesadaran politik generasi muda.

Bab ini hadir untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana organisasi pemuda dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan teoretis dan empiris, bab ini berupaya menawarkan analisis dan rekomendasi strategis guna memperkuat peran organisasi pemuda dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, kritis, dan inklusif.

PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR

Pengertian Kesadaran Politik dan Organisasi Pemuda

Menurut Rush dan Althoff (1992), kesadaran politik dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang mencakup tiga unsur utama: pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi terhadap struktur serta proses politik. Dalam pandangan ini, kesadaran politik tidak hanya diukur dari tingkat pengetahuan tentang lembaga negara atau sistem pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan individu dalam memahami bagaimana kekuasaan dijalankan dan dievaluasi secara kritis. *Pertama*, unsur pengetahuan merujuk pada informasi yang dimiliki individu tentang sistem politik: bagaimana pemerintahan dibentuk, apa fungsi lembaga legislatif dan eksekutif, serta siapa saja aktor-aktor politik yang berpengaruh. Pengetahuan ini menjadi dasar dari kesadaran politik karena tanpa informasi yang cukup, warga negara sulit terlibat dalam proses politik secara bermakna. *Kedua*, unsur pemahaman menunjukkan kedalaman seseorang dalam menginterpretasikan sistem politik dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Ini mencakup kemampuan untuk memahami hubungan antar lembaga negara, dinamika partai politik, proses legislasi, hingga dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. *Ketiga*, unsur evaluasi adalah kemampuan individu untuk memberikan penilaian kritis terhadap sistem dan proses politik, misalnya apakah kebijakan pemerintah adil, apakah proses pemilu berjalan jujur, atau bagaimana etika para pemimpin politik. Evaluasi ini merupakan refleksi dari sikap politik warga negara dan menjadi cerminan dari tingkat kesadaran politiknya.

Rush dan Althoff menekankan bahwa ketiga elemen ini bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika pengetahuan dan pemahaman tumbuh, kapasitas evaluatif warga negara terhadap realitas politik pun meningkat. Dengan

demikian, kesadaran politik tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan pengalaman dan pendidikan politik yang diterima individu (Rush & Althoff, 1992).

Kontribusi penting lain dalam pemahaman kesadaran politik datang dari Almond dan Verba (1963) dalam karya monumental mereka *The Civic Culture*. Mereka memperkenalkan konsep "orientasi politik", yang mereka anggap sebagai dasar dari kesadaran politik dalam konteks budaya politik suatu bangsa. Orientasi politik menurut mereka terbagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.

1. Orientasi Kognitif, berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman individu terhadap sistem politik, lembaga-lembaga pemerintahan, aturan hukum, dan peran masing-masing aktor politik. Ini paralel dengan konsep pengetahuan dalam kerangka Rush & Althoff. Individu dengan orientasi kognitif yang tinggi memiliki pemahaman faktual yang baik tentang bagaimana negara dijalankan.
2. Orientasi Afektif, merujuk pada perasaan, ikatan emosional, atau identifikasi seseorang terhadap simbol-simbol politik, seperti bendera, lagu kebangsaan, tokoh politik, maupun sistem pemerintahan itu sendiri. Perasaan ini bisa bersifat positif (nasionalisme, loyalitas) maupun negatif (apatisme, sinisme politik).
3. Orientasi Evaluatif, menunjukkan bagaimana individu menilai sistem dan proses politik, baik berdasarkan nilai-nilai pribadi, norma budaya, maupun pengalaman politik. Orientasi ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai keadilan, efektivitas, atau legitimasi dari suatu pemerintahan atau kebijakan publik

Almond dan Verba mengemukakan bahwa orientasi politik yang seimbang antara kognitif, afektif, dan evaluatif merupakan ciri dari budaya politik partisipatif yang sehat. Dalam

masyarakat yang memiliki budaya politik yang matang, warga negara tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga perasaan positif terhadap sistem politik dan kemampuan menilai secara kritis. Hal ini, menurut mereka, menjadi landasan dari sistem demokrasi yang stabil dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (Almond & Verba, 1963).

Benedict Anderson, seorang ilmuwan politik dan sejarawan asal Amerika, dikenal luas melalui karyanya *Imagined Communities* (1983), Dimana ia membahas bagaimana identitas nasional dan komunitas kebangsaan dibentuk secara sosial. Dalam konteks Indonesia, Anderson melihat organisasi pemuda sebagai bagian dari kekuatan sosial-politik yang membentuk kesadaran nasional dan identitas kebangsaan, khususnya sejak awal abad ke-20. Pemuda dalam hal ini tidak hanya dipahami secara biologis sebagai kelompok usia muda, tetapi sebagai agen perubahan yang mewakili peran ideologis dan politis dalam gerakan kebangsaan dan kemerdekaan. Secara eksplisit Anderson (1983), mendefenisikan organisasi pemuda sebagai wadah kolektif kaum muda yang secara sadar terlibat dalam pembentukan identitas nasional dan perubahan sosial-politik, melalui perjuangan ideologis, pendidikan politik, dan gerakan mobilisasi massa. Selain itu organisasi pemuda juga sering dikaitkan dengan fungsi sosial-politik yang lebih luas. Sementara menurut Miriam Budiarjo (2019), organisasi pemuda memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik dan artikulasi kepentingan generasi muda dalam konsolidasi demokrasi.

FUNGSI DAN TUJUAN ORGANISASI PEMUDA DALAM SISTEM POLITIK

Organisasi pemuda memainkan peran sentral dalam dinamika politik dan Pembangunan demokrasi. Sebagai bagian integral dari masyarakat sipil, organisasi-organisasi ini tidak

hanya memberikan ruang bagi pengembangan diri generasi muda, tetapi juga menjadi wahana penting dalam proses sosialisasi politik dan transformasi sosial. Di tengah tuntutan perubahan dan kompleksitas system politik, organisasi pemuda hadir sebagai motor penggerak partisipasi, pemberdayaan dan penguatan demokrasi. Dalam konteks ini, organisasi pemuda memiliki berbagai fungsi strategis yang menunjang terbentuknya sistem politik yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Ada beberapa fungsi organisasi pemuda dalam sistem politik diantaranya adalah sebagai berikut:

Fungsi Edukasi Politik

Organisasi pemuda memiliki fungsi edukatif yang penting dalam meningkatkan literasi politik generasi muda. Melalui berbagai aktivitas seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, diskusi publik, simulasi parlemen, serta kampanye isu kebijakan, organisasi pemuda menjadi wahana edukasi politik yang efektif dan kontekstual. Di luar pendidikan formal, pengalaman langsung dalam berorganisasi memberikan ruang kepada pemuda untuk belajar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mempraktikkan proses demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Miriam Budiardjo (2007), pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang paham akan sistem politik dan mampu berpartisipasi secara rasional dalam kehidupan politik. Organisasi pemuda, dalam hal ini, memainkan peran sebagai agen pembelajaran politik yang membentuk kesadaran kritis dan kemampuan reflektif anggotanya

Fungsi Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi

Selain sebagai lembaga edukasi politik, organisasi pemuda juga menjalankan fungsi sosialisasi politik, yaitu memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam

diri anggotanya. Nilai-nilai seperti toleransi, kebebasan berpendapat, musyawarah, penghormatan terhadap hukum, dan partisipasi aktif menjadi bagian dari budaya organisasi yang kemudian membentuk kepribadian politik para anggotanya. Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), pengalaman dalam organisasi sosial merupakan salah satu jalur utama untuk membentuk civic skills dan nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan aktif dalam organisasi pemuda melatih individu untuk bekerja sama, mendengarkan, menyelesaikan konflik secara damai, dan berpikir kritis. *"Democracy is not only taught in the classroom but learned through active engagement in civic organizations where individuals acquire skills, norms, and values of democratic life."* (Verba, Schlozman, & Brady, 1995, p. 271)

Fungsi Advokasi dan Kontrol Sosial

Dalam sistem politik yang demokratis, fungsi kontrol sosial menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong transparansi pemerintahan. Organisasi pemuda memiliki potensi besar dalam menjalankan fungsi ini melalui aktivitas advokasi kebijakan, kampanye sosial, pemantauan kinerja pejabat publik, hingga keterlibatan dalam gerakan protes atau unjuk rasa yang damai. Huntington dan Nelson (1976) berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial, termasuk organisasi pemuda, memainkan peran penting dalam transisi dan konsolidasi demokrasi, karena mampu menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap tuntutan Masyarakat. *"Youth groups, when organized and mobilized, can serve as critical agents in demanding accountability and transparency in transitional political systems."* (Huntington & Nelson, 1976, p. 104)

STRATEGI ORGANISASI PEMUDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK

Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik

Pendidikan Politik merupakan proses penting dalam membentuk warga negara yang sadar politik, partisipatif, dan bertanggung jawab. Salah satu jalur utama dalam penyampaian pendidikan politik adalah melalui kegiatan sosialisasi politik, yaitu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan orientasi politik dari lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, organisasi pemuda memiliki peran vital sebagai agen sosialisasi politik yang informal namun sangat efektif. Menurut Almond dan Powell (1966), sosialisasi politik adalah proses di mana nilai-nilai politik ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui interaksi dalam organisasi, diskusi kelompok, kegiatan kampanye, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi parlemen, pemuda belajar mengenai struktur kekuasaan, hak-hak politik, serta prosedur dalam proses demokrasi. *“Political socialization is the process through which individuals acquire knowledge, feelings, and evaluations of the political world.”* (Almond & Powell, 1966, p.33)

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan organisasi pemuda memberikan pengalaman langsung kepada anggotanya dalam berpolitik secara praktis. Hal ini termasuk pelatihan kaderisasi, seminar kebangsaan, debat publik, dan keterlibatan dalam gerakan sosial yang mengangkat isu-isu aktual. Bentuk-bentuk kegiatan ini memperkuat kapasitas pemuda dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis, serta membentuk habitus politik yang partisipatif. Sementara Rush dan Althoff (1992), menekankan bahwa sosialisasi politik yang efektif harus mampu membangun pemahaman rasional terhadap institusi politik dan mekanisme kekuasaan. Dalam konteks organisasi

pemuda, kegiatan sosialisasi menjadi wahana strategis untuk memperluas jangkauan pendidikan politik di luar institusi formal. *“Effective political education requires the transmission of political knowledge and attitudes through repeated social experiences in relevant social groups.”* (Rush & Althoff, 1992, p. 89)

Pemanfaatan Media Sosial dan Digitalisasi Informasi

Di era digital, media sosial telah menjadi arena strategis bagi organisasi pemuda dalam menjalankan fungsi-fungsi politik, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Perubahan pola komunikasi politik dari media konvensional ke media digital telah memungkinkan proses sosialisasi politik berlangsung lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Organisasi pemuda memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi politik, mengajak diskusi, memobilisasi dukungan, serta membentuk opini publik di kalangan anak muda. Menurut Castells (2009), kekuatan dalam masyarakat informasi terletak pada kemampuan mengakses dan mendistribusikan informasi. Dalam konteks ini, organisasi pemuda yang mampu memanfaatkan teknologi komunikasi digital memiliki keunggulan dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan menyebarkan pesan-pesan politik yang relevan. *“Power now lies in the networks of information sharing, where political messages are shaped, diffused, and interpreted through digital communication.”*(Castells, 2009, p. 54)

Media sosial seperti Instagram, Twitter (sekarang X), TikTok, dan YouTube memungkinkan organisasi pemuda menciptakan konten politik dalam bentuk yang mudah dicerna seperti infografik, video pendek, *podcast*, dan kampanye daring. Strategi ini efektif dalam menarik minat politik anak muda yang cenderung menghindari politik formal, namun aktif dalam ranah

digital. Selain itu, media sosial memungkinkan terjadinya dialog dua arah antara organisasi dan audiens, yang memperkuat dimensi partisipatif dalam pendidikan politik. Loader, Vromen, dan Xenos (2014), menekankan bahwa generasi muda saat ini lebih terlibat secara politik melalui media digital ketimbang melalui saluran konvensional. Media sosial berfungsi sebagai “ruang publik baru” tempat mereka berdiskusi, menyuarakan pendapat, dan belajar mengenai isu-isu politik. *“For many young people, political engagement has moved online, where they find communities, information, and avenues for expression that align with their identity and values.”*(Loader, Vromen, & Xenos, 2014, p. 143)

Pemanfaatan digitalisasi informasi juga mencakup pembuatan situs web organisasi, buletin digital, webinar, serta pelatihan politik daring yang memberikan akses lebih luas dan inklusif. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan pendidikan politik, tetapi juga memperkuat kapasitas literasi digital dan politik pemuda. Dengan demikian, strategi pemanfaatan media sosial dan digitalisasi informasi telah menjadi pilar penting dalam transformasi peran organisasi pemuda di era digital. Melalui pendekatan ini, kesadaran politik generasi muda dapat ditingkatkan secara lebih relevan, cepat, dan partisipatif.

Dalam era digital saat ini, organisasi pemuda memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui strategi komunikasi politik digital yang terstruktur. Strategi ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu: *Pertama*, identifikasi isu politik pemuda, pada tahapan ini adalah mengenali berbagai isu sosial-politik yang relevan dengan kehidupan dan kepentingan pemuda, seperti Pendidikan, ketenagakerjaan, hak-hak sipil, atau lingkungan. Isu-isu ini menjadi dasar penyusunan pesan politik yang akan disampaikan secara digital. *Kedua*, perumusan pesan politik

digital, setelah isu utama diidentifikasi, organisasi menyusun pesan-pesan politik yang bersifat edukatif, inspiratif, dan mudah dipahami. Pesan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik *digital native*, yaitu generasi muda yang aktif di media sosial. *Ketiga*, produksi konten edukatif & kreatif digital, tahapan ini mencakup pembuatan konten dalam bentuk visual, video pendek, infografik, podcast, atau artikel opini yang disebarluaskan melalui platform seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), Youtube, dan WhatsApp. Konten yang menarik dan informatif berperan penting dalam meningkatkan literasi politik. *Keempat*, Interaksi dan diskusi publik secara *online*. Organisasi pemuda perlu membuka ruang partisipatif dalam bentuk diskusi daring, *polling*, forum, atau *live talk*. Interaksi ini memperkuat keterlibatan langsung audiens muda dalam memahami isu dan menyuarakan pendapatnya secara terbuka. *Kelima*, Pemantauan Dampak dan Keterlibatan Audiens Muda. Pada tahapan ini organisasi kemudian melakukan pemantauan terhadap dampak kampanye politik digital yang telah dilakukan. Ini mencakup metrik seperti jumlah jangkauan, tingkat partisipasi, tanggapan audiens, dan keterlibatan dalam isu politik yang diangkat. *Keenam*, evaluasi dan penguatan literasi politik digital, tahapan ini dilakukan evaluasi atas strategi yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penguatan literasi politik digital melalui pelatihan, peningkatan kapasitas kader, atau pengembangan strategi baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari diagram alir berikut ini:



Sumber: diolah oleh Penulis, 2025

Gambar 7.1. Alur Strategi Digitalisasi oleh Organisasi Pemuda dalam Meningkatkan Kesadaran Politik

Kolaborasi dengan Institusi Politik dan Masyarakat Sipil

Dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda, organisasi pemuda tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan institusi politik seperti partai politik, lembaga legislatif, dan penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organizations/CSOs*) seperti LSM, komunitas advokasi, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini memperluas akses informasi politik yang kredibel dan membuka ruang partisipasi yang lebih

luas dan inklusif bagi pemuda. Menurut Diamond (1999), masyarakat sipil berperan penting dalam memperkuat demokrasi karena dapat menjadi jembatan antara negara dan warga negara, terutama dalam hal advokasi, pendidikan politik, dan pengawasan terhadap proses politik. Dalam konteks ini, organisasi pemuda yang bermitra dengan masyarakat sipil dapat memperkuat posisi mereka sebagai aktor perubahan yang kritis sekaligus konstruktif. Kerja sama dengan institusi politik juga strategis untuk memberikan pengalaman politik langsung bagi pemuda melalui program seperti sekolah legislatif, magang di lembaga negara, atau forum dialog kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Putnam (1993), yang menyatakan bahwa partisipasi dalam jaringan sosial yang berorientasi pada nilai publik dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi.

Bentuk kolaborasi ini juga dapat diwujudkan dalam kampanye bersama, pelatihan kepemimpinan politik, pendidikan pemilih pemula, hingga advokasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy advocacy*). Organisasi pemuda yang bekerja bersama KPU, Bawaslu, atau partai politik reformis, misalnya, dapat menjangkau pemilih muda yang selama ini kurang tersentuh oleh kampanye formal. Menurut Budiardjo (2019), kesadaran politik berkembang tidak hanya melalui informasi, tetapi juga dari keterlibatan aktif dalam proses politik. Oleh karena itu, ketika organisasi pemuda didukung oleh aktor politik dan masyarakat sipil lainnya, mereka dapat membentuk ruang dialog publik yang sehat dan mendorong pemuda untuk menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Dengan membangun kolaborasi multisektor ini, organisasi pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat pendidikan politik, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial politik yang mampu mengartikulasikan kepentingan generasi muda secara lebih efektif

KESIMPULAN

Organisasi pemuda memiliki posisi strategis dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran politik generasi muda di tengah dinamika kehidupan demokrasi kontemporer. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, organisasi pemuda tidak hanya menjadi sarana pengembangan potensi individu, tetapi juga memainkan peran sentral dalam mendidik, menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi, mewakili kepentingan generasi muda, dan melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan politik. Melalui pendekatan berbasis pengalaman langsung dan keterlibatan aktif, organisasi pemuda menjadi wadah penting dalam membangun budaya politik yang partisipatif, inklusif, dan kritis. Secara teoritik, pemahaman kesadaran politik menurut Rush dan Althoff, serta Almond dan Verba, menunjukkan bahwa kesadaran politik mencakup dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (emosi dan loyalitas politik), serta evaluatif (penilaian kritis terhadap sistem politik). Organisasi pemuda memiliki kapasitas untuk mengembangkan ketiga dimensi ini secara seimbang melalui berbagai kegiatan pendidikan politik dan pengorganisasian sosial

Strategi organisasi pemuda dalam meningkatkan kesadaran politik terus mengalami transformasi, terutama dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan digitalisasi informasi telah membuka ruang baru untuk pendidikan politik yang lebih luas, partisipatif, dan sesuai dengan karakter generasi *digital native*. Organisasi pemuda kini dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui kampanye daring, konten digital edukatif, serta forum diskusi interaktif di berbagai platform media sosial. Namun tantangan tetap ada, mulai dari politisasi organisasi, pragmatisme elite muda, hingga apatisisme politik di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, organisasi pemuda perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan, menjaga independensi dan idealisme, serta

beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan berdaya dalam memajukan demokrasi. Dengan demikian, peran organisasi pemuda dalam meningkatkan kesadaran politik bukan hanya penting, tetapi juga mendesak. Di tangan pemuda yang terdidik, terorganisir, dan sadar politik, masa depan demokrasi Indonesia dapat diarahkan menuju sistem yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections On the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Budiarjo Miriam. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press
- Haryanto, I. (2013). *Pemuda dan Demokrasi: Dinamika Gerakan Pemuda Pasca Reformasi*. Jakarta: Kompas
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). *The Networked Young Citizen: Social Media, Political Participation and Civic Engagement*. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>

- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press
- Rush, M., & Althoff, P. (1992). *An Introduction to Political Sociology*. New York: Harvester Wheatsheaf
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.

BAB 8

PENDIDIKAN POLITIK INFORMAL MELALUI SENI DAN BUDAYA

Dr. Sapta M.T. Purba, S.Sos, M.Pd.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI
E-mail: saptapinanggol@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan Politik merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Namun, jalur pendidikan formal saja tidak cukup mengemban tanggung jawab ini. Di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan kreativitas, pendidikan politik informal melalui seni dan budaya memperlihatkan efektivitas luar biasa dalam membangun kesadaran kritis, partisipasi, dan identitas kebangsaan. Tulisan pada bab ini membahas bagaimana mekanisme dan dampak pendidikan politik informal melalui seni dan budaya, disertai contoh dan referensi akademik relevan. Isu kritis yang muncul terkait keterkaitan pendidikan politik informal dengan seni dan budaya di kalangan generasi muda saat ini dan masa depan adalah rendahnya partisipasi politik formal di kalangan pemuda yang disertai meningkatnya ekspresi politik informal melalui media budaya populer, seni, dan ruang-ruang sosial nonformal. Pendidikan politik informal yang sering hadir melalui seni dan budaya populer menjadi alternatif bagi generasi muda dalam memahami dan berpartisipasi dalam dunia politik karena pendidikan politik formal dirasakan kurang relevan dan menarik bagi mereka. Tantangan kritisnya adalah bagaimana pendidikan politik informal ini dapat diarahkan agar tidak hanya menjadi bentuk ekspresi estetis atau hiburan semata, tetapi juga mampu

menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan kesadaran politik yang kritis.

Pendidikan politik dapat dipahami sebagai salah satu fungsi politik yang ditunaikan oleh struktur politik masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai nilai, simbol, keyakinan, pandangan tentang sistem politik melalui proses dialog, terbuka, kritis, rasional dan penyadaran. Dengan adanya pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Menurut Combs (1976:2), pendidikan dapat dilakukan dalam tiga bentuk, di antaranya: 1) Pendidikan Formal, yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan sekolah yang bersifat teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas; 2) Pendidikan Nonformal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilaksanakan, tetapi berlaku mengikuti peraturan peraturan yang tetap dan tepat; 3) Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman-pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai meninggal, baik dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan sehari-hari.

Mengapa pendidikan politik informal berkaitan erat dengan seni dan budaya di kalangan generasi muda? Hal ini terkait dengan fakta bahwa seni dan budaya merupakan medium ekspresi yang paling dekat dan mudah diakses oleh generasi muda, terutama di era digital. Budaya populer seperti musik, film, *street art*, media sosial, dan komunitas seni menjadi wadah efektif untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai politik secara menarik dan *relatable*. Dengan begitu, pendidikan politik informal melalui seni dan budaya dapat menggerakkan partisipasi politik generasi muda yang lebih luas, karena mereka lebih tertarik dan mudah memahami bahasa budaya mereka sendiri ketimbang pendidikan politik formal yang konvensional.

Bagaimana hubungan atau keterkaitan antara pendidikan politik informal dan seni budaya tersebut terjadi dan penting untuk masa kini dan masa depan? Penyebaran nilai politik melalui seni dan budaya berperan sebagai medium yang efektif dalam menyampaikan ide-ide politik, kritik sosial, serta nilai demokrasi kepada generasi muda dalam bentuk yang menarik dan mudah diterima. Hal ini membuat pendidikan politik informal lebih relevan dan berdampak bagi kaum muda yang mengonsumsi budaya populer. Melalui tulisan ini, diharapkan kita lebih memahami pendidikan informal melalui seni dan budaya serta tangangannya dalam meningkatkan partisipasi politik.

PENDIDIKAN POLITIK INFORMAL MELALUI SENI DAN BUDAYA SERTA TANTANGANNYA DALAM MEINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK

Pendidikan Politik Informal didefinisikan sebagai proses transfer pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan politik yang terjadi di luar institusi pendidikan formal. Pendidikan politik informal dapat berwujud sosialisasi komunitas, diskusi warung kopi, *jagongan*, hingga kegiatan seni dan budaya yang mengedukasi tanpa kurikulum baku, tetapi efektif karena mengadopsi pendekatan dialogis dan partisipatif. Jalur informal memungkinkan masyarakat belajar politik secara alami, dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta tidak kaku dan cenderung membentuk pengalaman personal yang mendalam. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan proses yang wajar, jika terjadi konflik di anggap partai politik dapat mengatasinya. Proses seseorang dalam orientasi memperoleh sikap terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada, mencari dan mengajak orang untuk berbakat untuk turut aktif

dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik (Mii et al., n.d.).

Simkins (1976), menganalisis perbedaan pendidikan nonformal dan pendidikan formal secara kontras berdasar pada beberapa terminologi, di antaranya: tujuan program, waktu, system pembelajaran yang digunakan, dan kontrol (sistem monitoring dan evaluasi). Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasannya adalah, mengembangkan tipe ideal dari sebuah penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat memberikan suatu kerangka kerja yang bermanfaat serta menghasilkan sejumlah model yang dapat dipakai dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal. Apalagi kalau kurikulum (program) pendidikan nonformal yang dikembangkan memperhitungkan fleksibilitas, kondisi daerah (masyarakat), respons positif masyarakat dan berbagai sumber (lingkungan) yang dianggap menguntungkan serta dapat dijadikan acuan pengembangan program pendidikan nonformal. Berikut model ideal pendidikan formal dan nonformal.

Tabel 8.1. Model Ideal Pendidikan Formal dan Nonformal

Kriteria	Formal	Nonformal
Tujuan	Jangka Panjang dan Umum Asas Kepercayaan	Jangka Pendek dan Spesifik Bukan Asas Kepercayaan
Waktu	Relatif Panjang / Persiapan / Waktu Penuh	Relatif Singkat / Berulang / Paruh Waktu
Isi	Terstandarisasi / Masukan	Individual / Keluaran
Sistem	Syarat Masuk	Siswa Mementukan

Rekrutmen	Menentukan Siswa	Syarat Masuk
Kontrol	Eksternal / Hierarkis	Membangun Diri / Demokratis

Sumber: <https://nbasis.wordpress.com/2014/03/09/konsep-pendidikan-non-formal/>

Sementara itu terdapat perbedaan antara pendidikan formal dan dua sistem pendidikan lanjutan lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 8.2. Perbedaan Antara Pendidikan Formal dan Dua Sistem Pendidikan Lanjutan Lainnya

Kriteria	Pendidikan Formal	Pendidikan Informal dan Nonformal
Tujuan	Memperoleh keahlian untuk digunakan sepanjang hidup dan mendapatkan ijazah.	Memperoleh keahlian untuk saat ini dan dapat digunakan saat itu juga.
Waktu	Mebutuhkan waktu lama untuk mendapatkan ijazah dan konsentrasi penuh.	Waktu yang singkat dan diprogram untuk kegiatan-kegiatan berjangka pendek.
Kurikulum	Pendekatan Akademis	Pendekatan Nonakademis, namun sesuai dengan kebutuhan kelompok/serta fungsional dalam

		mencapai target.
Metodologi	Kelembagaan Hubungan Guru/Siswa Bersifat Otoriter	Fleksibel, berorientasi pada pembelajaran mandiri serta membantu orang dewasa dalam pembelajaran mandiri.
Kontrol	Hubungan <i>Top-down</i>	Fleksibel, tergantung pada situasi, tetapi sebagian besar dimulai dari peserta didik.

Sumber: <https://nbasis.wordpress.com/2014/03/09/konsep-pendidikan-non-formal/>

Pendidikan Politik Berbasis Kearifan Lokal

Istilah lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut setting. Setting adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami usaha manusia dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian tersebut disusun secara

etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirnya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan (Ridwan, 2007; Sentosa dan Suprpti, 2020).

Kehidupan manusia dalam konteks negara-bangsa tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial-politik. Manusia yang selalu hidup berkelompok pada masyarakat modern sangat lazim apabila kedudukannya sebagai bagian dari keanggotaan sebuah bahkan sejumlah organisasi. Namun, organisasi sebagai wahana pengembangan individu dan/atau kolektif bagi manusia tersebut dikenal dengan istilah negara sehingga sebagai individu manusia tersebut dinamakan warga negara. Secara umum, setiap individu manusia memiliki identitas diri sebagai warga dari suatu negara, artinya ia memiliki status kewarganegaraan. (Sapriya dan Runik Mahfiroh, n.d.)

Seni dan budaya sering digunakan untuk menyampaikan pesan politik secara efektif karena beberapa alasan utama berikut:

Ekspresi yang Unik dan Memikat Perhatian

Seni dan budaya mampu mengungkapkan pesan atau ideologi politik dengan cara yang unik dan menarik sehingga mudah menangkap perhatian publik. Melalui simbol, metafora, cerita, musik, dan visual yang menggugah emosi, pesan politik dapat disampaikan lebih kuat dan tahan lama dibandingkan komunikasi biasa[1].

Mampu Mempengaruhi Emosi dan Pikiran

Melalui medium seni, pesan politik tidak hanya disampaikan secara rasional tetapi juga menyentuh perasaan dan imajinasi audiens. Hal ini membuat audiens lebih terbuka dan

termotivasi untuk merenungkan, mengkritisi, bahkan bertindak atas isu-isu yang disampaikan.

Mendorong Pemikiran Kritis dan Refleksi Sosial

Pesan politik melalui seni sering berisi kritik terhadap status quo dan mengajak masyarakat berpikir ulang tentang kondisi sosial-politik mereka. Seni menjadi media untuk memprovokasi pemikiran baru dan refleksi mendalam sehingga meningkatkan kesadaran politik.

Mempererat Solidaritas dan Identitas

Seni dan budaya berperan sebagai perekat sosial yang membangun solidaritas dan identitas politik suatu kelompok atau masyarakat. Karya seni bisa menjadi simbol perjuangan, harapan, dan nilai-nilai politik yang memperkuat keterikatan kolektif terhadap suatu agenda atau ideologi.

Media Komunikasi yang Inklusif dan Interaktif

Media seni, seperti mural politik atau pertunjukan rakyat, tidak hanya menyampaikan pesan satu arah tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Hal ini membuat pesan lebih hidup dan relevan karena melibatkan dialog serta keterlibatan langsung warga.

Kemudahan Penyebaran di Era Digital

Seni dan budaya kini dikreasikan dalam berbagai format digital yang mudah disebarkan melalui media sosial, menjangkau audiens lebih luas, terutama generasi muda yang lebih responsif terhadap konten visual dan audio kreatif.

Seni mural politik merupakan sebuah bentuk seni rupa yang telah lama menjadi medium penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik, sosial, dan budaya di berbagai belahan dunia (Allen, S: 2019). Di Indonesia, seni mural politik

memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perubahan politik dan sosial di negara ini. Saat ini, seni mural politik tidak hanya menjadi bentuk ekspresi kreatif seniman, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik dan hubungan internasional yang efektif di kalangan masyarakat. Melalui analisis terhadap sejarah seni mural politik di Indonesia, termasuk masa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan era reformasi, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana seni mural politik telah berperan sebagai cerminan perjuangan politik dan budaya di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang telah terjadi, seni mural politik juga menjadi sarana penting untuk menyuarakan kritik terhadap respons pemerintah, memperjuangkan hak-hak sosial, dan menyebarkan informasi yang akurat dan relevan tentang kesehatan masyarakat. Dalam konteks hubungan internasional, seni mural politik juga dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kerjasama antarbangsa, mempromosikan perdamaian dan keadilan global, serta menggugah kesadaran akan isu-isu lintas batas yang memengaruhi kehidupan manusia secara universal (Frank dan Ristic, 2020).

Mural tidak hanya sekadar menghiasi dinding-dinding kota, tetapi juga menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau tidak representatif (Popo, 2013). Dengan menyediakan ruang untuk ekspresi dan partisipasi politik warga negara, mural politik membantu memperkuat demokrasi dan memperluas ruang untuk menyuarakan pendapat di masyarakat (Pramudita et al., n.d.). Komunitas seni dan budaya sering mengadopsi prinsip *open dialogue*, demokrasi internal, dan advokasi publik, sehingga anggotanya 'terdidik' secara politik melalui praktik nyata, bukan sekadar teori. Pertemuan komunitas, dialog budaya, dan pentas

seni bersama memberi ruang diskusi isu-isu aktual seperti toleransi, pluralisme, dan keadilan.

Seni dan budaya dapat menjadi media yang sangat efektif dalam pendidikan politik informal karena keduanya memiliki daya tarik emosional, komunikatif, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara inklusif. Hubungan antara seni, budaya, dan politik dalam pembelajaran informal adalah suatu proses saling terkait di mana seni menjadi medium ekspresi dan edukasi, budaya sebagai konteks dan nilai dasar sosial, dan politik sebagai isi serta tujuan pembelajaran. Melalui interaksi ini, pembelajaran politik tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi hidup dan berkembang dalam aktivitas seni budaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga menghasilkan kesadaran politik yang lebih mendalam dan partisipasi warga yang aktif dan kritis.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan meninggal, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada anak-cucu mereka; melainkan dapat pula secara horizontal yaitu manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya. Kebudayaan dapat diperoleh melalui belajar di pendidikan formal maupun informal.

Politik berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya soal kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Sehingga tujuan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dalam lingkungan

masyarakat dan negara dimana mereka berada. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan politik mereka terbangun kesadaran akan status dan perannya masing-masing dalam kehidupan bernegara serta memaksimalkan peran kewarganegaraannya (Prayugo dan Prayitno, 2022).

Hubungan politik juga seni, jadi politik merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan, yang berhubungan langsung dengan manusia. Sedangkan keluarga merupakan ikatan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan ini disebut dengan keluarga inti. Jadi, hubungan politik dengan keluarga ialah sebagai alat untuk menyatukan kedekatan seorang anak kepada orangtua, selain itu bertujuan untuk memberikan dorongan kepada anak agar anak mau mengikuti perkembangan politik. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam urusan negara dan bangsa, pendidikan politik harus mendorong dan memperluas pemahaman masyarakat dalam kehidupan politik. Masyarakat harus dikembangkan dan disadarkan sebagai sumber daya manusia yang potensial, dan agar dapat terlibat dalam politik, masyarakat juga harus mendapatkan pendidikan politik yang adil (Rosyada, 2017). Yang diperlukan agar masyarakat mau terlibat dalam kegiatan politik adalah bimbingan dan arahan.

Pendidikan tentang politik sangat penting bagi masyarakat. Dengan memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan politik, masyarakat dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam kehidupan mereka. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajiban dan hak-hak kewarganegaraan mereka. Selain itu, pendidikan politik juga berkontribusi pada pengembangan sikap dan karakter masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam politik pengambilan keputusan. Lebih lanjut, belajar pendidikan politik dapat membantu masyarakat untuk memahami dinamika politik, mengevaluasi

kinerja pemerintah, dan memberikan masukan yang konstruktif bagi kemajuan negara. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan partisipatif dalam kehidupan bernegara (Nuryadi dan Widiatmaka, 2023).

Pendidikan politik melalui seni dan budaya kemasyarakatan menjadi salah satu strategi yang inovatif yang dilakukan oleh KPU. Dalam analisa konsep oleh Fuad, Musa, dan Hashim (2022) *“The type of culture that had an impact on the educational context was distinguished into three categories, which were organizational cultures, sociocultural norms and national cultures”*. Maka lingkungan masyarakat yang kondusif dan hubungan positif yang dijalin dengan baik akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap budaya sehingga dapat mempengaruhi, berbagi dan membentuk perilaku yang diinginkan. Kebudayaan suatu masyarakat akan mempengaruhi proses pembentukan kepribadian seorang individu dalam pendidikan. Dalam konsep ini, pendidikan tidak hanya diidentikkan sebagai kegiatan sekolah, tetapi juga proses pembudayaan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua sektor strategi yang dapat saling mendukung.

Kelebihan dan Tantangan

Kelebihan:

1. Mengedukasi seluruh lapisan masyarakat tanpa batas usia atau latar belakang pendidikan.
2. Lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan responsif pada isu yang aktual.
3. Meningkatkan kohesi sosial serta solidaritas antarkelompok berbeda.

Tantangan

1. Benturan antara misi pendidikan dan komodifikasi seni/budaya, di mana pesan politik bisa dikemas secara dangkal.
2. Keterbatasan akses (terutama di daerah yang kurang ruang kreatif dan infrastruktur seni).
3. Risiko kooptasi politik ketika seni hanya menjadi alat kampanye elite.

Pendidikan politik merujuk pada proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar politik dan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik berfokus pada pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, debat publik, dan advokasi kebijakan. Tujuan pendidikan politik adalah untuk mengembangkan kesadaran politik, pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, pengetahuan tentang sistem politik, dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat demokratis.

Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan bisa menjadi insan yang kreatif, kritis, mandiri, otonom, mantap dan partisipatif bila kepadanya dihadapkan kepada hal-hal dan kesempatan untuk berperilaku secara demokratis dalam sebuah sistem demokrasi. Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik (*political insight*) mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naif tidak kritis; yaitu mudah dan gampang percaya dan meyakini “kebenaran” mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik dan propaganda politik yang bersifat melenakan daya kognitif (pengenalan dan nalar akal sehat). Dengan begitu setiap orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, pengecekan, verifikasi

terhadap realitas politik yang tengah berlangsung (Prayugo dan Prayitno, 2022).

Pendidikan Politik menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya politik identitas dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan politik melalui beberapa kegiatan. Pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal seperti di sekolah menengah dan pendidikan tinggi khususnya untuk pemilih pemula. Pendidikan politik untuk masyarakat luas dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pagelaran seni dan budaya, perlombaan atau kompetisi, sosialisasi peraturan melalui kantor kelurahan atau tempat lain, atau upacara adat. Pendidikan politik dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum khususnya partisipasi dalam pemilu atau pilkada. Partisipasi dilakukan tanpa diskriminasi atau membedakan latar belakang setiap individu. Pendidikan politik dimaksudkan agar masyarakat memiliki pemahaman sekaligus kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama (Nuryadi dan Widiatmaka, 2023).

Pendidikan politik tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga formal tetapi juga partai politik, meskipun saat ini partai politik tidak menunjukkan peranan yang signifikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui pertunjukan seni budaya seperti wayang yang berusaha untuk menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila (Alfaqi, Shofa, dan Habibi, 2019). Pendidikan politik diharapkan dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia sehingga tidak mudah terpecah belah. Keberagaman di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus dijaga dan dirawat (Nuryadi, Zamroni, dan Suharno, 2020).

Implementasi kegiatan yang melibatkan simulasi dan diskusi interaktif menunjukkan bahwa metode *experiential learning* (Kolb, 1984) sangat efektif dalam menyampaikan materi politik kepada pemuda (Budiwan, 2018). Melalui pengalaman langsung seperti simulasi pemungutan suara dan dialog dengan tokoh politik lokal, pemilih muda tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tetapi juga pengalaman nyata tentang bagaimana proses politik bekerja (Hayadi, 2018). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *active learning* yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam (Supriatna et al., 2024). Hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman politik dan minat berpartisipasi dalam Pilkada setelah program sosialisasi mendukung teori *political efficacy*, yang menyatakan bahwa kepercayaan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi politik dapat meningkatkan partisipasinya (Hayadi, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang memberikan ruang bagi diskusi interaktif dan simulasi politik dapat meningkatkan rasa percaya diri pemilih muda dalam memahami dan berkontribusi terhadap proses politik. (Nuryadi dan Widiatmaka, 2023)

KESIMPULAN

Seni dan budaya efektif sebagai alat penyampai pesan politik karena daya tarik emosional dan estetika, kemampuan menyentuh pikiran dan refleksi kritis, juga kapasitas membangun identitas dan solidaritas sosial. Ini menjadikan seni budaya lebih dari sekadar hiburan, tetapi sekaligus alat strategis dalam pendidikan politik, kritik sosial, dan advokasi perubahan. Oleh karena itu, pendidikan politik informal yang terintegrasi dengan seni dan budaya bukan hanya sekedar hiburan atau forum ekspresi, tapi memerlukan pembekalan *critical thinking* agar pesan-pesan politik yang disampaikan dapat dipahami

secara mendalam dan menghasilkan sikap politik yang kritis, mandiri, serta konstruktif. Ini menjadi penting untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya sebagai objek politik, melainkan agen perubahan yang mampu menjaga dan mengembangkan demokrasi yang sehat dan berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsara Pramudita, M., Abdul, A., & Azzqy, R. (n.d.). Memahami Politik dan Hubungan Internasional Melalui Seni Mural Politik di Jakarta Selatan.
- Mii, R., Reza, M., & Latuda, F. (n.d.). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. 3(2).
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2023a). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Untuk Mengantisipasi Maraknya Politik Identitas Pada Pemilihan Umum. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Pendidikan Politik Lintas Generasi Dalam Membangun. (n.d.). Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. (n.d.).
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. 3, 427–442. <http://jurnaledukasia.org>
- Sapriya, H., & Runik Mahfiroh, Me. (n.d.). Isu Sosial-Politik dan Sosial-Budaya dalam Pendidikan Dasar.
- Sentosa, A., & Suprpti, W. (2020). Pendidikan Politik Bagi Siswa Kelas XII Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior>

BAB 9

STUDI KASUS PENDIDIKAN POLITIK MELALUI MEDIA DI NEGARA LAIN

Emillia, S.H., M.Kn.
Institut Teknologi PLN
E-mail: emillia@itpln.ac.id

PENDAHULUAN

Kata “politik” secara etimologi diadopsi dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *polis* yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang mandiri dan *teia* yang memiliki arti urusan. Dengan demikian dalam bahasa Indonesia politik berarti kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Emillia, 2017). Selanjutnya dalam konteks berikutnya maka politik berkaitan erat dengan hal-hal seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan distribusi kekuasaan.

Dengan demikian kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan politik sudah jauh dilaksanakan sebelum adanya peradaban manusia modern, bahkan di dusun dan pedesaan terpencil pun sudah melakukan aktivitas politik walaupun masih sangat sederhana. Oleh karena itu, dalam perkembangannya banyak tokoh-tokoh yang memberikan kajian mengenai kehidupan politik. Demikian juga saat ini, dimana terjadi perkembangan teknologi terutama dalam bidang kemajuan teknologi komunikasi dengan disertai terjadinya globalisasi yang mengakibatkan perkembangan teknologi informasi pun juga menjadi sangat pesat. Sehingga dalam hal ini maka aktivitas politik pun ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut (Budiardjo, 2016).

Aktivitas politik berkembang dengan pesat dalam masyarakat melalui media sosial dengan kemajuan digital seperti internet.

Masyarakat tidak secara otomatis menyadari bahwa sebetulnya sudah melakukan pendidikan politik dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku maupun ikut serta dalam pemilihan calon kepala negara dan lembaga perwakilan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, pendidikan politik dapat didefinisikan menjadi kegiatan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ideal untuk mengatur warga negaranya yang menciptakan karakter masyarakat menjadi bertanggung jawab dan ikut serta dalam kegiatan politik di negaranya dengan berbagai cara termasuk media sosial.

Pembahasan konsep politik harus berpijak pada teori politik yang digunakan (Nasiwan, 2012). Pada dasarnya terdapat dua teori politik yang dapat dijadikan panduan yaitu:

Teori Politik Klasik

Teori ini lahir berdasarkan pemikiran tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas politik dengan berpijak pada moral, keadilan, kebijakan dan hubungan yang seimbang antara seseorang dengan kelompok. Tujuan dari teori ini yaitu semangat warga negara yang merupakan sumber demi tercapainya program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Teori Behavioralisme

Teori ini dikembangkan oleh David Easton (Varma, 2010). Dalam teori behavioralisme menunjukkan bahwa aktivitas politik masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan proses aktivitas pembelajaran melalui pengalaman trial and error untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sebenarnya. David Easton

menganggap bahwa dukungan dari masyarakat merupakan dasar kebijakan yang dapat diambil dalam kegiatan politik. Pemahaman teori behavior dalam pendekatan politik masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas politik berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat tersebut seperti menggunakan media komunikasi. Penggunaan media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan untuk mengirimkan pesan politik. Dalam hal ini terdapat tiga jenis media komunikasi yang dipakai dalam masyarakat yaitu media komunikasi massa, media komunikasi antar personal dan media komunikasi organisasi. Media komunikasi tersebut kemudian dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan berbagai pesan termasuk pesan politik pada masa pemilihan calon wakil rakyat.

MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK

Kemajuan di bidang teknologi informasi seperti yang telah dijelaskan di atas tidak disertai dengan perkembangan penggunaannya. Kemajuan juga diibaratkan seperti dua mata pedang, dimana pada bilah sisi pertama dapat membantu penggunaannya dan sisi bilah yang lain dapat menimbulkan dampak negatif bagi pembaca. Hal ini dapat dilakukan apabila penggunaannya tidak bertanggung dan jujur sehingga menyebarkan berita yang merugikan pihak lain (Emillia, 2020).

Apabila melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh L.W. Evelina pada bulan Juni 2017 silam, memperlihatkan bahwa dengan diluncurkannya *Smartphone GSM* menggunakan teknologi Android dengan harga yang relatif murah yang tersedia di pasaran berdampak meningkatnya pemakai perangkat tersebut (Evelina, 2015). Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan banyaknya *gadget user* dengan mudah memperoleh informasi apapun melalui berbagai aplikasi media

sosial yang tersedia dengan menggunakan layanan internet. Oleh sebab itu, media sosial merupakan perangkat sosial yang menggunakan layanan internet sebagai akibat pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi (Cahyono, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa melalui perangkat GSM, *user* dapat mengakses dengan mudah berbagai pesan dan informasi termasuk pesan dalam bidang politik.

Pesan politik yang disampaikan melalui media sosial ikut memiliki kontribusi dalam memengaruhi politik masyarakat untuk memilih kandidat yang dipilihnya ketika pemungutan suara berlangsung. Dalam hal ini tentu saja terjadi perubahan pemakaian media sosial yang semula hanya sebagai media komunikasi semata-mata, kemudian berubah menjadi lahan para pendukung untuk melakukan kampanye dan mengajak masyarakat untuk menentukan pilihannya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di berbagai negara (Juwandi, 2019). Media sosial dijadikan alat untuk menggiring opini publik tentang kebijakan dan posisi politik serta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Disamping itu, politisi di seluruh dunia telah menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan melakukan dialog dengan masyarakatnya serta menciptakan forum diskusi politik. Para politisi juga menggunakan media internet untuk melakukan kampanye. Kemampuan ini dapat menarik perhatian para pemilih. Oleh karena itu, *cyberspace* sering digunakan oleh penguasa untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian melalui jejaring digital dapat terjadi pertukaran informasi dari politisi kepada masyarakat yang dapat menciptakan forum sebagai sarana penyaluran opini publik. Salah satu media yang dipakai oleh para politikus untuk membuat dan menyebarkan pesan maupun berdialog adalah menggunakan perangkat

Artificial Intelligence atau disebut juga kecerdasan tiruan yang dikenal dengan istilah AI.

KECERDASAN TIRUAN PERSPEKTIF STRATEGI POLITIK MODERN

AI adalah salah satu program komputer yang dapat melakukan berbagai pekerjaan seperti layaknya menggunakan otak manusia. Pada mulanya komputer hanya dipakai untuk pekerjaan menulis dan mengumpulkannya dalam bentuk *soft file*. Namun, dengan perkembangan teknologi akhir dekade ini, peran komputer semakin bertambah. Sehingga dapat mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia.

Latar belakang AI diciptakan oleh John Mc Charty seorang ahli computer dari Stanford University. Tujuan diciptakannya AI yaitu untuk membuat kecerdasan laksana otak manusia dengan menggunakan computer. AI dirancang untuk dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa dengan usser untuk memecahkan berbagai permasalahan dan secara otomatis dapat meningkatkan kecerdasan dirinya sendiri (Pabubung, 2023).

Dengan demikian, AI menjadi peran penting dalam media komunikasi termasuk dalam bidang komunikasi politik. Dalam bidang politik, AI dapat dipakai dalam menganalisis data peserta pemilu, merancang dan membuat pesan kampanye politik yang efisien dan menyebarkan informasi tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemakaian AI dalam interaksi politik memberikan manfaat bagi partai politik dan calon kandidat untuk mengetahui perilaku pemilihnya dan opini masyarakat secara komperhensif maka strategi kampanye politik dapat lebih tepat sasaran (Hariyani dan Rahmawati, 2024).

Pengenalan cara berpolitik menggunakan media melalui perangkat AI merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dapat dilakukan baik dalam internal partai politik maupun eksternal partai yang dapat

berupa komunikasi lisan secara langsung seperti tatap muka maupun tertulis. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran AI dalam menyusun strategi interaksi politik (Sampurna, et al, 2025) yaitu:

1. Analisis *Large Scale Data* dan Perkiraan Karakter Pemilih
AI dapat melakukan analisis *large scale data* yang didapat dari berbagai source seperti media soasial, hasil survei dan data kependudukan yang akan digunakan untuk mengetahui perilaku para pemilih. AI juga akan memperkirakan tren arah dari pemilih, sehingga pesan kampanye yang dirancang dapat disesuaikan untuk masing-masing kelompok.
2. Menyesuaikan Pesan Kampanye
AI dapat melakukan penyesuaian pesan berdasarkan data individu pemilih seperti keinginan pemilih, lokasi pemilih dan perilaku online agar pesan tersebut tepat sasaran sehingga pemilih tidak terpengaruh oleh partai politik lain.
3. Pengendalian dalam Komunikasi yang Efektif
AI secara otomatis melakukan komunikasi politik dengan menggunakan *chatbot*/agen percakapan dalam menjawab pertanyaan dari pemilih, membuat postingan jadwal dan melakukan analisa keinginan masyarakat secara nyata. Hal ini memungkinkan AI untuk memberikan respon yang cepat terhadap informasi dalam mengatur kampanye.

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN KECERDASAN TIRUAN DALAM INTERAKSI POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK

Penggunaan AI dalam interaksi politik mengakibatkan dampak negatif dan positif dalam memengaruhi opini masyarakat. Dampak positifnya penggunaan AI dalam membuat interaksi politik dapat terlihat dengan jelas ketika membuat kampanye menjadi lebih efisien. Aktor politik tidak perlu lagi merancang pesannya kepada masyarakat sendiri namun dapat

mengutarakannya sesuai dengan data kependudukan, psikografis dan geografis dari pemilih dengan menggunakan AI. Dengan demikian pesan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kondisi kelompok tertentu misalnya dalam penggunaan pemilihan umum. Terbukti dengan meningkatnya peserta politik serta membuat aktor politik menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi dampak negatif dalam penggunaan AI yaitu dapat menciptakan polarisasi informasi dimana dalam pembuatan aplikasi kampanye menggunakan algoritma yang hanya menyajikan muatan yang sesuai dengan pandangan politik dari *usernya* saja. Kondisi ini disebut *filter bubble* atau gelembung informasi sehingga publik terpengaruh dengan informasi yang diberikan oleh *user*. Hal ini mengakibatkan ruang publik digital serta komunikasi antar masyarakat menjadi terganggu (Nurfajri, 2025).

AI juga dapat dipakai untuk memanipulasi informasi masyarakat. Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pemakaian aplikasi *deepfake* atau melakukan manipulasi pada *content* dengan cara membuat *content* video dengan suara palsu dengan menggunakan figur tokoh politik tertentu yang sifatnya mengelabui publik. Praktik tersebut memiliki dampak membuat pandangan masyarakat menjadi negatif terhadap lawan politik. Dengan demikian, pemakaian AI yang tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan penyebaran *content* yang bermuatan pesan politik palsu atau hoaks yang dapat membingungkan masyarakat.

Oleh karena itu, walaupun pemakaian kecerdasan tiruan memberikan banyak keuntungan dalam interaksi politik, namun dapat menimbulkan dampak negatif yang harus juga menjadi perhatian. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya kebijakan yang kuat dan membangun etika para tokoh politik agar teknologi tersebut dipakai secara bijak dan jujur untuk memperkuat demokrasi. Dalam hal ini diperlukan adanya

transparansi algoritma, pembelajaran digital dan pengawasan dalam penggunaan kecerdasan tiruan dalam kampanye politik untuk membantu membentuk opini masyarakat menjadi lebih sehat dan transparan.

PENERAPAN ETIKA INTERAKSI POLITIK PERSPEKTIF PENGGUNAAN KECERDASAN TIRUAN

Terminologi etika secara umum berkaitan dengan perbuatan manusia yang merupakan tingkah laku yang baik atau buruk atau dapat dikatakan sikap manusia yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan dan gerakan-gerakan dari anggota tubuh. Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh sajalah yang dapat dinilai, sebaliknya perbuatan yang dilakukan secara tidak sadar tidak dapat dinilai baik dan buruknya (Emillia, 2017).

Seperti dengan ilmu pengetahuan lainnya, etika juga memiliki cabang ilmu pengetahuan yaitu salah satunya adalah etika politik atau beretika dalam melakukan interaksi politik. Etika dalam berinteraksi politik berkaitan dengan tingkah laku dari para penguasa seperti aktor politik, partai politik, lembaga negara dan publik. Dalam hal ini para tokoh tersebut harus melakukan komunikasi dalam ranah politik secara transparan, jujur dan bertanggung jawab serta tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena ketika melakukan interaksi dalam bidang politik maka dapat mempengaruhi terbentuknya opini masyarakat dalam mengambil keputusan politik dan mempengaruhi kualitas dari demokrasi itu sendiri.

Penggunaan etika dalam melakukan interaksi politik apabila dilihat dalam kerangka kecerdasan tiruan merupakan topik yang sangat penting saat ini (Budiardjo, 2016). Kecerdasan tiruan telah merubah teknik berinteraksi dalam politik dari pelaksanaan kampanye sampai dengan menyebarluaskan informasi. Namun,

kemajuan teknologi ini harus memperhatikan aspek etika sebagai tantangannya.

Rintangan utamanya adalah bahwa kecerdasan tiruan dapat dipakai untuk membuat informasi yang menyesatkan atau bahkan melakukan manipulasi. Sehingga dalam hal tersebut setiap aktor politik harus memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas dan bertanggung jawab. Informasi politik yang dibuat dengan menggunakan kecerdasan tiruan haruslah merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak menyesatkan masyarakat yang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasman dkk (2024).

Disamping itu, dalam menggunakan kecerdasan tiruan dapat melanggar masalah privasi dan keadilan. Kecerdasan tiruan akan mencari dan melakukan analisis terhadap data pribadi pemilih dalam rangka membuat pesan kampanye sesuai dengan karakter pemilihnya. Hal ini tentu saja akan melanggar privasi seseorang dan melanggar prinsip keadilan dalam melakukan akses informasi dalam bidang politik. Dengan demikian, yang terpenting adalah tetap berpedoman pada keadilan dan melindungi privasi seseorang dalam menggunakan kecerdasan tiruan dalam bidang politik.

Kecerdasan tiruan juga harus digunakan untuk mendorong demokrasi agar semakin kuat. Dalam menggunakan kecerdasan tiruan harus dihindari terjadinya penyebaran ujaran kebencian atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya rancangan kerja secara etika dan implementasi regulasi yang cermat untuk memverifikasikan bahwa kecerdasan tiruan dipakai dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan komunikasi di bidang politik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penggunaan etika dalam melakukan komunikasi politik dalam menggunakan kecerdasan tiruan harus memperhatikan

pendekatan integral antara transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan perlindungan privasi orang lain sehingga kecerdasan tiruan merupakan instrumen dalam memperkuat demokrasi sehingga komunikasi politikpun dapat dilakukan menjadi lebih sehat. Berikut ini akan disajikan beberapa studi kasus penggunaan kecerdasan tiruan dalam bidang komunikasi politik di berbagai negara.

STUDI KASUS PERSUASI BERESIKO TINGGI DI AFRIKA

Kecerdasan tiruan digunakan untuk mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Kongo, Afrika. Ketegangan yang terus menerus pada Republik Demokratis Kongo dengan pasukan pemerintah, gerakan pemberontak M23 serta pasukan Rwanda menjadi tempat penyebarluasan *content* yang bermuatan informasi palsu dan ujaran kebencian. Pada saat itu opini masyarakat dipengaruhi dengan disebarluaskannya gambar yang dilengkapi dengan teks pada akun media sosial di Rwanda seperti yang dapat dilihat dalam gambar yang disajikan berikut ini.



Gambar 9.1. Gambar Hasil Rekayasa AI

Gambar itu kemudian menimbulkan kecurigaan adanya aktor politik tertentu yang membuat konflik semakin meruncing

antara ke dua negara tersebut (Gerhäuser, 2025). Permasalahan Rwanda terjadi karena adanya penyebaran *content* di media sosial untuk memancing timbulnya pendapat yang berbeda. Rencana ini digunakan pada berbagai wilayah yang berbeda pada masa situasi persengketaan dan pemilihan umum.

Pengaruh penyebaran *content* hasil buatan kecerdasan tiruan di Afrika berlangsung selama bertahun-tahun, walaupun beberapa lembaga yang bertugas memeriksa kebenaran fakta yang beredar dalam masyarakat juga telah melakukan tugasnya. Namun, sekali lagi hanya dilakukan untuk kepentingan negara donor seperti akun 411 di Afrika Selatan, hanya memungkinkan masyarakat menerima informasi *content* politik secara daring.

Di Afrika Selatan, jumlah pemakai media sosial sebanyak 26 juta orang, sehingga merupakan lahan yang bagus untuk melakukan manipulasi pesan politik dengan menggunakan kecerdasan tiruan pada masa pemilihan umum tahun 2024. Contohnya partai Umkhonto We Sizwe (MK) yang didirikan oleh mantan Presiden Jacob Zuma telah menyebarkan *content* berupa video *deepfake* atau video yang sudah dimanipulasi berupa rekaman Presiden Donald Trump dalam rangka memperlihatkan dukungannya selama pemilihan umum terhadap partai tersebut (Gerhäuser, 2025). Video yang merupakan rekayasa dari kecerdasan tiruan ini beredar di tengah masyarakat yang mendorong masyarakat untuk mendukung partai tersebut.

STUDI KASUS DAMPAK MEDIA SOSIAL PADA PEMILU AMERIKA SERIKAT 2024

Pada pemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2024 yang menjadi target penyebaran *content* yang berisi pesan yang dibuat oleh kecerdasan tiruan adalah Gen Z. Gen Z di Amerika Serikat pada dasarnya tidak tertarik untuk mengetahui proses politik dan melihat debat calon Presiden secara langsung, namun

lebih memilih menonton potongan video/video klip yang muncul pada media sosial yang mereka miliki yang merupakan bagian dari percakapan. Mereka juga membaca komentar yang terdapat dalam potongan video tersebut. Sehingga dalam hal ini para influencer pun memiliki peranan agar Gen Z tersebut mengerti pemilihan umum yang akan berlangsung dan selanjutnya mengambil keputusan calon presiden mana yang akan dipilih seperti yang dilihat dalam gambar yang disajikan berikut ini.



Gambar 9.2. Video Klip Kampanye Presiden

Jadi, dalam hal pilihan calon Presiden dari para Gen Z berasal dari keterlibatan para *influencer* politik yang dimiliki pada masing-masing calon Presiden (Boatwright, 2024).

Dengan demikian Gen Z memiliki ketergantungan pada video dengan durasi singkat yang memang sengaja dibuat dengan menggunakan kecerdasan tiruan untuk menarik perhatian mereka pada saat akan melakukan pemilihan. Putaran pemilihan Presiden tahun 2024 sangat unik karena berkembang berbagai informasi dan lebih banyak aplikasi serta munculnya *influencer* politik yang digunakan dibandingkan pada pemilihan

Presiden beberapa tahun yang lalu. Kelompok pemilih yang lebih muda lebih memperhatikan hal-hal yang dilihat melalui media sosial. Mereka tidak tertarik menonton debat secara langsung. Jadi di sinilah peran rekayasa yang dilakukan oleh kecerdasan tiruan dan influencer politik menjadi sangat besar dalam pemilihan Presiden tahun 2024.

STUDI KASUS MANIPULASI KECERDASAN TIRUAN PADA PEMILU INDIA 2024

Pada proses pelaksanaan pemilihan umum di India pada tahun 2024 pun dipengaruhi oleh penyebaran *content* yang merupakan rekayasa dari kecerdasan tiruan yang mengandung *deepfake* atau tipu muslihat atau *hoax* sehingga mengakibatkan terjadinya demokrasi palsu (*fake democraton*) di India. Tiga *content* yang merupakan *hoax* tersebut yaitu:

1. Rekayasa kecerdasan tiruan dalam mempengaruhi pemilu.
Seluruh partai politik di India termasuk partai Bharatiya Janata dan Konggres menggunakan *content* yang mengandung muatan *deepfake* atau *hoax* untuk menarik perhatian para pemilih. Hal ini terjadi pada bulan Maret dan bulan Mei 2024 tersebar *content* tersebut di tengah para pemilih yang berjumlah $\pm 1.000.000.000$ orang pemilih di India yang akan memilih pemerintah nasional berikutnya pada pemilihan umum terbesar di dunia. *Content* tersebut mengandung muatan gambar artis Taylor Swift yang dipalsukan yang ditampilkan di berbagai aplikasi media sosial pada bulan Januari. Oleh karena itu, pada bulan November, Menteri Teknologi India yang bernama Ashwini Vaishnaw mengatakan bahwa *content* tersebut membahayakan demokrasi (Mustaqim, 2024).
2. Merekayasa ilusi dengan gambar tiga dimensi (hologram).
Pada bulan Februari 2020 seorang anggota parlemen Bharatiya Janata yang bernama Manoj Tiwari menggunakan

content yang bermuatan *deepfake* atau *hoax* dalam berkampanye. Manoj Tiwari mengeluarkan dua video untuk disebarluaskan kepada pemilih. Dalam video tersebut kecerdasan tiruan menggunakan suara seolah-olah berbicara layaknya manusia dengan mengubah ekspresi tokoh seolah-olah sedang berbicara. Oleh karena itu, para penasehat kampanye mengatakan bahwa pemilu India tahun 2024 banyak menggunakan *hoax* hasil rekayasa kecerdasan tiruan (Mustaqim, 2024).

3. Perang pendapat menggunakan suara dan video narasi
Kecerdasan tiruan dapat menciptakan narasi. Divyendra Singh Jadoun berasal dari Pushkar di India Barat pada bulan Oktober 2020 membuat tiruan suara calon ketua menteri kongres negara bagian yang bernama Rajasthan Ashok Gehlot untuk disebarluaskan melalui media WhatsApp selama pemilihan bulan November (Mustaqim, 2024).

Oleh karena itu, dengan beredar luasnya *hoax* hasil rekayasa kecerdasan tiruan di India maka menjelang pemilihan umum pemimpin partai Bharat Rashtra Samithi memberikan peringatan bahwa tetap berhati-hati terhadap content yang mengandung unsur *deepfake* yang disebarluaskan oleh partai kongres. Content tersebut harus diperbaiki secara *real time* agar tidak membayakan demokrasi di India.

STUDI KASUS PENGGUNAAN KECERDASAN TIRUAN PADA KAMPANYE DI INDONESIA

Setelah mendeskripsikan tiga negara tersebut di atas yaitu Afrika, India dan Amerika Serikat yang telah menggunakan kecerdasan tiruan dalam membuat content untuk keperluan kampanye politik. Selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana dengan negara Indonesia? Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang tercatat dalam Permohonan Uji Materil No.

21/PUU-XI/2023 menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan tiruan pada kampanye politik akan menghancurkan dasar-dasar demokrasi yang bersifat adil dan transparan (Deovandra, 2025). Dengan demikian, secara tidak langsung berdasarkan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah melarang penggunaan *content* yang merupakan hasil rekayasa kecerdasan tiruan. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat karena sebagian besar menganggap bahwa larangan penggunaan *content* hasil buatan kecerdasan tiruan dapat menghambat terjadinya proses kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh UUD 1945.

Penggunaan kecerdasan tiruan sebenarnya sangat berguna karena dapat membuat *content* yang bermuatan pesan yang mengandung gambar maupun video menjadi lebih menarik dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat seperti pada pemilihan umum tahun 2024. Pada saat kampanye Prabowo Subianto menggunakan figur gemoy dalam rekayasa kecerdasan tiruan sehingga menarik perhatian masyarakat seperti gambar yang disajikan berikut ini.



Gambar 9.3. Gemoy Hasil Rekayasa AI

Dengan demikian, *content* yang diciptakan oleh kecerdasan tiruan tidak selalu berdampak negatif karena tergantung dari bagaimana pesan tersebut disampaikan oleh pembuatnya secara jujur dan transparan. Sehingga alangkah baiknya bukannya dilarang namun memberikan pembatasan pembuatan *content* dengan menggunakan kecerdasan tiruan yang dapat menyesatkan.

Kecerdasan tiruan dapat membantu cara kampanye politik dengan membuat *content* yang menarik dengan menyisipkan meme, video dan gambar untuk menjangkau kalangan pemilih yang lebih luas lagi terutama Gen Z yang terbiasa melihat tayangan media yang berbasis digital.

KESIMPULAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kehidupan politik selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tanpa kita sadari bahwa aktivitas politik telah dilaksanakan jauh sebelum munculnya masyarakat yang modern sekarang ini. Perkembangan politik yang modern saat ini disertai dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi yang pesat pula sehingga menyebabkan terjadinya perubahan. Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara formal saja. Namun dengan berkembangnya aplikasi digital yang memiliki beragam media komunikasi menyebabkan terjadi perubahan pendidikan. Masyarakat dapat mengakses informasi apapun dengan mudah dengan menggunakan perangkat GSM apapun termasuk dalam bidang politik. Tanpa disadari ketika melihat berbagai *content* politik yang tersebar luas melalui media maya/*cyberspace* secara tidak langsung telah terjadi pendidikan politik.

Selanjutnya dikenal dengan hasil rancangan program komputer yang dikenal dengan perangkat *Artificial Intelligence* atau kecerdasan tiruan. Perangkat ini bekerja layaknya menggantikan otak manusia dan juga dapat dipakai dalam

bidang politik. Kecerdasan tiruan dapat membuat *content* dengan menggali berbagai informasi seperti data kependudukan, karakter masyarakat, hasil survei dan tujuan dibuatnya *content* ini. Namun sayangnya, perkembangan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan pribadi dari masyarakatnya, karena kecerdasan tiruan dapat dipakai untuk membuat *content* dengan melakukan manipulasi untuk menarik perhatian pendukung politik seperti dalam studi kasus yang telah disampaikan di atas pada saat pemilihan umum di Afrika, India dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, yang terpenting adalah menanamkan nilai etika berupa kejujuran, tanggungjawab, transparansi dan akuntabel dalam membuat *content* tersebut. Kecerdasan tiruan jangan sampai hanya dipakai untuk menghasilkan *content* yang dimanipulasi atau *hoax* untuk menguntungkan aktor politik tertentu. Dengan demikian, menyadari hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang tercatat dalam Permohonan Uji Materil No. 21/PUU-XI/2023 menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan tiruan pada kampanye politik akan menghancurkan dasar-dasar demokrasi yang bersifat adil dan transparan sehingga secara tidak langsung melarang penggunaan kecerdasan tiruan dalam pembuatan *content* untuk keperluan kampanye.

Larangan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya melanggar hak berekspresi dari warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Kecerdasan tiruan apabila digunakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dapat membantu kampanye politik dengan *content* yang berisi sisipan meme, video dan gambar seperti dalam kampanye politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk dapat menarik berbagai kalangan yang saat ini lebih terbiasa menyerap informasi secara digital. Jadi tidak selamanya penggunaan kecerdasan tiruan dalam kehidupan politik berdampak buruk karena tergantung dari niat baik *user*nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Intan, S., Nabila, M., Novia, I, Dalimunthe, R. (Mei 2025). Pengaruh Kecerdasan Buatan Dalam Komunikasi Politik. *JUrnal Penelitian Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 9 No. 5, 48 - 54.
- Boatwright. (2024, 10 30). Voice of America. Diambil kembali dari Pemilu Amerika: <https://www.voaindonesia.com/a/bagaimana-dampak-media-sosial-pada-pemilu-2024-di-amerika-serikat/7843793.html>
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar ilmu Politik* (Edisi Revisi; Cetakan XIII). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, A. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 140.
- Deovandra, R. (2025, Januari 8). Analisis Dampak MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Emillia. (2017). *Etika Berpancasilais Pembentukan Karakter*. Jakarta: Institut Teknologi PLN.
- Emillia. (Maret 2020). Penguatan Sila Ketiga Pancasila Sebagai Solusi Untuk Menghadapi Penyebarluasan Content Berunsur (SARA) Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1, 1 - 10.
- Evelina, L. (2015). Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antargolongan) di Media Sosial Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol VII, No. 1, 107-122.
- Gerhäuser, T. (2025, 02 21). Martina Schwikowski. Diambil kembali dari Dunia Digital Afrika: <https://www.dw.com/id/bagaimana-ai-mengancam-afrika/a-71694908>

- Hariyani, N., Rahmawati, A.Y.. (2024). Media Sosial dan Aplikasi Kecerdasan Buatan Dalam Preferensi dan Partisipasi Pemilih di Pemilihan Umum. Vol. 11 No. 2.
- Mustaqim, A. H. (2024, Pebruari 21). 7 Tipu Daya AI Yang Mempengaruhi Pemilu India 2024, Salah Satunya Menghasilkan Demokrasi Palsu. Jakarta, Indonesia, DKI Jakarta.
- Nasiwan. (2012). Teori-Teori Politik. Yogyakarta: Ombak.
- Nasman, Astuti, P., Perwitasari, D. (2024). Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia. Jurnal Pnelitian Ilmiah Multidisiplin Vol. 5. No. 10.
- Nurfajri. (2025). Dampak Aligoritma AI terhadap Komunikasi Publik: Memahami Manipulasi Informasi dan Realitas. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 3.
- Pabubung, M. R. (2023). Era Kecerdasan Buatan Dan Dampak Terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. Vol. 6 No. 1.
- Ronni Juwandi, M. Y. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta, 369-377.
- Varma, S. (2010). Teori Politik Modern. Jakarta: Raja Grafindo Raya.

BAB 10

PERAN MEDIA DALAM PEMILU DAN KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA

Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.
Politeknik Negeri Pontianak
E-mail: muhammad.rachimoellah14@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinamika peran media dalam demokrasi Indonesia mencerminkan perjalanan panjang transformasi politik dan sosial bangsa ini. Sejak era kemerdekaan, media telah mengalami metamorfosis yang mendalam, dari instrumen propaganda negara menjadi institusi independen yang vital bagi kehidupan demokratis. Transformasi ini menjadi lebih signifikan ketika Indonesia memasuki era reformasi, yang menandai titik balik fundamental dalam relasi antara media, negara, dan masyarakat. Dalam konteks historis, media di Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan yang mencerminkan dinamika politik nasional. Era Orde Baru, misalnya, ditandai dengan kontrol ketat pemerintah terhadap media melalui mekanisme perizinan dan sensor yang rigid. Namun, momentum reformasi 1998 membuka ruang bagi liberalisasi media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hill dan Sen (2020) dalam kajiannya menggambarkan bagaimana transisi ini mengubah secara fundamental landscape media Indonesia, dari sistem yang terpusat dan hierarkis menjadi lebih terdesentralisasi dan demokratis.

Signifikansi media dalam proses elektoral di Indonesia semakin menguat seiring dengan makin kompleksnya dinamika politik kontemporer. Media tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi telah berkembang menjadi arena

kontestasi politik yang strategis. Penelitian Aspinall dan Mietzner (2019) menunjukkan bagaimana media berperan krusial dalam membentuk preferensi politik dan mobilisasi massa selama periode pemilihan. Media mampu memengaruhi agenda publik, membingkai isu-isu politik, dan bahkan menentukan arah diskursus elektoral. Perkembangan teknologi digital telah membawa dimensi baru dalam landscape media Indonesia. Era media sosial dan platform digital telah menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih inklusif dan interaktif. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Lim dan Nugroho (2021) sebagai "demokrasi digital", sebuah arena politik baru di mana warga negara dapat terlibat langsung dalam diskursus politik tanpa mediasi tradisional. Namun, demokratisasi informasi ini juga membawa tantangan baru, seperti fenomena *echo chamber*, polarisasi digital, dan manipulasi informasi yang dapat mengancam kualitas diskursus demokratis. Yang menarik, Indonesia mengembangkan model *hybrid* dalam konsumsi media politik, di mana platform tradisional dan digital beroperasi dalam ekosistem yang saling melengkapi.

Tapsell (2019) mengobservasi bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi informasi politik melalui berbagai platform secara simultan, menciptakan pola konsumsi media yang kompleks dan berlapis. Fenomena ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi penguatan demokrasi Indonesia.

Peran media dalam proses elektoral juga semakin kompleks dengan munculnya fenomena algoritma personalisasi konten dan *artificial intelligence*. Platform digital kini mampu menciptakan pengalaman informasi yang sangat personal, yang berpotensi menguatkan polarisasi politik dan fragmentasi sosial. Wahid Foundation (2023) mencatat bagaimana fenomena ini

berkontribusi pada menguatnya tensi politik dan sosial selama periode pemilihan.

Dalam konteks ini, urgensi penguatan literasi media menjadi semakin krusial. *Media literacy* tidak hanya mencakup kemampuan mengakses dan memahami informasi, tetapi juga kapasitas untuk mengevaluasi kredibilitas sumber dan mengidentifikasi bias dalam pemberitaan. Program-program peningkatan literasi media yang diinisiasi oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan institusi pendidikan menjadi semakin vital dalam upaya membangun masyarakat yang kritis dan resistant terhadap manipulasi informasi. Perkembangan *landscape* media di Indonesia juga tidak terlepas dari dinamika global. Fenomena *post-truth politics* dan disinformasi yang menjadi *concern* global juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas diskursus politik di Indonesia. Studi yang dilakukan Center for Digital Society UGM (2022) menunjukkan bagaimana platform digital menjadi arena pertarungan narasi politik yang semakin intens dan kompleks.

Transformasi peran media dalam demokrasi Indonesia terus berlanjut seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-politik. Pemahaman mendalam terhadap kompleksitas ini menjadi krusial dalam upaya membangun ekosistem media yang mendukung penguatan demokrasi Indonesia. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada aspek teknologi dan regulasi, tetapi juga pada upaya membangun kultur media yang sehat dan konstruktif bagi perkembangan demokrasi.

EVOLUSI MEDIA DALAM POLITIK INDONESIA

Evolusi media dalam politik Indonesia menggambarkan sebuah perjalanan transformatif yang mencerminkan dinamika sosial-politik bangsa. Perubahan peran media dari masa ke masa tidak hanya menunjukkan perkembangan teknologi, tetapi juga

merefleksikan pergeseran relasi kekuasaan dan demokratisasi di Indonesia.

Di era Orde Lama (1945-1965), media berperan sebagai instrumen propaganda yang tak terpisahkan dari agenda politik nasional. Presiden Soekarno memahami kekuatan media sebagai alat mobilisasi massa dan pembentukan identitas nasional. Media massa, terutama radio dan surat kabar, menjadi corong utama pemerintah dalam menyebarkan ideologi "Manipol USDEK" dan "NASAKOM". Penelitian Anderson (2016) menunjukkan bagaimana Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi medium strategis dalam menyebarkan pidato-pidato Soekarno dan membangun sentimen nasionalisme. Periode ini ditandai dengan terbatasnya ruang bagi perspektif yang berbeda dari narasi resmi pemerintah.

Memasuki era Orde Baru (1966-1998), kontrol terhadap media semakin sistematis dan *sophisticated*. Rezim Soeharto membangun sistem pengawasan media yang komprehensif melalui mekanisme perizinan (SIUPP) dan sensor yang ketat. Dhakidae (2017) menggambarkan bagaimana media masa Orde Baru berada di bawah "hegemoni pembangunanisme", sebuah kondisi di mana media diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah dengan mengorbankan fungsi kritisnya. Pembredelan terhadap majalah Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 menjadi bukti nyata represifitas rezim terhadap media yang dianggap terlalu kritis.

Era Reformasi (1998-2008) membawa angin segar bagi kebebasan pers di Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru diikuti dengan pencabutan berbagai regulasi yang membatasi kebebasan media. Kitley (2019) mencatat bagaimana liberalisasi media pasca-1998 membuka ruang bagi munculnya ratusan media baru, yang membawa keragaman perspektif dalam diskursus publik. Periode ini juga ditandai dengan berkembangnya media-media lokal yang memperkaya wacana

politik di tingkat daerah. Namun, liberalisasi ini juga membawa tantangan baru berupa konglomerasi media yang berpotensi mengancam keragaman informasi.

Era Digital (2008-sekarang) menandai transformasi fundamental dalam *landscape* media politik Indonesia. Penetrasi internet dan media sosial telah menciptakan ruang publik virtual yang mengubah pola komunikasi politik secara drastis. Lim (2023) mengidentifikasi bagaimana platform digital telah menciptakan "*networked public sphere*", sebuah ruang di mana warga negara dapat terlibat langsung dalam produksi dan distribusi konten politik. Media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok menjadi arena kontestasi politik yang semakin signifikan, terutama dalam periode pemilihan.

Menariknya, era digital juga membawa fenomena hibridisasi media, di mana platform tradisional dan digital beroperasi dalam ekosistem yang saling terkoneksi. Nugroho dan Tapsell (2021) menggambarkan bagaimana konvergensi media telah menciptakan "*hybrid media system*" di mana berbagai platform media saling memengaruhi dalam membentuk diskursus politik. Fenomena ini membawa tantangan baru seperti viralitas informasi yang sulit dikontrol, proliferasi disinformasi, dan fragmentasi ruang publik digital. Era digital juga ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru dalam lanskap media politik. Kemunculan *influencer* politik, *buzzer*, dan kelompok *cyber troops* telah menambah kompleksitas ekosistem media. Potret ini semakin rumit dengan hadirnya algoritma platform digital yang dapat menciptakan *echo chamber* dan *bubble filter*, yang berpotensi memperdalam polarisasi politik di masyarakat.

Perjalanan evolusi media dalam politik Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi, kekuasaan, dan demokratisasi saling berkelindan dalam membentuk *landscape* media kontemporer. Pemahaman terhadap dinamika historis ini

menjadi krusial dalam mengantisipasi dan merespons tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada aspek teknologi dan regulasi, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem media yang mendukung deliberasi demokratis yang sehat.

TIPOLOGI MEDIA DALAM KAMPANYE POLITIK

Tipologi media dalam kampanye politik di Indonesia mencerminkan keragaman saluran komunikasi yang digunakan untuk menjangkau dan memengaruhi pemilih. Setiap jenis media memiliki karakteristik, jangkauan, dan efektivitas yang berbeda dalam konteks kampanye politik, menciptakan lanskap komunikasi politik yang kompleks dan berlapis. Media konvensional, yang mencakup media cetak, radio, dan televisi, tetap mempertahankan peran signifikannya dalam kampanye politik Indonesia. Televisi, khususnya, masih menjadi medium kampanye yang powerful, terutama dalam menjangkau pemilih di daerah perkotaan dan semi-perkotaan.

Penelitian Nielsen Media Research (2023) menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergeseran ke platform digital, televisi masih menjangkau sekitar 95% populasi Indonesia, menjadikannya medium yang tidak dapat diabaikan dalam strategi kampanye. Surat kabar dan radio, meski mengalami penurunan pembaca dan pendengar, tetap memiliki audiens loyal terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Transformasi signifikan terjadi dengan hadirnya media digital dan sosial media dalam arena kampanye politik. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menciptakan ruang kampanye yang lebih interaktif dan personal.

Nugroho dan Sastromihardjo (2022) mengidentifikasi bagaimana media sosial memungkinkan *micro-targeting* dalam kampanye politik, di mana pesan kampanye dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik demografis dan psikografis pemilih.

Fenomena ini diperkuat dengan kemampuan platform digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna secara masif. Media alternatif muncul sebagai respons terhadap dominasi media mainstream dan kebutuhan akan saluran komunikasi yang lebih independen. Platform seperti *podcast* politik, blog, dan portal berita independen menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi media arus utama. Yang menarik, Tapsell (2021) mencatat bagaimana media alternatif sering kali menjadi sumber primer untuk isu-isu yang sensitif atau kontroversial yang tidak mendapat *coverage* memadai di media *mainstream*. Kehadiran media alternatif juga memperkaya diskursus politik dengan mengangkat suara-suara marginal yang seringkali terabaikan.

Media luar ruang tetap menjadi elemen penting dalam strategi kampanye politik, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki kultur politik yang kuat dalam penggunaan ruang publik. Baliho, spanduk, poster, dan berbagai bentuk media luar ruang lainnya tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai penanda teritorial politik. Penelitian Hamid (2020) menunjukkan bagaimana media luar ruang berperan dalam membangun *awareness* dan menunjukkan kekuatan politik di tingkat *grassroot*. Menariknya, era digital tidak menghilangkan relevansi media luar ruang, justru menciptakan fenomena *hybrid* di mana konten media luar ruang sering menjadi viral di media sosial. Interaksi antar berbagai tipologi media ini menciptakan apa yang disebut Chadwick (2023) sebagai "*hybrid media system*" dalam kampanye politik. Konten yang diproduksi di satu platform dapat dengan cepat beresonansi di platform lainnya, menciptakan efek amplifikasi yang signifikan. Misalnya, momen-momen dalam debat televisi dapat menjadi viral di media sosial, sementara hashtag campaign di Twitter dapat menjadi headline berita televisi.

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* dan *big data analytics* semakin memperkaya kompleksitas tipologi media dalam kampanye politik. Platform digital kini mampu melakukan *sentiment analysis* dan prediksi perilaku pemilih berdasarkan aktivitas *online* mereka. Namun, kemampuan ini juga membawa tantangan baru terkait privasi data dan manipulasi algoritma untuk kepentingan politik. Yang tidak kalah penting, setiap tipologi media membawa tantangan regulasi yang berbeda. Media konvensional relatif lebih mudah diregulasi karena memiliki struktur yang jelas dan tersentral. Sebaliknya, media digital dan sosial media menghadirkan tantangan regulasi yang lebih kompleks karena sifatnya yang terdesentralisasi dan lintas batas. Media alternatif dan luar ruang berada di antara kedua spektrum ini, dengan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap memerlukan pengawasan untuk menjaga kualitas kampanye politik.

REGULASI MEDIA DALAM PEMILU

Regulasi media dalam pemilu di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara demokrasi, teknologi, dan tata kelola komunikasi politik. Kerangka regulasi ini terus berevolusi seiring dengan transformasi *landscape* media dan tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Fondasi utama regulasi media dalam pemilu terletak pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis penggunaan media dalam kampanye, tetapi juga meletakkan prinsip-prinsip fundamental seperti kesetaraan akses, keberimbangan pemberitaan, dan transparansi. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui peran strategis media dalam membentuk kualitas diskursus pemilu dan preferensi pemilih. Misalnya, regulasi tentang iklan kampanye tidak hanya mengatur durasi

dan frekuensi, tetapi juga substansi dan etika penyampaian pesan politik.

Implementasi teknis dari undang-undang ini dielaborasi lebih lanjut melalui berbagai Peraturan KPU (PKPU). PKPU No. 23 Tahun 2018, misalnya, memberikan panduan detail tentang standar dan mekanisme kampanye di berbagai platform media. Yang menarik, regulasi ini juga berupaya mengadopsi prinsip-prinsip kampanye digital yang etis, seperti ketentuan tentang transparansi sumber informasi dan larangan penggunaan bot atau akun palsu untuk kampanye.

Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memainkan peran vital dalam mengatur aspek profesionalisme dan etika media selama pemilu. Dewan Pers, melalui berbagai pedoman jurnalistiknya, menekankan pentingnya verifikasi fakta dan keberimbangan dalam pemberitaan pemilu. Sementara itu, KPI melalui P3SPS memberikan framework yang jelas tentang standar penyiaran konten pemilu, termasuk regulasi tentang iklan politik dan program dialog kandidat.

Tantangan regulasi media digital menjadi aspek yang semakin kompleks dan mendesak. Platform digital memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dari media konvensional, menciptakan *grey area* dalam implementasi regulasi. Misalnya, bagaimana mengatur kampanye di WhatsApp groups atau mengontrol penyebaran hoaks politik di TikTok? Algoritma platform media sosial yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan kampanye juga menciptakan dilema regulasi baru. Fenomena *micro-targeting* dan penggunaan big data dalam kampanye digital membawa dimensi etis dan regulatif yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Penggunaan data pribadi pemilih untuk personalisasi pesan kampanye, misalnya, memunculkan pertanyaan tentang batas antara efektivitas kampanye dan perlindungan privasi.

Koordinasi antarlembaga regulator menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas *landscape* media kontemporer. Tumpang tindih kewenangan antara KPU, Bawaslu, KPI, dan Kominfo dalam mengatur media digital seringkali menimbulkan celah dalam penegakan aturan. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan pembagian peran yang lebih jelas untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan. Ke depan, regulasi media dalam pemilu perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan antisipatif. Ini mencakup pengembangan *framework* regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi teknologi media, penguatan kapasitas regulator dalam monitoring platform digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Regulasi juga perlu mempertimbangkan aspek *cross-border* dari platform digital, mengingat banyak platform media sosial yang beroperasi di Indonesia dikelola oleh perusahaan multinasional. Yang tidak kalah penting adalah membangun ekosistem regulasi yang mendorong *self-regulation* di kalangan pelaku media dan partai politik. Ini bisa dicapai melalui insentif untuk praktik kampanye yang etis dan sanksi yang efektif untuk pelanggaran. Pengembangan *code of conduct* untuk kampanye digital dan mekanisme *fact-checking* kolaboratif bisa menjadi langkah konkret dalam arah ini. Regulasi media dalam pemilu pada akhirnya harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan: kebebasan berekspresi, integritas pemilu, perlindungan data pribadi, dan kebutuhan akan informasi yang berkualitas bagi pemilih. Keberhasilan dalam mencapai keseimbangan ini akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia di era digital.

FUNGSI INFORMASI DAN EDUKASI POLITIK

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang begitu deras dan cepat, fungsi informasi dan edukasi politik menjadi semakin krusial dalam membentuk dinamika

demokrasi. Informasi tidak lagi sekadar alat untuk menyampaikan fakta, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang mampu membentuk opini publik, mengarahkan agenda politik, dan bahkan menciptakan citra tertentu bagi kandidat atau partai politik. Di tengah banjir informasi yang seringkali tidak terfilter, masyarakat dituntut untuk lebih kritis dan selektif, sementara aktor politik berlomba-lomba memanfaatkan media untuk memengaruhi persepsi publik.

Pembentukan opini publik, sebagai salah satu fungsi utama informasi politik, tidak lagi bergantung pada komunikasi satu arah seperti di era media tradisional. Kini, opini publik dibentuk melalui interaksi kompleks antara media mainstream, media sosial, dan jaringan komunitas *online*. Media sosial, khususnya, telah menjadi ruang di mana warga tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Hal ini menciptakan dinamika baru di mana opini publik tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh elite media atau politisi, melainkan juga oleh masyarakat itu sendiri melalui viralitas konten dan diskusi online. Namun, di balik kemerdekaan ini, muncul tantangan baru seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi yang dapat mengaburkan kebenaran dan memecah belah masyarakat.

Agenda setting dan *framing* adalah dua mekanisme kunci yang digunakan oleh media dan aktor politik untuk memengaruhi bagaimana suatu isu dipahami oleh publik. *Agenda setting* merujuk pada kemampuan media untuk menentukan isu-isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, media tidak hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memilih isu-isu tertentu untuk diberi perhatian lebih, sehingga secara tidak langsung membentuk prioritas publik. Sementara itu, *framing* adalah cara media atau politisi menyajikan suatu isu dengan

sudut pandang tertentu, yang dapat memengaruhi bagaimana publik mempersepsikan isu tersebut. Misalnya, isu migrasi dapat *diframing* sebagai ancaman keamanan atau sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, tergantung pada kepentingan politis di baliknya. *Framing* yang efektif dapat mengubah persepsi publik secara signifikan, bahkan tanpa mengubah fakta yang mendasarinya.

Di sisi lain, marketing politik dan *branding* kandidat telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kompetisi politik modern. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, citra seorang kandidat tidak hanya dibangun melalui pidato atau debat publik, tetapi juga melalui kampanye digital yang dirancang secara cermat. Media sosial, iklan online, dan platform digital lainnya menjadi alat utama untuk membangun narasi dan citra yang menarik bagi pemilih. Branding kandidat tidak lagi sekadar tentang visi dan misi, tetapi juga tentang personal branding yang mampu menyentuh emosi dan aspirasi pemilih. Kandidat yang sukses adalah mereka yang mampu menciptakan narasi yang resonan dengan nilai-nilai dan harapan masyarakat, sambil memanfaatkan data analitik untuk menargetkan pesan mereka secara tepat.

Namun, di balik kemajuan teknologi ini, muncul pertanyaan etis tentang sejauh mana manipulasi informasi dapat diterima dalam demokrasi. Penggunaan *big data* dan algoritma untuk memengaruhi perilaku pemilih, misalnya, telah menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan transparansi. Selain itu, dominasi platform digital dalam marketing politik juga berpotensi menciptakan ketimpangan, di mana kandidat atau partai dengan sumber daya lebih besar dapat mendominasi ruang informasi, sementara suara-suara kecil terpinggirkan.

Dalam konteks ini, edukasi politik menjadi semakin penting untuk membekali masyarakat dengan kemampuan literasi media dan kritisisme yang diperlukan untuk menavigasi dunia

informasi yang kompleks. Edukasi politik tidak hanya tentang memahami sistem pemerintahan atau hak-hak politik, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengenali bias, dan membuat keputusan yang informasional. Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat rentan terjebak dalam *echo chamber*, di mana mereka hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, sehingga memperparah polarisasi dan menghambat dialog yang konstruktif.

DINAMIKA MEDIA DALAM PEMILU INDONESIA KONTEMPORER

Pemilu Indonesia di era kontemporer tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik antarkandidat, tetapi juga medan pertarungan wacana yang dipicu oleh dinamika media yang semakin kompleks. Media, baik konvensional maupun digital, telah menjadi arena di mana narasi-narasi politik diperebutkan, opini publik dibentuk, dan identitas kolektif dipertaruhkan. Namun, di balik kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses lebih luas terhadap beragam perspektif, muncul tantangan baru yang justru mengancam integritas demokrasi: polarisasi media, fenomena *echo chamber* dan *bubble filter*, disinformasi dan misinformasi, serta perang *hashtag* dan *buzzer* politik.

Polarisasi media telah menjadi ciri khas pemilu Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Media tidak lagi berfungsi sebagai penyalur informasi yang netral, melainkan seringkali menjadi corong kepentingan politik tertentu. Hal ini terlihat jelas dalam pemberitaan yang cenderung bias, di mana media tertentu mempromosikan narasi yang mendukung kandidat atau partai tertentu sambil menyerang pihak oposisi. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di media *mainstream*, tetapi juga merambah ke media sosial, di mana pengguna cenderung memilih informasi

yang sesuai dengan keyakinan politik mereka. Akibatnya, masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu yang saling berseberangan, dengan sedikit ruang untuk dialog atau rekonsiliasi. Polarisasi media ini tidak hanya memperdalam perpecahan sosial, tetapi juga mengancam kohesi nasional, terutama di tengah keragaman budaya dan politik Indonesia.

Fenomena *echo chamber* dan *bubble filter* semakin memperparah polarisasi ini. *Echo chamber* merujuk pada situasi di mana individu hanya terpapar pada informasi atau opini yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, sementara *bubble filter* adalah algoritma media sosial yang secara selektif menyaring konten berdasarkan preferensi pengguna. Kedua fenomena ini menciptakan ruang gema di mana suara-suara yang berbeda atau kritis sulit menembus. Dalam konteks pemilu, *echo chamber* dan *bubble filter* membuat pemilih terjebak dalam lingkaran informasi yang menguatkan prasangka mereka, tanpa kesempatan untuk mempertimbangkan perspektif lain. Hal ini tidak hanya membatasi pemahaman mereka tentang isu-isu politik, tetapi juga memperkuat polarisasi dan menghambat terciptanya konsensus nasional.

Disinformasi dan misinformasi menjadi masalah lain yang mengancam integritas pemilu Indonesia kontemporer. Disinformasi merujuk pada penyebaran informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, sementara misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah tanpa maksud jahat. Keduanya telah menjadi senjata ampuh dalam pertarungan politik, digunakan untuk menyerang lawan politik, memanipulasi opini publik, atau bahkan mengganggu proses demokrasi. Di Indonesia, kasus-kasus seperti penyebaran berita palsu tentang kandidat tertentu, hoaks tentang program pemerintah, atau narasi konspirasi yang sengaja disebarkan untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, telah menjadi hal yang umum. Dampaknya tidak hanya merusak reputasi individu

atau kelompok, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Perang *hashtag* dan *buzzer* politik adalah fenomena lain yang menandai dinamika media dalam pemilu Indonesia kontemporer. *Hashtag*, yang seharusnya menjadi alat untuk mengorganisir informasi dan memfasilitasi diskusi publik, telah dijadikan senjata dalam pertarungan wacana politik. Kampanye *hashtag* seringkali dirancang untuk memengaruhi *trending topic* di media sosial, menciptakan ilusi popularitas atau dukungan massal bagi kandidat tertentu. Sementara itu, *buzzer* politik—individu atau kelompok yang dibayar untuk mempromosikan narasi tertentu—menjadi aktor kunci dalam perang informasi ini. *Buzzer* tidak hanya menyebarkan konten positif tentang kandidat yang mereka dukung, tetapi juga aktif menyerang lawan politik melalui komentar, posting, atau bahkan konten viral yang dirancang untuk merusak reputasi. Perang *hashtag* dan *buzzer* politik ini seringkali mengaburkan batas antara informasi yang otentik dan yang direkayasa, sehingga membuat publik semakin sulit membedakan fakta dari manipulasi.

Dalam menghadapi dinamika media yang semakin kompleks ini, diperlukan upaya kolektif untuk memperkuat literasi media dan membangun ruang informasi yang lebih sehat. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengenali bias, memverifikasi informasi, dan berpikir kritis terhadap konten yang mereka konsumsi. Di sisi lain, regulator dan platform media sosial juga harus mengambil peran lebih aktif dalam memerangi disinformasi dan memastikan transparansi dalam kampanye politik. Tanpa upaya serius untuk mengatasi tantangan ini, dinamika media dalam pemilu Indonesia kontemporer berpotensi menggerogoti fondasi demokrasi, alih-alih memperkuatnya.

TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA

Dinamika media dalam pemilu Indonesia kontemporer tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan dan problematika yang kompleks. Di tengah arus informasi yang begitu deras, independensi media, konglomerasi media, literasi media masyarakat, dan pengawasan konten kampanye di media digital menjadi isu-isu kritis yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa media tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Tantangan-tantangan ini tidak hanya memengaruhi kualitas informasi yang diterima publik, tetapi juga integritas proses demokrasi secara keseluruhan.

Independensi media adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat objektif, akurat, dan bebas dari kepentingan politik atau bisnis. Namun, dalam praktiknya, independensi media seringkali terganggu oleh tekanan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, partai politik, maupun pemilik modal. Di Indonesia, kasus-kasus di mana media dipaksa untuk memihak atau membungkus pemberitaan demi kepentingan tertentu bukanlah hal yang baru. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas media, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap peran media sebagai penjaga demokrasi. Tantangan independensi media semakin besar di era digital, di mana tekanan ekonomi dan kompetisi untuk mendapatkan klik dan *engagement* seringkali mengorbankan kualitas jurnalisme.

Konglomerasi media adalah problematika lain yang mengancam keragaman suara dan perspektif dalam ruang informasi. Di Indonesia, kepemilikan media seringkali terkonsentrasi di tangan segelintir konglomerat yang memiliki kepentingan bisnis dan politik. Konsentrasi kepemilikan ini berpotensi menciptakan monopoli narasi, di mana hanya suara-suara tertentu yang didengar, sementara suara-suara alternatif atau kritis terpinggirkan. Konglomerasi media juga

meningkatkan risiko konflik kepentingan, di mana pemberitaan lebih dipengaruhi oleh agenda pemilik media daripada kepentingan publik. Dalam konteks pemilu, hal ini dapat memengaruhi bagaimana kandidat atau partai tertentu dipersepsikan oleh masyarakat, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik.

Literasi media masyarakat adalah tantangan mendasar yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa publik mampu menavigasi dunia informasi yang kompleks. Di era digital, di mana informasi dapat diproduksi dan disebarkan oleh siapa saja, kemampuan untuk membedakan antara fakta dan hoaks, mengenali bias, dan menganalisis sumber informasi menjadi semakin penting. Namun, tingkat literasi media di Indonesia masih relatif rendah, sehingga masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi. Rendahnya literasi media ini tidak hanya membuat publik mudah terpapar disinformasi, tetapi juga menghambat partisipasi politik yang informasional dan kritis. Tanpa literasi media yang memadai, upaya untuk menciptakan ruang informasi yang sehat dan demokratis akan sulit tercapai.

Pengawasan konten kampanye di media digital adalah tantangan teknis dan regulasi yang semakin relevan di era digital. Media digital, terutama platform media sosial, telah menjadi arena utama untuk kampanye politik. Namun, platform ini seringkali menjadi sarana penyebaran konten negatif, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam (*black campaign*). Pengawasan terhadap konten kampanye di media digital menghadapi sejumlah kendala, mulai dari volume konten yang sangat besar, kerumitan algoritma, hingga keterbatasan regulasi yang mengatur ruang digital. Selain itu, platform media sosial seringkali dihadapkan pada dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab untuk memerangi konten berbahaya. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, media

digital berpotensi menjadi sarana untuk merusak integritas pemilu dan memecah belah masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan dan problematika ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi independensi media dan mencegah konglomerasi yang berlebihan. Media sendiri harus berkomitmen untuk menjaga standar jurnalistik yang tinggi dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan bisnis atau politik. Di sisi lain, masyarakat perlu dibekali dengan literasi media yang memadai melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Sementara itu, platform media sosial harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memoderasi konten dan memastikan transparansi dalam kampanye politik. Tanpa upaya serius untuk mengatasi tantangan ini, dinamika media dalam pemilu Indonesia kontemporer berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi, alih-alih menjadi penopangnya. Hanya dengan menciptakan ekosistem media yang independen, beragam, dan bertanggung jawab, kita dapat memastikan bahwa informasi tetap menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk memanipulasi atau memecah belah mereka.

KESIMPULAN

Media memainkan peran sentral dalam pemilu dan kampanye politik di Indonesia, baik sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, maupun arena pertarungan wacana politik. Di era digital, media tidak hanya mencakup saluran tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, tetapi juga platform digital dan media sosial yang telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi. Peran media dalam pemilu dan kampanye politik dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang: di satu sisi, media menjadi alat yang memungkinkan transparansi, partisipasi, dan edukasi politik; di

sisi lain, media juga menjadi sarana yang rentan dimanipulasi untuk kepentingan politik, menyebarkan disinformasi, dan memperdalam polarisasi.

Pertama, media berfungsi sebagai saluran informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data, program, dan visi-misi kandidat atau partai politik. Dalam konteks ini, media menjadi jembatan antara politisi dan pemilih, memfasilitasi dialog politik yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat. Media juga berperan dalam mengawasi proses pemilu, melaporkan pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Namun, independensi media seringkali diuji oleh tekanan politik dan bisnis, yang dapat mengorbankan objektivitas dan kredibilitas pemberitaan.

Kedua, media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik melalui agenda setting dan framing. Media tidak hanya menentukan isu-isu mana yang dianggap penting, tetapi juga memengaruhi bagaimana isu tersebut dipahami oleh publik. Kemampuan ini menjadikan media sebagai aktor kunci dalam kampanye politik, di mana narasi dan citra kandidat dibangun dan dipromosikan. Namun, kekuatan ini juga rentan disalahgunakan, terutama dalam konteks polarisasi media dan konglomerasi kepemilikan yang dapat memengaruhi keragaman perspektif dan suara.

Ketiga, media digital dan sosial telah mengubah lanskap kampanye politik, memungkinkan interaksi langsung antara kandidat dan pemilih, serta memfasilitasi mobilisasi massa. Namun, platform ini juga menjadi sarana penyebaran disinformasi, hoaks, dan kampanye hitam yang dapat merusak integritas pemilu. Fenomena *echo chamber* dan *bubble filter* semakin memperparah polarisasi, sementara perang *hashtag* dan *buzzer* politik mengaburkan batas antara informasi yang otentik dan yang direkayasa.

Tantangan seperti rendahnya literasi media masyarakat, kurangnya pengawasan konten kampanye di media digital, dan dominasi konglomerasi media semakin memperumit peran media dalam pemilu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, media, platform digital, dan masyarakat. Regulasi yang melindungi independensi media, edukasi literasi media, dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap konten kampanye adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil.

Secara keseluruhan, media memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemilu. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika media berfungsi secara independen, bertanggung jawab, dan inklusif. Tanpa upaya serius untuk mengatasi tantangan yang ada, media justru berisiko menjadi alat yang memperdalam ketidakadilan, polarisasi, dan ketidakpercayaan dalam sistem politik. Oleh karena itu, menjaga integritas media adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa pemilu dan kampanye politik di Indonesia tetap berjalan secara adil, transparan, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2016). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Books.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia*. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118.
- Chadwick, A. (2023). *The Hybrid Media System: Politics and Power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Center for Digital Society UGM. (2022). *Digital Democracy: Challenges and Opportunities in Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

- Dhakidae, D. (2017). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid, A. (2020). Media Luar Ruang dan Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik*, 12(1), 45–60.
- Hill, D. T., & Sen, K. (2020). *Media, Culture and Politics in Indonesia* (3rd ed.). Equinox Publishing.
- Kitley, P. (2019). *Television, Nation, and Culture in Indonesia*. Ohio University Press.
- Lim, M. (2023). *Digital Media and Political Participation in Southeast Asia*. Routledge.
- Lim, M., & Nugroho, Y. (2021). *Democracy Digital: The Role of Social Media in Political Mobilization*. *Asian Journal of Communication*, 31(2), 123–140.
- Nielsen Media Research. (2023). *Media Consumption Trends in Indonesia: Insights into Television and Digital Platforms*. Nielsen Reports.
- Nugroho, Y., & Sastromihardjo, R. (2022). *Micro-targeting in Indonesian Political Campaigns: Opportunities and Risks*. *Jurnal Komunikasi Politik Digital*, 8(1), 67–85.
- Nugroho, Y., & Tapsell, R. (2021). *Hybrid Media System in Indonesia: Traditional and Digital Media Convergence*. *Indonesian Journal of Media Studies*, 15(3), 89–102.
- Tapsell, R. (2019). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield International.
- Tapsell, R. (2021). *Alternative Media and Political Discourse in Indonesia*. *Southeast Asian Media Studies Journal*, 4(2), 34–50.
- Wahid Foundation. (2023). *The Impact of Algorithmic Personalization on Political Polarization in Indonesia*. Wahid Foundation Reports.

PROFIL PENULIS



Putri Handayani Lubis, M.Si.

Putri merupakan seorang Dosen Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Agama di Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Putri menamatkan S1 di STMIK Nusa Mandiri Jakarta bidang Sistem Informasi dan menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang Ketahanan Nasional. Putri sudah mengikuti *Training of Trainers* dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia serta *Boot Camp* yang diadakan oleh Think Policy mengenai Kebijakan Publik tahun 2023.



Susi, S.Pd., M.Pd.

Susi lahir di Bogor pada tanggal 5 April 1979. Merupakan seorang akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini aktif bekerja sebagai dosen di Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang. Selain itu Susi melakukan penelitian yang berfokus pada isu-isu terkait dengan kewarganegaraan, keadaban digital, pendidikan politik, serta perlindungan hak anak dalam pembelajaran.



Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats.

Penulis merupakan seorang peneliti di IPOSS Jakarta. Penulis lahir di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan Master of Statistics di the University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika FMIPA pada tahun

1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati. Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*.



Hendy Achmad Reynaldi, S.I.P.

Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana pada program studi Master of Philosophy, Politics and Economics (MPPE) di Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Hendy menempuh studi di Negeri Kiwi sebagai salah satu penerima Beasiswa LPDP. Sebelum menempuh pendidikan S2, Hendy telah menamatkan jenjang S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tahun 2021 dan menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.). Hendy pernah bekerja sebagai asisten peneliti untuk proyek-proyek riset di bidang ilmu hubungan internasional di kampus alma maternya pada tahun 2021-2022. Hendy juga pernah bekerja sebagai peneliti pada bidang advokasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (Perhimpunan PATTIROS) tahun 2022-2023. Selain itu, Hendy juga pernah aktif sebagai kontributor konten edutainment di platform Sociology Perspective pada 2023-2025. Adapun portofolio karya-karya Hendy dapat dilihat pada <https://hareynaldi.com/#archives>.



Darto Wahidin, S.Pd., M.Sc.

Penulis lahir di Cirebon, Jawa Barat, 04 November 1993. Telah menamatkan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2016 dan S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019, keduanya lulus dengan predikat *Cumlaude*. Sejak kuliah S1 aktif dalam berorganisasi serta menjadi asisten dosen dan peneliti. Saat ini, penulis menjadi Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, serta Tutor di Universitas Terbuka. Beberapa judul karya yang pernah dipublikasikannya dalam buku bunga rampai yaitu: Membangun Keindonesiaan dalam Perspektif Ketahanan Nasional (2020); Radikalisme: Ancaman Bagi Ketahanan Ideologi (2020); Perilaku yang Beretika dalam Kehidupan Politik di Indonesia (2020); Mencegah *Bullying* Sesama Anak (2022), Konsep Dasar Disiplin dalam Pendidikan (2023); Transformasi Pendidikan di Era Digital(2024); Peran Pendidikan Karakter di Era Digital (2025).



Amri Wahid Hidayat, S.IP., M.I.Pol

Penulis Lahir di Banda Aceh, 1 Agustus 1994 dan saat ini berdomisili di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Penulis merupakan lulusan S1 Ilmu Politik di Universitas Syiah Kuala dan S2 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Adapun minat kajian penulis adalah tentang Pemilu, Partai Politik dan Partisipasi Politik.



Muhammad Ishak Syahadat, M.I.P.

Penulis lahir di Lohiya, 28 Januari 1988. Telah lulus pendidikan S1 Teknik Arsitektur dengan Kosentrasi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2011 dan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Fokus mengajar penulis yaitu pada mata kuliah Ekonomi Politik, Teori Demokrasi, Sistem Kepartaian dan Kepemiluaan, Pembangunan Politik, Politik Agraria, Statistik Sosial, dan Politik Perkotaan. Selain mengajar, penulis juga aktif melaksanakan Penelitian dan pengabdian Masyarakat. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pembaca dalam memahami pentingnya membangun kesadaran politik di kalangan anak muda agar tidak apatis dan berkontribusi secara aktif dalam politik Indonesia.



Dr. Sapta M.T. Purba, S.Sos, M.Pd.

Sebagai lulusan S3 Manajemen Pendidikan, Penulis telah memperoleh pengetahuan yang kuat dalam bidangnya. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai ASN di Lingkungan Kemendikbud selama 17 tahun dengan berbagai kompetensi dalam memfasilitasi pembelajaran di kelas pendampingan KKG/MGMP, Koordinator Sertifikasi Guru, Asesor Sekolah dan Madrasah serta menjadi *Master Trainer* Diklat Calon Kepala Sekolah di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, dan 7 Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Penulis juga pernah mengerjakan naskah akademik NSPK penyusunan Juknis dan Kurikulum Diklat. Sejak tahun 2019 telah bekerja di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.



Emillia, S.H., M.Kn.

Penulis lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tahun 1994, S2 Kenotariatan dan Pertanahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003. Mengawali karier di beberapa konsultan hukum kemudian berpraktek sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bogor dan meneruskan kecintaannya di dunia pendidikan sejak tahun 2004 dengan mengajar sebagai dosen tetap di Institut Teknologi PLN Jakarta hingga dengan saat ini. Penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar, kongres Notaris dan PPAT, dan berbagai penelitian & pengabdian masyarakat. Beberapa tulisan yang pernah diterbitkan dalam bentuk buku referensi yaitu berjudul: Etika BerPancasilais, Etika Menjadi Warga Negara, *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Etika Membentuk Karakter Warga Negara Milenial 4.0, Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis, PANCASILA: Kontekstualisasi, Rasionalisasi dan Aktualisasi, serta Demokrasi: Teoretis dan Praksis.



Muhammad Rachimoellah, S.ST., M.A.P.

Penulis merupakan seorang Dosen di Politeknik Negeri Pontianak pada Jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Negara. Muhammad Rachimoellah menamatkan D4 Administrasi Negara di Politeknik Negeri Pontianak dan menyelesaikan S2 Administrasi Publik di FISIPOL Universitas Tanjungpura. Penulis juga sudah mengikuti *Training of Trainers* dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2023.

MENYUARAKAN PERUBAHAN

MEDIA, PEMUDA, DAN PENDIDIKAN POLITIK DI ERA DIGITAL

Di tengah derasny arus informasi digital, pemuda menghadapi peluang sekaligus tantangan besar dalam memahami politik dan demokrasi. Buku Menyuarakan Perubahan: Media, Pemuda, dan Pendidikan Politik di Era Digital hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Disusun oleh akademisi dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu, buku ini mengupas bagaimana media membentuk opini publik, bagaimana disinformasi mengancam demokrasi, serta bagaimana pemuda dapat tampil sebagai agen perubahan melalui ruang-ruang digital maupun jalur pendidikan formal dan informal. Lebih dari sekadar kajian akademik, buku ini menyajikan refleksi kritis sekaligus inspirasi praktis tentang strategi memperkuat literasi politik di era digital. Setiap bab menghadirkan analisis yang tajam namun tetap mudah dipahami, diperkaya dengan studi kasus global maupun lokal. Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, dosen, aktivis, hingga pembuat kebijakan yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk tidak hanya memahami dinamika media dan politik, tetapi juga tergerak untuk turut serta menyuarakan perubahan.



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



IKAPI
IKATAN PENYERIT INDONESIA

No . 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7430-03-8 (PDF)



9

786347

430038